GORO-GORO MENJERAT GUS DUR

Marah, Sedih, Tawa, Rindu

Editor **Ahmad Zainul Hamdi**

LKiS
adın

GORO-GORO MENJERAT GUS DUR

Marah, Sedih, Tawa, Rindu

GORO-GORO MENJERAT GUS DUR

Marah, Sedih, Tawa, Rindu

Editor **Ahmad Zainul Hamdi**

Gading
2020

Goro-Goro Menjerat Gusdur
Marah, Sedih, Tawa, Rindu
©2020

Editor Ahmad Zainul Hamdi
Perancang Sampul dan Isi M Rizal Abdi

203 hlm + xvi, 14,5 cm x 21 cm

Cetakan Pertama, Juni 2020
ISBN 978-602-6610-96-6

Penerbit Gading
Jl. Pura No 203 Sorowajan Baru Yogyakarta

Pengantar Penerbit

TURIASSE QUIATE doluptas corest lant, as ulpa nusa velitianimus nobit anderep electem quatum esto eos verspic illaborro minctis a sequibu sdanto intem. Ut landell ecepudi qui dunt officium qui conse non comnisint.

Dolupta tempere excessus, cum idesti nulla sus dit et ut ut ent voluptassit omni beatia perciis nonse nobit, ommoluptae nonsecust, ut ma vollorepuda sint omnietur sequissimpos dit alibus atur, cus imus adi dolorumqui ullit, ut invel exped qui non rerion reptius velliquiatur alis autatiorenet lic to etur magnimus reium hario. Non porias quiatur maio. Nam aceptatem accabo. Exces aspeliqui corrovit verehen duntiuntet laborro coritat enemolent, conet faccae. Itate venihil loreptatur as sanihicium vites unt dolest ressi untiuri corerspid quodicto omnihic ipienis eicti totat.

Ota naturitatene id molupta ventus, exces re nonsedi aeperum fuga. Bea quas ea alit lis quodit repudit libus, omnit, adit moluptu riorestem hil ipis et apici dit que nimolut iliam,

et pratiusti occabor aut utem que net explaccat la nat et omnis exerum faccum faccullent, cusaperrovid quatum alique sumqui nobitio doluptur, solorernate doluptate et optate pliquis etur audipit atisto blaborr umquamet reptatem. Nam ipsae aliquation prati sum expliam fuga. Namus doluptas aut alitemporum, si sitatia prores am, officimin et moloritium ea ni dem re cuptatem faccusa doluptionse dia nobit, volupitist, officim agnitia volupta tendiorias ut as audam reici ommosam, ate volor si cum, ilitius as sit, odignati de poraepr ehendament eatesendem vellendio consedis eosapiet et moluption nis ea velluptati alis quatqui aesequodit adionsequo quia samus, sitium eatio to maximolum ratas dolutemquat oditate non ra et ut et verspis dis dolorpo restest, as demporendi conseniet quis quibus non est eatempore nihillaut aborum res alique sit imporum recea consedigenem nessition eum fuga. Offictae cusaecus aut estet ut eum inimet, sum quia cone dis et et quamus unti alis magnate perovitem quo endit, incimpos es et officipit aut aut od quo exceriatest pe molorrum aut od min conet faciam cuptatias digent.

Gus Dur: Inspirasi yang Menyatukan dan Menggerakkan

Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM.

Pendahuluan

SETELAH mendengar bahwa sahabat Ahmad Zainul Hamdi, atau yang biasa dipanggil Inung, sahabat saya dan kolega GUSDURian mengumpulkan tulisan tentang tokoh besar nasional, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam konteks pemakzulan beliau sebagai Presiden RI, saya berharap bahwa tulisan itu segera saja diterbitkan.

Seperti kebanyakan orang yang *concern* terhadap keadilan sejarah, saya segera membaca bagaimana variasi emosi atas temuan-temuan yang mengejutkan tentang siapa saja yang merancang dan terlibat dalam sekenario penjatuhan Gus Dur yang heboh itu sambil membayangkan betapa dahsyatnya tekanan yang beliau rasakan dan ikut meletakkan kesaksian betapa sabarnya beliau dan tingkat konsistensinya memandang amanah, jabatan, komitmen dan butir butir petuah ting-

kat tinggi lain yang muncul dari beberapa tulisan anak muda dengan segala perpektifnya. Tulisan-tulisan dalam buku ini bisa dipakai sebagai *point of view* terhadap sesuatu, sebagai referensi untuk mengatakan bagaimana keadaan tertentu itu sejatinya terjadi dan bagaimana kita harus berpikir, bersikap, dan merespon keadaan.

Bagi pengagumnya, seperti saya, Gus Dur adalah inspirasi. Gus Dur adalah perwakilan suara hati. Gus Dur itu adalah cermin bagi umatnya, baik umat yang terdidik maupun yang awam. Beliau adalah cermin untuk melihat wajah dunia, di mana kata-kata, reaksi yang khas, dan sikap-sikap beliau akan sesuatu hal dan suatu keadaan adalah cerminan dari suara hati. Untuk bab kesederhanaan hidup, Gus Dur itu orang yang sangat sederhana, seorang tokoh besar yang hidup *zuhud*, tak terlalu terpengaruh dengan harta dan kedudukan.

Tak bisalah kata batin pengikutnya, orang-orang biasa, apalagi kelompok orang-orang rakus menggurui, menekan-nekan, bahkan mengganggu beliau. Berbagai sikap atas ditemukannya fakta-fakta itu mengundang beragam reaksi. Bagi pengikutnya yang terdidik, beliau adalah seorang penjelas yang sangat terang benderang. Sebaliknya, bagi orang yang tak menaruh hati dan pembenci, beliau mungkin adalah tokoh yang menjengkelkan.

Gus Dur Itu Lambang

Gus Dur adalah tokoh yang memiliki kekuatan dan modal sosial yang solid. Beliau memiliki banyak sahabat dari berbagai unsur bangsa. Gus Dur adalah orang yang secara *nasab* (keturunan), memiliki posisi yang sangat tinggi dan terhor-

mat. Beliau adalah cucu *Hadhratus Syaikh* KH Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang.

Pondok pesantren Tebuireng memiliki relasi yang kuat secara sosial karena banyak alumninya atau santri KH Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral di Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri memiliki pengaruh sosial-politik yang sangat kuat di negeri ini. Bahkan hari-hari ini, arus pengaruh NU bisa dikatakan paling kuat, baik secara vertikal maupun horizontal.

Oleh karena itu, apa saja yang terjadi pada tokoh panutan ini, termasuk upaya orang untuk mengganggunya, bisa dianggap sebagai gangguan atas kelompok. Kohesivitas kalangan Islam tradisonal, dari mana Gus Dur berasal, terjaga dengan sangat baik. Sehingga, kalau ada yang marah dengan pemakzulan Gus Dur, sesungguhnya kemarahan itu adalah kemarahan bersama. Walau ungkapan kemarahan ini tidak lagi diekspresikan dengan tindakan yang kasar, namun cukup mengirim pesan mendalam siapa yang *minna/we* (kami dan/atau orang-orang yang bersahabat baik dan tulus dengan kami) dan *minhum/other* (mereka atau siapa saja yang memusuhi dan bertindak culas terhadap kami).

Terpatrinya ajaran kitab-kitab klasik, misalnya tentang ketaatan murid terhadap guru dan keterhubungan spiritual antara kyai dan santri, sebagaimana ajaran dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, dipadu dengan sikap akademik untuk tidak melupakan sejarah, pohon, dan mata rantai keilmuan sebagaimana yang terjadi dalam tradisi *sanad*, membuat santri tetap terikat secara kuat terhadap pesantrennya sekalipun mereka sudah lulus. Tidak peduli apakah santri itu pada akhirnya menjadi orang sukses atau orang biasa.

Sebagian besar santri pada saat mondok pasti berjanji dalam hati, kelak saat harus meninggalkan pesantren, entah karena sudah lulus atau karena alasan lain, kemudian menjadi "seseorang" di luar sana, haram baginya untuk melupakan pesantren dan kiai beserta keluarganya. Begitu pun para alumni Pesantren Tebuireng. Pasti mereka berjanji dalam hatinya, "Kalau aku nanti lepas dari pondok ini kemudian menjadi 'orang', aku akan mengharamkan diriku melupakan Pesantren Tebuireng dan keluarganya".

Inilah cerita sosiologis mengapa ratusan pondok pesantren, ribuan masjid dan mushala, serta ribuan majelis dzikir dan shalawat, yang didirikan dan dipimpin oleh alumni pesantren selalu tersambung dengan pesantren induknya. Ribuan yayasan pendidikan dan sosial tradisional di desa-desa tetap terhubung secara sosiologis, ideologis, dan spiritual dengan KH Hasyim Asyari. Keterhubungan ini kemudian diwujudkan dalam penghormatan, ketaatan, dan pembelaan terhadap sang cucu, yaitu Gus Dur.

Dalam konteks pluralisme di Indonesia, secara sosiologis, Gus Dur punya tempat yang unik, bahkan dihormati dengan posisi yang tinggi. Gus Dur memiliki tempat khusus di antara beberapa koleganya yang beragama lain, khususnya dari kalangan etnis minoritas di Indonesia. Jamak diakui bahwa beliau memiliki tempat yang unik dalam khasanah pluralitas ala Indonesia. Pembelaannya kepada kaum minoritas menginspirasi berbagai belahan benua.

Ketokohan Gus Dur kuat secara vertikal karena Gus Dur adalah tokoh pergerakan HAM, tokoh pergerakan *humanity* atau tokoh kemanusiaan. Sekalipun bertahta sangat tinggi, beliau tetap figur yang merakyat. Pakaian yang beliau pakai tidak

seperti pakaian kebesaran pejabat negara atau ulama Indonesia tertentu pada umumnya. Pakaian beliau biasa saja, cocok untuk kalangan bawah.

Makna Psikologis Pemakzulan

Gus Dur adalah emosi jiwa. Bagi orang biasa, seakan terbersit dalam hati: "Silahkan saja Anda bertengkar di Parlemen, mencaci maki lawan politik! Silahkan saja orang dihukum karena kesalahannya, asal bukan Gus Dur!"

Ketika peristiwa pemakzulan Gus Dur terjadi, saya saat itu sedang studi di Australia (2001-2004). Peristiwa itu mendapat respon yang mengejutkan dari guru saya, orang Amerika yang ahli Indonesia, Jim Schiller. Sebagai pengajar ilmu politik dan pemerintahan di Australia, di hadapan saya, dia berkomentar: "Orang orang Indonesia belum kuat dipimpin oleh seorang demokrat ulung seperti Gus Dur."

Tentu bagi seorang akademisi seperti Jim Schiller, ini bukan masalah bela-membela, bukan juga tentang benar dan salah. Bagi cendekiawan internasional ini, peristiwa pemakzulan Gus Dur adalah pintu baca untuk menelaah bagaimana kondisi perpolitikan, situasi kepartaian, dan cermin praktik-praktik pemerintahan di Indonesia saat itu. "Pelengseran Gus Dur adalah kebodohan sejarah, kemunduran demokrasi. Orang banyak terlalu terburu nafsu mengusir Gus Dur tanpa memberinya kesempatan bangsa ini untuk naik kelas martabat demokrasinya" ujarnya.

Saya kira Jim Schiller tidak sendirian. Kebanyakan ilmuwan dan pengamat Indonesia tidak setuju atas kejadian itu atas nama pembangunan demokrasi di Asia dan dunia. Kons-

pirasi apapun yang bisa mengganggu Gus Dur akan menjadi urusan bersama. Bagi mereka, mempertahankan Gus Dur dalam posisinya yang agung adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks ini, Gus Dur bukan hanya wakil rakyat kecil atau Islam tradisional. Gus Dur adalah *icon* pengembangan demokrasi di Asia dan dunia.

Bagi saya yang belajar psikologi politik, terungkapnya dokumen, fakta, serangkaian bukti otentik tentang upaya merongrong Gus Dur, sesungguhnya adalah keruntuhan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh sehat. Secara moral politik, itu menunjukkan kebobrokan moral kelompok yang saat itu melakukan manuver politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Itu adalah kejahatan politik karena menggunaan suprastuktur politik pemerintahan untuk tujuan yang berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi tapi mengatasnamakan demokrasi. Itu adalah konspirasi antar-aktor formal lembaga pemerintahan, partai politik, dan dunia usaha yang digerakkan oleh kebencian dan alasan perebutan kekuasaan. Apa yang mereka lakukan jelas tidak sah karena menggunakan data-data palsu dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

Sekalipun demikian, itu bukanlah satu satunya makna. Bagai saya, secara psikologi politik, pemakzulan Gus Dur dan dan terungkapnya dokumen "Semut Merah" itu ibarat nuklir yang mengirimkan radiasi ke generasi muda Nahdlatul Ulama pada umumnya. Dalam sebuah situasi yang tenang, generasi muda NU ini seakan terpapar radiasi yang biasa disebut sebagai pengentalan kelompok. Dalam ilmu sosiologi, ini merujuk pada gejala pengentalan kelompok etnis tertentu yang disebut sebagai *ethnocentrism*.

Kekentalan kelompok ini dianggap penting untuk mempersatukan perbedaan perbedaan kecil. Sayangnya, kekentalan yang saya lihat itu sifatnya temporer, seperti klub sepak bola yang dikalahkan klub negara tetangga dalam arena final penting. Saat itu memang keberpihakan dan keinginan untuk mengalahkan sang musuh menguat. Sayangnya, itu tidak menjadi gerakan terstruktur sebab penggulingan itu di arena politik kenegaraan yang sah.

Namun, mungkin saja kekesalan ini tetap hidup, sekalipun sporadis, dalam kancah politik kecil di pemerintah daerah atau di birokrasi atau di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tak pelak, ini adalah *engine* kebersamaan perasaan. Asa di atas dapat kita rasakan dalam beberapa *tone* tulisan pada kader Gus Dur dalam buku ini.

Wallahu a'lam bi al-shawab!.

Daftar Isi

Pengantar Penerbit — v
Kata Pengantar — vii
Gus Dur: Inspirasi yang Menyatukan dan Menggerakkan,
Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM. (Ketua PW ISNU Jawa Timur)

Prolog
Kemarahan Terindah
Ahmad Zainul Hamdi — 1

BAGIAN SATU: MARAH
Pemakzulan Gus Dur: Perspektif Politis dan Yuridis
Tohadi — 17
Pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid:
Kecelakaan Politik Ketatanegaraan
Hufron —50

Risiko Presiden Antikompromi
Marzuki Wahid —59
Gus Dur dan Kebenaran yang Tertunda: Kesaksian Korlap Aksi Melawan Penjatuhan Presiden Gus Dur
*Moh. Syaeful Bahar —*76
Mihnah Gus Dur: Menjerat Para Politisi dan Intelektual Pengkhianat Reformasi
Aksin Wijaya — 85
Gus Dur, Megawati, dan Jeratan Oligarki
Ahmad Zainul Hamdi — 99

BAGIAN DUA: SEDIH
Luka ini Bukan karena Dikalahkan, tapi karena Dikhianati
Fawaizul Umam — 105
Sang Pembela yang Tak Dibela
M. Said Hudaini — 118

BAGIAN TIGA: TAWA
Kisah sebuah Joke di Istana Negara Menjelang Pelengseran Gus Dur
Moh. Syaeful Bahar — 127
Presiden Oleng
M. Faizi — 133
Terhadap Para Pembencinya, Gus Dur Bilang: "Gitu Saja Kok Repot!"
Rijal Mumazziq Z. — 141
Gus Dur yang Memang Woles
R.N. Bayu Aji — 149

BAGIAN EMPAT: RINDU
Merindukan Gus Dur, Manusia Mulia Potret Muslim
Ramah Tanpa Amarah
Anis Hidayatie — 157
Becik Ketitik, Olo Ketoro: Menafsiri (Presiden) Gus Dur
Listiyono Santoso — 161
Bukan tetang Jabatan, Politik adalah tentang
Kemanusiaan
Ferhadz A. Muhammad — 173
Gus Dur Teladan Politik Nir-Ego
Fahrul Muzaqqi — 179
Gus Dur, Sheriff dan High Noon in Jakarta
Ahmad Hakim Jayli — 183

Kronologi Pemakzulan Presiden Gus Dur — 188
Biografi Kontributor —196

Prolog:
Kemarahan Terindah

Ahmad Zainul Hamdi

PERNAHKAH Anda membayangkan bagaimana perasaan orang yang memendam kemarahan selama puluhan tahun karena dituduh melakukan kejahatan, padahal dia sungguh-sungguh tidak melakukan itu. Dia tidak tahu bagaimana harus membela diri karena semua mata memandangnya penuh curiga, semua jari menunjuk kepadanya sebagai penjahat yang layak dinista. Semua orang telah menuduhnya sebagai bangsat yang paling bangsat. Setiap pembelaan yang coba dilakukan tidak membuat kebenaran bisa dinyatakan, tapi justru semakin menguatkan tuduhan.[1]

Mungkin seperti itulah perasaan yang kami pendam selama sembilan belas tahun. Sembilan belas tahun kami menanggung luka dan kemarahan atas pelengseran Gus Dur. Kami tak

1 Bagian akhir tulisan ini telah diterbitkan *islami.co* dengan judul "Lelaki yang Ambyar karena Keculasan itu Bernama Abdurrahman Wahid," 3 Januari 2020.

bisa menyatakan kebenaran. Bahkan kami tidak tahu harus berkata apa. Luka yang dipendam itu tak pernah sembuh. Lambat laun memang kami bisa mengabaikannya, tapi luka itu tetap ada di sana. Sekalipun pada akhirnya kami memilih diam, tapi kami tak pernah melupakannya.

"Gus Dur adalah kami". Saat Gus Dur dilengserkan dari kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kami terluka. Sekali lagi, luka itu teramat perih hingga membentuk telaga kemarahan. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Sebagian kami bersiap untuk mati, tapi Gus Dur justru menyambut kami dengan gurauan dan meminta kami untuk pulang ke rumah dan menjalani hidup seperti biasa. "Tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian, apalagi sampai menumpahkan darah orang Indonesia. Nanti sejarah akan membuktikan kebenarannya," katanya pada kami.

Kami pulang ke rumah. Tapi kami tetap marah. Sebagian dari kami melampiaskan kemarahan dengan menebang pohon dan meletakkannya melintang di jalan raya sehingga membuat transportasi macet total. Gus Dur memarahi kami yang sedang marah karena membelanya. Kami membelanya karena kami yakin bahwa Gus Dur bukanlah seperti tuduhan-tuduhan yang dilontarkan para musuh politiknya.

Kami sadar, ternyata kami bukanlah Gus Dur. Kami saja yang *ge-er* menyamakan Gus Dur dengan kami. Jelas kualitas Gus Dur jauh di atas kami. Kami hanyalah kumpulan manusia pemarah. Ya, kami memang marah. Tapi kami marah karena kami yakin Gus Dur bukanlah orang seperti yang mereka tuduhkan: mengkorup dana Yanatera Bulog, maling bantuan Sultan Brunei, dan membahayakan negara melalui kebijakan-kebijakan politik yang ugal-ugalan.

Kami yakin Gus Dur bukan seperti itu. Kalau ditanya mengapa kami yakin, jawabannya adalah karena kami telah menyaksikan kejujurannya, kesederhanannya, keberaniannya melawan otoritarianisme Orde Baru saat nyaris semua orang—bahkan tokoh-tokoh yang pada 1998 berteriak lantang Reformasi—hanya bisa membisu, kerendahan hatinya menemani orang-orang yang disingkirkan, dan "kenekadannya" melawan arus saat harus memperjuangkan sesuatu yang diyakininya sebagai prinsip.

Gus Dur bukanlah orang yang menebar janji manis untuk bisa meraih kekuasaan. Dia menjadi presiden karena selama ini telah menunaikan kebajikan dalam hidupnya. Orang bisa mengatakan bahwa Gus Dur menjadi presiden karena dinamika politik waktu itu, tapi orang juga harus bisa menjawab mengapa Gus Dur yang harus dipilih, mengapa bukan orang lain, Amien Rais, misalnya. Jelaslah bahwa pilihan itu karena semua orang memandangnya sebagai sosok yang bisa membawa Indonesia menyeberangi arus Reformasi karena dia telah menunjukkan kualitas untuk itu.

Jadi, ketika seorang anak muda bernama Virdika Rizky Utama menemukan sebuah dokumen berisi permufakatan jahat para pengkhianat Reformasi yang bersekongkol dengan sisa-sisa kekuatan rejim Orde Baru yang tak rela kekuasaannya hancur berkeping-keping, untuk menjungkalkan Gus Dur dari kursi kepresidenan karena dianggap sebagai penghalang dari kerakusan kekuasaan para politisi jahat itu, kami rasanya tiba-tiba punya bantal untuk menumpahkan seluruh air mata yang selama ini sengaja kami bendung agar tak tumpah. Buku *Menjerat Gus Dur* seperti magnet di mana jutaan orang yang sekian lama menanggung kepedihan bercampur kemarahan

bertemu dalam satu titik. Jutaan orang itu seakan meledakkan perasaan bersama, membentuk satu ungkapan yang mungkin campuran antara umpatan dan kelegaan: "Ah akhirnya, Tuhan menyingkap kebusukan yang selama ini rapi disimpan!"

Jika selama ini kami hanya meyakini kebenaran ucapan Gus Dur, "Nanti sejarah akan membuktikan kebenarannya", buku *Menjerat Gus Dur* terasa seperti jawaban Tuhan atas keyakinan itu. Buku yang ditulis Virdika, yang dianggap sebagai sampah oleh Fuad Bawazir, politisi Orde Baru yang menjadi salah satu aktor penting dalam skenario jahat pemakzulan Gus Dur, sejak awal terasa sangat epik. Menurut tuturan penulisnya, ia menemukan dokumen "Semut Merah", skenario jahat pemakzulan Gus Dur, dari tumpukan kertas di kantor Golkar yang hendak dikilokan. Instingnya sebagai seorang jurnalis mendorongnya untuk membuka-buka tumpukan kertas itu hingga menemukan dokumen "Semut Merah" yang menjadi bahan utama bagi penulisan bukunya itu. Selama proses riset dan penulisan buku pun dia tidak luput dari ancaman, baik yang diterimanya secara langsung maupun lewat orang tuanya.

***

Buku yang kami tulis bareng-bareng ini berisi luapan kemarahan itu. Kami tak pernah berpretensi mewakili perasaan jutaan orang yang memendam luka dan marah selama sembilan belas tahun karena mereka memiliki perasaannya sendiri-sendiri. Sekalipun demikian, buku ini bisa jadi adalah menyuarakan rasa marah itu.

Sekalipun buku ini adalah suara kemarahan, jangan khawatir, kami tak akan membalas perlakuan jahat itu. Kami mungkin tak sesabar Gus Dur, tapi kami bukan gerombolan

manusia culas seperti para politisi busuk yang memakzulkan Gus Dur. Kami bersepakat untuk menumpahkan kemarahan itu menjadi tulisan-tulisan ringan yang renyah dan enak untuk dibaca. Jika ada frasa yang tepat untuk menggambarkan buku ini, mungkin frasa itu berbunyi "kemarahan terindah".

Jika ada sebuah karya yang bisa disepadankan dengan buku ini, mungkin itu adalah lagu dangdut koplo yang berjudul "Gus Dur Pendekar Rakyat". Lagu ciptaan Dalang Poer Ngawi ini dipopulerkan oleh seorang penyanyi dangdut, Eny Sagita. Lagu ini berkisah tentang penjatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan karena konspirasi jahat oleh para reformis gadungan.

Liriknya tidak bisa ditutupi, adalah sebuah kemarahan. Tapi karena dituangkan ke dalam sebuah lagu dangdut, maka kemarahan itu tersuguhkan menjadi sebuah keindahan, bahkan bisa dinikmati sambil bergoyang. Inilah yang saya sebut dengan istilah "kemarahan terindah". Penggalan liriknya adalah sebagai berikut:

> *"Kelingan welingmu sing prasojo: Agomo ngayomi jagad royo. Sak lungamu akeh sing rumongso kelangan. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dijegal kono kene mergo mbeloni rakyate, sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, endi kucing ngendi asu."*
>
> (*Teringat nasihatmu yang jelas dan sederhana: "Agama itu memberi kebaikan pada semesta." Sepeninggalmu, banyak yang merasa kehilangan. Pendekar rakyat yang rela menjadi korban. Dijerat karena membela rakyat bawah yang terus-menerus disingkirkan. Sekalipun*

matamu tak bisa melihat, namun batinmu mawas hingga sanggup bedakan mana kucing mana anjing).

Di dalam buku ini, Anda akan menemukan tulisan-tulisan pendek-ringan yang bagian per bagian bisa dibaca selesai dalam sekali helaan. Gaya tulisan macam-macam. Ada yang bergaya akademik (pakai referensi ketat), ada juga yang bersifat reflektif; ada yang menghadirkan kepedihan *ngelangut*, ada juga tulisan yang menertawakan situasi waktu itu.

Sekalipun buku ini bisa dianggap sebagai buku testimonial, namun tak semua penulis di buku ini menjadi saksi langsung atas peristiwa pemakzulan Gus Dur. Sebagian ada yang terlibat langsung, sebagian ada yang mengikutinya dari jauh, bahkan ada yang saat peristiwa itu terjadi, dia baru murid sekolah menengah yang hanya menyaksikan gurat kesedihan orang tuanya.

Saat peristiwa itu terjadi, saya sendiri hanya mengikutinya melalui media. Saat itu saya menjadi dosen muda di STAIN Ponorogo (saat ini IAIN Ponorogo). Setiap kali menonton TV atau membaca koran yang memuat berita politik, saya tidak sanggup mengikutinya. Nyaris semua media menjadi corong orang-orang yang ingin menjungkalkan Gus Dur. Mencari berita yang memuat hal positif tentang Presiden Gus Dur saat itu seperti berharap datangnya hujan di musim kemarau.

Bayangkan, ketika Reformasi politik masih berusia bayi, orang-orang yang selama sekian puluh tahun tidak pernah mengikuti berita politik tiba-tiba keranjingan dengan politik, informasi media yang terus-menerus menyudutkan Gus Dur akhirnya membentuk opini publik bahwa Gus Dur memang layak untuk dilengserkan. Setidaknya, publik mulai meragu-

kan bahwa Gus Dur adalah presiden yang tepat untuk menahkodai bahtera Indonesia dalam mengarungi situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu. Apalagi, konflik bernuansa etno-religius pecah di beberapa tempat. Seruan-seruan Gus Dur sebagai presiden seakan tidak menunjukkan instruksi efektif dari seorang penguasa.

Melalui apa kami harus membantahnya? Tidak ada cara. Yang bisa kami lakukan adalah diam. Memendam kepedihan dan amarah jauh di lubuk hati. Jika kami yakin bahwa Gus Dur tidak seperti yang mereka gambarkan, itu karena kami bertahun-tahun telah menyaksikan karya-karya Gus Dur dan membuktikan integritasnya. Tapi, bagaimana kami harus menyatakannya? Sekali lagi, tidak ada cara.

Saking tidak kuatnya, diam-diam saya berharap agar Gus Dur melakukan kompromi dengan gerombolan penentangnya. *Mbok* ketika sedang dihantam dengan tuduhan Buloggate dan Bruneigate, Gus Dur mengalah sedikit dengan tidak mencopot Kapolri S. Bimantoro. *Mbok* Gus Dur jangan mengeluarkan statemen yang terkesan menantang para poitisi Senayan yang sedang galak-galaknya ke dia. *Mbok* Gus Dur jangan mencopot Laksama Sukardi dan Jusuf Kalla, dua menteri yang merepresentasikan dua kekuatan politik besar saat itu. *Mbok* Gus Dur menuruti sedikit saja kemauan para politisi itu. Andai Gus Dur mau berkompromi dengan mereka, mungkin situasinya tidak lagi keruh. Gus Dur mungkin akan tetap menjadi presiden, melaksanakan agenda-agenda Reformasi dengan pelan-pelan.

Tapi itulah naifnya saya. Gus Dur bukanlah manusia selemah saya. Gus Dur bukan orang yang begitu peduli dengan kekuasaan sehingga harus mengorbankan prinsip yang diyaki-

ninya. Bahkan ketika politisi Senayan sedang marah-marahnya ke dia, Gus Dur dengan enteng mengolok mereka sebagai "taman kanak-kanak".

Beberapa tulisan di sini menjadi saksi bahwa di saat situasi politik yang sangat panas saat itu, ketika kekuasaannya sebagai presiden nyaris tak mungkin lagi dipertahankan, Gus Dur sama sekali tidak panik. Tidak ada ketakutan sedikit pun bahwa dia akan kehilangan kekuasaannya. M. Syaeful Bahar di buku ini mengisahkan bahwa saat Gus Dur menerima rombongan para kiai, santri, dan aktivis Jawa Timur yang siap mati untuknya, Gus Dur justru menyambutnya dengan gurauan yang selama ini menjadi *trade mark*-nya.

Rombongan yang penuh dengan amarah dan dan mendesak Gus Dur untuk segera mengambil langkah mengamankan kekuasaannya, Gus Dur malah berkelakar dengan *joke* tentang orang Madura yang adu ketangkasan bersenjata melawan Robin Hood dari Inggris dan Rambo dari Amerika Serikat.

Sebagai pelawak sejati, Gus Dur tahu *joke* apa yang harus disampaikan ketika menghadapi orang yang sedang marah. *Joke* adu ketangkasan bersenjata jelas digunakan untuk mengkanalisasi kemarahan para pendukungnya, sekaligus mentransformasinya menjadi ketenangan yang membahagiakan. Dengan cerdik, Gus Dur mengubah kemarahan menjadi gurauan. Ketika semua orang tertawa, Gus Dur telah berhasil mengubah energi kemarahan menjadi kenikmatan. Seakan dia hendak menyatakan, "seberat apapun kehidupan, jangan lupa untuk tetap tertawa."

M. Faizi, seorang putra kiai dari Pesantren Annuqayyah Guluk-Guluk Sumenep, mengisahkan bahwa saat Gus Dur sebagai presiden berkunjung ke pesantrennya, nyaris

tak ada satu pun kalimat yang berbau politik. Gus Dur tak hendak mengadu kepada para kiai dan santri pendukungnya tentang betapa beratnya situasi politik nasional yang sedang dihadapinya. Yang dibahas malah basis "epistemologis" yang mendasari penamaan pondok pesantren Annuqayah, sebuah informasi yang bahkan baru diketahui oleh kebanyakan santri Annuqayyah.

Saya sendiri punya pengalaman tentang ketenangan Gus Dur dalam menghadapi kegentingan politik waktu itu. Peristiwa itu terjadi saat Sarasehan Budaya yang dilakukan Desantara pada 11 Juni 2001,[2] sebulan sebelum Gus Dur di makzulkan melalui Sidang Instimewa MPR (23 Juli 2001). Panitia mengundang Gus Dur untuk menjadi pembicara. Tentu saja, semua peserta sangat berharap Gus Dur bisa hadir. Rasanya istimewa sekali jika acara sekecil dan "setidak berguna" seperti itu dihadiri Gus Dur sang Presiden, bahkan kalaupun Gus Dur bukan presiden pun rasanya harapan itu terlalu muluk. Panitia sendiri sejak awal tidak bisa memberi jawaban pasti. Siapa juga yang bisa memastikan kedatangan Gus Dur saat itu, apalagi suasana politik nasional sedang panas karena upaya penjatuhan Gus Dur berhembus sangat kencang.

Hari terakhir ketika semua orang sudah "ikhlas" atas kemungkinan ketidakhadirannya, tiba-tiba ada kabar bahwa Gus Dur sudah di jalan menuju ke acara sarasehan. Seketika suasana riuh campur tegang seperti menyambut datangnya hari raya. Tak lama kemudian Gus Dur datang dengan kawalan.

2 Saya sebetulnya sudah lupa kapan dan nama hotel tempat acara ini berlangsung. Saya hanya ingat bahwa itu menjelang pelengseran Gus Dur. Saya berterima kasih ke Moh. Nurul Huda yang sudah mengingat saya bahwa acara itu terjadi pada 11 Juni 2001 di Hotel Wisata, Jakarta.

Ruang sarasehan yang terbatas itu penuh sesak oleh wartawan. Saya yakin wartawan-wartawan itu memburu statemen Gus Dur terkait dengan politik nasional saat itu. Kami semua waswas bahwa sarasehan kebudayaan itu akan berubah menjadi forum politik.

Akhirnya Gus Dur memulai pembicaraan. Dia duduk di kursi depan. Tampak seperti seorang budayawan, bukan presiden. Sekitar satu setengah jam dia berbicara tentang kebudayaan. Tak ada secuil pun kalimatnya berbicara tentang politik, apalagi menyenggol situasi politik saat itu. Saya yakin wartawan kecewa, karena dalam situasi seperti itu, untuk apa memberitakan statemen Gus Dur tentang strategi pengembangan kebudayaan nasional. Pasti yang dicari adalah statemen politik yang kemudian bisa diolah.

Setelah sesi Gus Dur itu, kami rehat *coffee break* di teras sambil membincang Gus Dur dan kemungkinan apa yang akan terjadi padanya sebagai presiden. Pembicaraan dimulai dengan kekaguman kami bahwa dalam situasi seperti ini, Gus Dur sama sekali tidak membicarakan politik, bahkan dia tidak terpancing sekalipun dalam sesi tanya jawab ada yang mencoba menggiringnya ke arah sana. Tidak ada sedikit pun raut kepanikan bahwa dia kemungkinan sebagai presiden akan jatuh.

Ah Gus Dur, hati seperti apa sih yang engkau miliki sehingga bisa setenang dan sesabar itu? Bahkan ketika orang yang mengaku sebagai sahabat, yang engkau bela saat ia di-*kuyo-kuyo* Soeharto pada akhirnya turut terlibat dalam persekongkolan untuk menggulingkanmu dan mengambil posisimu sebagai presiden pun, engkau tetap tak menjadikannya sebagai musuh. Sementara kami yang sama sekali tidak terlibat dalam politik, tetap tak bisa sepenuhnya meluruhnya rasa marah dalam dada.

***

Dalam beberapa kesempatan, Mbak Alissa Wahid, putri pertama Gus Dur, mengisahkan protesnya bersama adik-adiknya kepada bapaknya ketika sang bapak mau menerima mandat sebagai Presiden RI ke-4. Bisa dipahami mengapa anak-anak itu protes. Menjadi anak Gus Dur berarti harus siap menerima sanjungan hingga hinaan. Apalagi, ketika si Bapak menjadi presiden di masa transisi politik, di saat bahkan ular berbisa pun bisa berlagak seperti reformis sejati. Yang paling meresahkan anak-anak itu tentu saja adalah hilangnya kemewahan sebuah *privacy* keluarga, kontak intens antara anak dan bapak. Menjadi anak presiden di era seperti itu tak mungkin membayangkan kemewahan hidup dan keistimewaan layanan, apalagi presidennya adalah Gus Dur.

Menjawab protes anak-anaknya itu, kata Mbak Alissa, Gus Dur mencoba memberi pengertian, bahwa dia harus memanggul beban ini karena kalau tidak, Indonesia akan pecah. Perjuangan rakyat dan mahasiswa yang sudah turun ke jalan berbulan-bulan akan sia-sia jika tidak ada yang mengawalnya. Indonesia ibarat kapal yang tengah berlayar mengarungi amukan gelombang samudra. Bahtera Indonesia sedang dipertaruhkan: remuk atau selamat sampai tujuan. Jadi, menjadi presiden bagi Gus Dur bukan pemenuhan sebuah ambisi, tapi panggilan suci.

Beberapa kali saya mendengar kisah itu. Saya memercayainya, sungguh memecayainya. Tapi hanya sebatas itu. Tak kurang, tak lebih. Tak ada hati yang tergetar, tak ada dada yang berdebar. Bahkan, ketika ada cerita seorang sahabat Gus Dur bertanya kepada Gus Dur, apakah dia sakit hati dilengserkan dari kepresidenan, dan Gus Dur menjawab, “tidak”, dan

si sahabat itu berkelakar, "yang bener?", kisah itu pun hanya menjadi bahan kelakar di antara kami. Saya yakin Gus Dur tidak tersinggung apalagi marah kami berkelakar tentang penjatuhannya, bukankah salah satu keahliannya adalah menertawakan dirinya sendiri.

Baru kini, setelah semua permufakatan jahat penjatuhannya terbongkar dalam buku *Menjerat Gus Dur*, saya merenung kembali dan membatinkannya ke kedalaman hati, tentang kejujurannya dalam merespon protes putri-putrinya. Dia sama sekali tak mengambil kesempatan untuk menjadi presiden karena gila kekuasaan, tapi penggilan perjuangan sebagai seorang demokrat yang harus menyelamatkan negaranya dari para pembajak yang juga duduk di kapal yang sama.

Baru kini, setelah semua kebusukan terbongkar melalui dokumen yang nyaris dikilokan, saya menyadari dengan sepenuh hati makna ungkapannya: "Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian." Ketika para pendukungnya siap mati untuknya, Gus Dur memerintahkan untuk pulang ke rumah, dan bekerja seperti biasanya. Baginya, tak perlu ada yang mati untuknya, apalagi jika kematian itu untuk mempertahankan sebuah jabatan dunia.

Baru kini, setelah sembilan belas tahun berlalu dari keculasan politik yang berujung penjatuhannya, saya menyadari bahwa ia sengaja menempatkan dirinya sebagai lilin. Ia sadar bahwa kekuasaan itu adalah api yang akan membakar tubuhnya. Sekalipun demikian, dia tetap memilihnya karena dalam situasi gelap, di mana banyak orang yang tak sanggup membedakan antara kebenaran dan kesalahan, memilah kejujuran dari keculasan, dia harus menyalakan cahaya. Bahkan, ketika cahaya itu harus membakar dirinya.

Sejarah akhirnya mencatat, MPR yang saat itu dipimpin Amien Rais menggelar Sidang Istimewa dengan agenda memberhentikan Gus Dur dari kekuasannya sebagai Presiden RI ke-4. Peristiwa ini diawali dengan keluarnya nota pertama pada 1 Februari 2001, kemudian disusul nota kedua pada 30 April 2001, disertai permintaan DPR (saat itu diketuai Akbar Tanjung) kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. Dan, Gus Dur pun diturunkan. Peristiwa itu tetap membekas di benak banyak orang karena campuran perasaan haru dan pemandangan lucu. Gus Dur menyapa pendukungnya yang siap mati untuknya dengan memakai celana kolor.

Tiga tahun setelah pelengserannya, tepatnya pada 11 Maret 2004, dia menulis sebuah artikel yang berjudul "Pemimpin dan Kepemimpinan". Di dalamnya dia mengulas sejarah kepemimpinan nasional mulai sebelum kemerdekaan hingga era Reformasi. Salah satu paragrafnya tertulis sebagai berikut:

> *"Ketika 'reformasi' lahir tahun 1998, orientasi baru yang tidak otoriter belum sampai membentuk pemerintahan yang benar-benar demokratis. Yang tercapai hanyalah pemerintahan quasi demokrasi (seolah-olah demokrasi), dengan akibat 'menghilangnya' para pejuang demokrasi, dan para pemimpin dengan kepemimpinan mereka dari roda pemerintahan. Pemerintahan akhirnya jatuh ke tangan mereka yang berambisi politik sangat besar tetapi tidak memiliki kepemimpinan dengan orientasi yang benar. Mereka hanya memikirkan kekuasaan golongan sendiri, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok sendiri, tentu saja dengan mengorbankan kepentingan orang banyak."*

Tahun 2004, ketika tulisan itu muncul, banyak yang melihatnya tak lebih dari ungkapan kekecewaan Gus Dur karena "kalah" dalam pertarungan politik. Paragraf sejelas itu dianggap tidak lebih dari sekedar ratapan, atau paling jauh, sekedar ulasan subjektif dari seorang politisi dalam menilai lawan politiknya.

Baru kini, setelah terbongkar konspirasi jahat para oligark, kita menyadari bahwa melalui tulisan di atas, Gus Dur sebetulnya menyuarakan sebuah kebenaran bahwa reformasi politik tak selalu berujung tegaknya demokrasi. Ketika para pejuang demokrasi sejati dilenyapkan dan kepemimpinannya dihancurkan, pemerintah akhirnya jatuh ke tangan politisi yang hanya mementingkan kekuasaan. Para politisi ini akan mengeruk keuntungan, sekalipun dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Rakyat hanya menjadi bahan jualan saat merebut kekuasaan, yang segera akan ditinggal dan dilupakan setelah kekuasaan ada di tangan. Tak ada demokrasi. Yang tersisa hanyalah pesta para oligark.

Terhadap itu semua, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai lilin yang memberi cahaya, menunjukkan arah. Dan kini, Gus Dur kembali menyalakan cahaya melalui dokumen yang teronggok, bahwa dia disingkirkan bukan karena kesalahan, tapi karena dianggap penghalang bagi para oligark yang tidak rela kekuasaan dan keuntungannya berkurang.

Bagian Satu

MARAH

Pemakzulan Gus Dur:
Perspektif Politis dan Yuridis

Tohadi

"YANG lebih penting dari politik adalah kemanusiaan," demikian ajaran mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyikapi dan memperlakukan politik, khususnya di negeri Indonesia ini. Bagi seorang humanis seperti Gus Dur, politik adalah sebagai sarana *(washilah)* untuk seorang pemimpin dalam menuaikan kewajiban atas rakyat yang dipimpinnya, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sikap dan pemahaman Gus Dur seperti ini tidak dapat dilepaskan dari sosoknya sebagai seorang *santri* yang selalu mendasarkan perilakunya pada nilai dan ajaran agama (Islam) yang dianutnya. Kaidah *fiqh* dalam Islam mengajarkan, "Tindakan pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya harus diletakkan dalam rangka [mencapai] kesejahteraan *(kemashlahatan)* mereka." Maka, ketika jabatan Gus Dur sebagai seorang presiden dimakzulkan oleh anasir kekuatan Orde Baru yang tidak rela kekuasaannya lepas karena kekuatan Reformasi, Gus

Dur lebih memilih jalan hukum dan konstitusi, bukan mengorbankan masyarakat akar rumput.

Gus Dur sadar betul, jika harus melibatkan akar rumput, akan terjadi bentrokan di antara sesama anak bangsa. Menjadi pantang baginya untuk mempertahankan jabatan presiden dengan membiarkan konflik dan bentrokan sesama anak bangsa. Gus Dur sangat mencintai sesama manusia. Mencintai kemanusiaan! Itulah mengapa Gus Dur sampai menyatakan, "Tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian."

Tulisan ini akan melihat sisi politik dan hukum dari peristiwa pemakzulan Gus Dur. Bagaimanakah pemakzulan Presiden Gus Dur dilihat dari aspek politis dan hukum (yuridis). Dari sini kemudian akan melihat bagaimana "perlawanan" Gus Dur dalam mempertahankan hak konstitusionalnya sebagai presiden.

Bermula dari Pansus Buloggate dan Bruneigate

Sebelum lahir Pansus Buloggate dan Bruneigate, sebenarnya telah ada beberapa manuver politik yang dilakukan oleh para politisi utamanya di DPR untuk melengserkan Gus Dur. Para politisi lintas-fraksi di DPR yang kecewa dengan kebijakan Presiden Gus Dur, mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas kemungkinan menggunakan hak interpelasi. Tema-tema dalam pertemuan-pertemuan itu antara lain: likuidasi Departemen Sosial dan Departemen Penerangan; kebijakan Presiden Gus Dur dalam pemberhentian Roesdihardjo; mem-*back up* Gubernur BI Syahril Sabirin, dsb. Di pertemuan-pertemuan inilah lahir *design* hak interpelasi terkait dengan pemberhentian Jusuf Kalla

dan Laksamana Sukardi.[1] Puncaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota F-PG DPR, Ade Komaruddin, upaya serius memakzulkan Gus Dur adalah ketika muncul kasus Bulog yang kemudian diikuti kasus Brunei.[2]

Dalam buku *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, Mahfud MD mengisahkan muasal kasus *Buloggate*. Pada suatu hari, Wakil Kepala Bulog, Sapuan, dengan ditemani Suwondo, bertemu dengan Presiden Gus Dur di kantornya. Dalam pertemuan itu, Gus Dur menanyakan kepada Sapuan tentang kemungkinan ada atau tidaknya dana di Bulog yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatasi pergolakan di Aceh.

Sapuan mengatakan bahwa ada dana di Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog, tetapi pengeluarannya harus dengan perintah Kepala Bulog. Kepala Bulog waktu itu adalah Jusuf Kalla yang juga merangkap sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian, didapatkan informasi dari Jusuf Kalla bahwa dana itu bisa dikeluarkan tetapi harus dengan Keputusan Presiden (Keppres). Karena harus dikeluarkan melalui Keppres, Presiden Gus Dur langsung membatalkan keinginannya. Yang menjadi masalah kemudian

---

1 Kajian mengenai ini bisa dibaca dalam tesis penulis pada Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, 2003, berjudul *Pergeseran Kekuasaan Antara Lembaga Kepresidenan dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu 1999 Pasa Masa Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid*. Uraian peristiwa politik dan hukum dalam tulisan ini didasarkan pada tesis penulis sebagai sumber data utamanya.

2 Wawancara penulis dengan Ade Komaruddin, Wakil Bendahara F-PG DPR di era pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, pada tanggal, 30 Juni 2003.

adalah adanya fakta pencairan dana sebesar Rp 35 miliar tanpa Keppres dan tanpa sepengetahuan Jusuf Kalla.[3] Gus Dur sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan dana Yanatera Bulog untuk mengatasi pergolakan di Aceh karena telah ada bantuan dana dari Sultan Brunei.

Kekecewaaan partai-partai politik dan para politisi di DPR terhadap Presiden Gus Dur seakan menemukan momentum gorengannya. Mereka memanfaatkan isu pencairan dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Kedua kasus tersebut digiring untuk menyudutkan Gus Dur. Sebanyak dua ratus tiga puluh enam anggota DPR RI yang dimotori para politisi muda yang disebut "kelompok koboi" mengusulkan kepada DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap dua kasus itu.[4] Sedangkan usulan untuk membentuk Pansus Buloggate dan Bruneigate hanya didukung oleh sekitar dua belas anggota Dewan.[5]

Usulan yang dimotori oleh "kelompok koboi" di atas kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Soetardjo Soerjogoeritno pada tanggal 28 Agustus 2000. Dalam Rapat Paripurna ini terjadi perdebatan yang alot. FKB DPR mengusulkan, oleh karena hak angket adalah penting, maka tidak hanya hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus Bulog, tetapi juga untuk menyelidiki Dana

3 Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit,* (Jakarta: *LP3ES*, 2003), 96.

4 Agus Muhammad, "Gus Dur versus Parlemen: Pertarungan tanpa Aturan Main," dalam Khamami Zada (ed.), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)*,* 177.

5 Ali As'ad, et.al., *Menegakkan Kebenaran Kesaksian Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI tentang Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei* (Jakarta: F-KB DPR RI, t. th.), 5.

Non-Budgeter Bulog. Upaya FKB agar kedua usulan ini digabungkan ditolak oleh kalangan Poros Tengah dan Golkar.[6]

Ketika dilakukan voting untuk memutuskan penggunaan hak untuk melakukan penyelidikan Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei, sebanyak tiga ratus tujuh anggota menerima, tiga orang menolak, dan empat puluh lima orang abstain. Sedangkan dalam memutuskan untuk menggunakan hak penyelidikan atas Dana Yanatera Bulog dan Dana Non-Budgeter Bulog, hanya seratus lima puluh dua anggota menyetujui, seratus enam pulu dua anggota menolak.

Menurut FKB, penolakan terhadap usul yang bertujuan untuk memberantas KKN di Bulog ini dilakukan oleh Fraksi Golkar dan partai-partai yang tergabung dalam Poros Tengah, yaitu PPP, PAN, PK, PBB, dan PDU. Semua anggota fraksi dari kelompok partai ini secara kompak dan bulat menolak.[7]

Sebagai tindak lanjut, DPR kemudian membentuk Pansus Buloggate dan Bruneigate pada tanggal 5 September 2000. Pansus Buloggate dan Bruneigate ini beranggotakan 50 orang dan dikukuhkan dengan Keputusan DPR No. 05/DPR RI/I/2000 tertanggal 15 September 2000 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Pansus Buloggate dan Bruneigate diketuai Bachtiar Chamsyah dari PPP, sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR

6 Ibid., 6.

7 Ibid., 7.

No. 13/PIMP/I/2000-2001 tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPR RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, tanggal 15 September 2000.

Cacat Hukum Pembentukan Pansus Buloggate dan Bruneigate

Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pembentukan Pansus itu adalah illegal karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR. UU No. 6 Tahun 1954 mengharuskan pembentukan Pansus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan dimasukkan dalam Lembaran Negara.

Senada dengan Presiden Gus Dur, FKB melalui Surat No. INT.708/FKB/DPR-RI/I/2001 menyatakan protes keras atas adanya pelanggaran dan penyimpangan Pansus Buloggate dan Brunegate. Dalam protesnya, antara lain FKB menyatakan bahwa Pansus Buloggate dan Brunegate dibentuk pada tanggal 5 September 2000, tapi tidak langsung didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan dimasukkan dalam Lembaran Negara. Pansus baru dicatatkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 30 November 2000. Dengan demikian Pansus telah melanggar UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket, khususnya pasal 2, dan pasal 3. Selain itu, lanjut FKB, Pansus juga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susuduk MPR, DPR, dan DPRD, khususnya pasal 12, pasal 23, pasal 38, dan pasal 89. Di samping itu, Pansus juga melanggar Tata Tertib DPR RI, yaitu pasal 153, pasal 155, pasal 156, dan pasal 157.

DPR sendiri, kendati terlambat mendaftarkan ke Departemen Kehakiman, menganggap bahwa pembentukan Pansus itu sah dan telah sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1999 serta Tata Tertib DPR sendiri.[8]

Selama melaksanakan kerjanya, Pansus selain meminta keterangan dari saksi-saksi maupun saksi ahli, juga meminta keterangan dari Presiden Gus Dur. Karena Presiden Gus Dur tidak mau datang ke DPR untuk memenuhi undangan Pansus, DPR sendiri kemudian menyatakan bersedia menemui Presiden Gus Dur di istana, asal Presiden Gus Dur mau menerima. Gus Dur menyanggupi, tetapi tidak di Istana, melainkan di tempat lain, yaitu *Jakarta Convention Center* (JJC). Pertemuan di JCC itu tidak memperbaiki keadaan, malah memperburuk hubungan antara Presiden dengan DPR.

Gus Dur tidak mau menjawab pertanyaan DPR seputar Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Dia justru mempertanyakan status forum itu dengan nada marah, "Saya ingin mendapat penjelasan, apakah forum ini forum politik atau forum hukum?" Dia kemudian meninggalkan ruangan pertemuan tanpa mau mendengarkan penjelasan Pansus sampai selesai.[9]

Keruwetan masalah yang tidak bisa ditembus dengan jalur kompromi itu akhirnya membuahkan Memorandum I untuk Presiden. Setelah bekerja beberapa bulan, Pansus Buloggate dan Bruneigate yang diketuai oleh Bachtiar Chamsyah dari PPP melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Januari 2001.

Dalam rapat ini, FKB DPR *walk-out* dari arena Rapat Paripurna DPR setelah interupsi-interupsi yang dilakukannya di-

8 Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur*, 99.

9 Ibid., 100.

tolak oleh Rapat Paripurna menyangkut keberatan-keberatan atas tata cara dan mekanisme kerja dari Pansus Buloggate dan Bruneigate. Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Januari 2001 itu, Pansus menyatakan bahwa Presiden Gus Dur patut diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Presiden juga dianggap tidak konsisten dalam keterangannya tentang masalah bantuan Sultan Brunei yang menunjukkan bahwa Presiden menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat.[10]

Manuver Politik, Bukan Penegakan Hukum

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. *Pertama*, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Soetardjo Soerjogoeritno pada tanggal 28 Agustus 2000 hanya menyetujui hak angket untuk melakukan penyelidikan atas Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei. Tetapi pada saat yang sama menolak diusulkannya hak angket untuk menyelidiki Dana Yanatera Bulog dan Dana Non-Budgeter Bulog yang berdasarkan laporan BPK mencapai Rp 2,86 trilyunan,[11] padahal sama-sama merupakan agenda Rapat Paripurna.

Dari sini, terlihat bahwa DPR yang hanya menyetujui hak untuk penyelidikan atas kasus yang dikaitkan dengan Presiden Gus Dur jelas sebagai bentuk kekecewaan DPR terhadap kebijakan Presiden Gus Dur sebelumnya. Dengan kata lain, ini merupakan manuver politik, bukan masalah penegakan hukum.

Kedua, Presiden Gus Dur sudah mengatakan kepada DPR jika dirinya dikaitkan dengan kasus Buloggate dan Bruneigate

10 Paulus Januar, et. al. (eds.), *Memorandum II: Krisis Sebuah Demokrasi Minimalis* (Jakarta: Institut Aspirasi Publik (INSPIRASI), 2001), 23.

11 *Kompas*, 19 Juni 2000.

seharusnya diselesaikan di muka pengadilan dan bukan di muka forum Pansus yang sangat politis. Perlu diketahui bahwa Sapuan dan Suwondo sendiri kemudian diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan aksi pembobolan.[12] Fakta hukum ini mempertegas bahwa Presiden Gus Dur sama sekali tidak terkait apalagi terlibat secara hukum dalam kasus kasus Buloggate dan Bruneigate.

Motif politis ini dikatakan secara blak-blakan oleh Ade Komaruddin. Ia menyatakan, sebelum kasus Buloggate dan Bruneigate, berbagai manuver lintas belum mengarah pada upaya pelengseran Presiden Gus Dur. "Kami muncul pikiran seperti itu setelah Bulog. Sebelum itu, tidak ada karena ini benar-benar keterlaluan. Jadi, beliau harus berhenti."[13]

Keluarnya Memorandum DPR

Atas laporan Pansus Buloggate dan Bruneigate, DPR pada tanggal 1 Februari 2001 memutuskan menyetujui dan menerima laporan hasil kerja Pansus Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yanantera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dengan tindak lanjut:

> *Berdasarkan Tap. MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7, DPR menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:*

12 Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur*, 96.

13 Wawancara penulis dengan Ade Komaruddin, Wakil Bendahara F-PG DPR di era pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, 30 Juni 2003.

Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan

Melanggar Tap. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; dan

Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[14]

Menyikapi adanya memorandum I DPR yang diberikan kepadanya, Presiden Gus Dur memberikan jawaban pada tanggal 29 Maret 2001 dalam Sidang Paripurna DPR. Jawaban Presiden Gus Dur atas Memorandum I DPR dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Baharuddin Lopa.

Kesediaan Menteri Kehakiman dan HAM Baharuddin Lopa untuk membacakan jawaban Presiden Gus Dur—yang merupakan atasannya—terhadap Memorandum I DPR, dalam pandangan Mahfud MD, disebabkan oleh dorongan hatinya untuk bersikap jujur meskipun harus menentang arus. Menurut Lopa, belum ada bukti bahwa Gus Dur melakukan kesalahan, tetapi DPR dan partai-partai politik yang kecewa kepadanya telah menghakiminya secara kasar. Seharusnya, menurut Lopa, kesalahan Presiden Gus Dur itu dibuktikan melalui pengadilan.[15]

Dalam jawaban yang dibacakan Baharuddin Lopa itu, Presiden pada prinsipnya menolak dan menyatakan tidak dapat menerima Memorandum I DPR karena mengandung hal-hal yang tidak objektif berdasarkan ukuran-ukuran

14 Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Ke-36, tanggal, 1 Februari 2001.

15 Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur,* 149.

keadilan, serta tidak memenuhi alasan konstitusional.[16]

Setelah mendengarkan jawaban dari Presiden yang dibacakan oleh pembantunya, Menteri Kehakiman dan HAM, DPR dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Maret 2001 mengeluarkan Memorandum II DPR kepada Presiden Gus Dur. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-53, tanggal 30 April 2001, dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Respon Presiden Gus Dur atas Memorandum DPR RI dan Pengambilan Keputusan atas Proses Memorandum DPR RI, memutuskan:

> *Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam waktu tiga bulan tidak memerhatikan Memorandum DPR RI yang disampaikan tanggal 1 Februari 2001.*
>
> *Menyampaikan Memorandum yang kedua kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Tap. MPR No. III/MPR/1978 sebagai kelanjutan dari Memorandum DPR RI tanggal 1 Februari 2001 yang menganggap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan; Melanggar Tap. MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*
>
> *Memberikan waktu satu bulan kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk mengindahkan Memorandum sebagaimana dimaksud dalam butir dua.*[17]

16 Januar (ed.), et.al., *Memorandum II*, 22.

17 Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Ke-53, tanggal, 30 April 2001 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Respon Presiden Gus Dur atas Memorandum DPR RI dan Pengambilan Keputusan atas Proses Memorandum DPR RI.

Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 April 2001 itu kemudian ditetapkan dengan Keputusan DPR RI No. 47/ DPR RI/IV/2000-2001 tertanggal 30 April 2001 tentang Penetapan Memorandum Yang Kedua DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Dan selanjutnya disampaikan oleh Ketua DPR kepada Presiden Gus Dur melalui Surat No. KD.02/2021/DPR RI/2001 perihal Penyampaian hasil Rapat paripurna DPR RI Ke-53 tanggal 30 April 2001, tertanggal 1 Mei 2001.

Presiden Gus Dur dengan suratnya kepada Pimpinan DPR RI perihal Respon atas Memorandum II tertanggal 29 Mei 2001 menyampaikan bahwa Presiden Gus Dur merasa tidak perlu menjawab Memorandum II dikarenakan dua hal. *Pertama*, Memorandum II tidak menyebutkan secara konkret pelanggaran sumpah jabatan yang mana dan ketidakbersihan dari KKN yang seperti apa yang telah Presiden lakukan sebagai pelanggaran. *Kedua*, jika Memorandum II itu dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Memorandum I yang masalah pokoknya adalah kasus Bulog dan Brunei, maka Presiden telah menjawabnya secara tuntas namun tidak lagi dibanding (dipersoalkan) di dalam Memorandum II yang dikeluarkan oleh DPR.

Dalam suratnya, Presiden Gus Dur menyertakan laporan kemajuan pelaksanaan tugas pemerintah yang telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh Menko Perekonomian melalui pidato secara terbuka masing-masing tanggal 27 dan tanggal 28 Mei 2001.

Sehari sebelumnya, pada tanggal 28 Mei 2001, Jaksa Agung RI mengirimkan surat balasan kepada Ketua DPR dengan nomor: R.268/A/F/05/2001 Perihal Hasil Penyelidikan

Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam. Dalam suratnya itu, Jaksa Agung, antara lain, menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan cukup alat bukti yang mengindikasikan Presiden Gus Dur dapat diproses lebih jauh secara hukum dalam kasus Dana Yanatera Bulog sebesar Rp35 Miliar dengan alasan alat bukti yang mendukung ke arah itu hanya keterangan Roesdihardjo yang menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya *(unus testis nullus testis)*."

Dalam kasus Bantuan Sultan Brunei Darussalam, Jaksa Agung menyatakan dalam suratnya bahwa sampai saat ini tidak ditemukan cukup alat bukti yang mengindikasikan Presiden Gus Dur dapat diproses lebih jauh secara hukum dalam kasus apa yang disebut sebagai dana bantuan Sultan Brunei Darussalam dengan alasan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian dana tersebut.

Usulan Sidang Istimewa MPR

Adanya laporan kemajuan pelaksanaan tugas pemerintah serta adanya surat resmi dari Jaksa Agung yang menyatakan tidak ditemukan indikasi Presiden Gus Dur dapat diproses lebih jauh secara hukum dalam kedua kasus yang menjadi dasar awal terbentuknya Pansus dan adanya Memorandum DPR itu, tidak memengaruhi apalagi membendung DPR untuk melangkah menindaklanjuti Memorandum II DPR. DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-62 tanggal 30 Mei 2001 dengan agenda acara Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan

Keputusan terhadap Proses Memorandum II DPR RI kepada Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid memutuskan bahwa DPR RI menyatakan Presiden Gus Dur tidak mengindahkan Memorandum II DPR RI. Sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Tap. MPR RI No. III/MPR/1978, DPR RI meminta MPR RI mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. [18]

Sebagaimana dalam Rapat Paripurna DPR tanggal tanggal 29 Januari 2001 saat agenda laporan hasil kerja Pansus Buloggate dan Bruneigate, pada Rapat Paripurna DPR tanggal 30 Mei 2001 ini, FKB DPR juga melakukan *walk-out* dari arena rapat.

Keputusan Rapat Paripurna DPR selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPR RI No. 51/DPR RI/IV/2000-2001 tertanggal 30 Mei 2001. Keputusan Rapat Paripurna Dewan ini oleh Ketua DPR, Akbar Tanjung, kemudian disampaikan kepada Ketua MPR RI dengan Suratnya Nomor: KD/02/2601/DPR RI/2001 Perihal Penyampaian hasil Rapat Paripurna DPR RI Ke-62 tanggal 30 Mei 2001, tertanggal 30 Mei 2001.

Sehari berikutnya, Pimpinan MPR melakukan rapat dan memutuskan bahwa Badan Pekerja MPR akan menyelenggarakan rapat mulai tanggal 1 Juni 2001 untuk mempersiapkan bahan SI MPR. Di samping itu, pertemuan Pimpinan MPR juga menyepakati pelaksanaan SI MPR pada tanggal 1 Agustus 2001.

---

18 Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Ke-62 tanggal 30 Mei 2001 dengan agenda acara Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Proses Memorandum II DPR RI kepada Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid.

Penonaktifan Kapolri Surojo Bimantoro dan Pelantikan Wakapolri Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Kapolri

Salah satu kebijakan Presiden Gus Dur yang mengundang reaksi negatif dari para politisi di Senayan adalah penonaktifan Kapolri Jenderal Polisi Surojo Bimantoro. Dengan kebijakan ini, Presiden Gus Dur bisa dikatakan menciptakan *front* pertempuran baru. Tidak hanya dengan Parlemen yang memang belakangan sering menjadi seteru politiknya, tapi juga dengan salah satu poros pertahanan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Segera setelah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/Polri/2000 yang berisi pengangkatan Komisaris Jenderal (Pol) Chaeruddin Ismail sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) dan menjadi Pelaksana Tugas Kapolri, dan Keppres Nomor 41/Polri/2001 yang berisi penonaktifan Kapolri Komisaris Jenderal (Pol) S. Bimantoro pada Sabtu, tanggal 2 Juni 2001, polemik baru muncul ke permukaan.

Langkah Presiden ini dinilai tidak sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indoneisia. Pasal 7 ayat 3 Tap VII/MPR Tahun 2000 menyatakan, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR*." Dalam kasus Bimantoro, kalangan Dewan menyatakan, Tap. MPR No VII/MPR/2000 telah berlaku efektif meskipun undang-undang (UU) tentang Polri kini masih dalam proses pembahasan DPR dan pemerintah.

Sikap DPR ini berbeda dengan kasus penahanan Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua MPR, oleh Kejaksaan Agung. Meskipun Tap. MPR No VII/MPR/2000 menyatakan bahwa dalam kasus pidana sipil, termasuk korupsi, anggota TNI/Polri tunduk kepada hukum sipil, namun, kalangan DPR menilai UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih berlaku. Jelas materi UU No 31 Tahun 1997 tidak sejalan dengan Tap. MPR No VII/MPR/2000, sebab anggota TNI/Polri yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tetap akan diadili di peradilan militer. Namun demikian, kalangan DPR mengabaikan ketentuan Tap. MPR No VII/MPR/2000 dan meminta dalam kasus Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua MPR, agar ditangani oleh peradilan militer, bukan Kejaksaan Agung.

Keputusan Presiden, dianggap problematik berdasarkan dua hal. *Pertama,* penonaktifan Bimantoro sebagai Kapolri dan pengangkatan Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri dinilai sebagai *trick* Presiden menyiasati Tap. MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyebut perihal pengangkatan atau pemberhentian Kapolri harus melalui persetujuan DPR—dan ini pernah diperkarakan DPR dalam kasus pemberhentian Roesdihardjo. Karena itu, presiden memilih cara penonaktifan, bukan pemberhentian.

Keppres ini pada urutannya akan diubah dan digantikan dengan Keppres Nomor 49/Polri/2001 yang tidak hanya menonaktifkan, melainkan memberhentikan Kapolri dari jabatannya. Tindakan ini pada gilirannya akan mendapat reaksi keras dari DPR yang menganggap Presiden telah melanggar Tap MPR. Reaksi ini akhirnya menjadi salah satu sebab percepatan SI MPR dilakukan.

Kedua, pengadaan jabatan Wakapolri dianggap ganjil, sebab berlawanan dengan keputusan yang telah dibuat sendiri oleh Presiden. Kurang lebih sebulan sebelum mengadakan jabatan Wakapolri untuk Chaeruddin Ismail, Presiden telah mengeluarkan Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 April 2001. Pasal 5 Keppres itu menyatakan bahwa Mabes Polri terdiri dari: (a) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Sekretariat Jenderal; (c) Inspektorat Jenderal; (d) Deputi Operasional; (e) Deputi Sumber Daya Manusia; (f) Deputi Logistik; (g) Deputi Pendidikan dan Pelatihan; (h) Unit Organisasi Lainnya.

Dalam Keppres itu, jelas tidak ada jabatan Wakapolri. Jabatan Wakapolri justru telah dihapuskan melalui Keppres tersebut. Kekhilafan ini tampaknya disadari Presiden yang kemudian mengeluarkan Keppres Nomor 77 Tahun 2001 yang secara hukum mengubah Keppres No. 54 Tahun 2001 pada beberapa pasal tertentu meski tidak menghapus seluruhnya.

Dalam Keppres No. 77 Tahun 2001 tentang Perubahaan Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, jabatan Wakil Kepala Polri dihidupkan kembali dalam organisasi dan tata kerja Polri. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2001. Ketentuan inilah yang oleh beberapa kalangan dianggap problematik. [19] Pada

19 Keberadaan Keppres Nomor 77 tahun 2001 yang dimintakan hak uji materialnya kepada MA oleh Persatuan Purnawirawan Polri pada akhirnya diputuskan Mahkamah Agung agar dicabut Presiden. MA menilai, Keppres yang menghidupkan kembali jabatan Wakil Ketua Polri dikeluarkan dengan menyimpang dari prinsip pemerintahan yang baik. Keppres itu hanya sekadar untuk melegitimasi kepentingan

akhirnya, Keppres ini dianggap diterbitkan semata sebagai alat pembenaran bagi tindakan Presiden. [20]

Penonaktifan Bimantoro tergolong mendadak dan unik. Biasanya, Presiden terlebih dahulu melontarkan pernyataan kepada publik keinginannya untuk mencopot atau meminta pengunduran diri seorang pejabat yang dipimpinnya. Dalam kasus Wiranto, misalnya, Presiden berulang kali meminta agar Menko Polkam Wiranto mengundurkan diri. Publik menilai bahwa Wiranto diminta nonaktif sebab ia tengah diperiksa dengan status saksi dalam kasus pelanggaran pasca-jajak pendapat HAM di Timtim.

Menurut keterangan Jubir Presiden, Yahya C. Staquf, penonaktifan Bimantoro dari jabatannya antara lain karena yang bersangkutan telah masuk ke dunia permainan politik serta melakukan upaya mengadu domba antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati.[21] Sementara, menurut Khofifah Indar Parawansa, Presiden Abdurrahman Wahid kecewa dengan kinerja Bimantoro. Salah satunya, diceritakan Khofifah, Gus Dur kesal dengan tidak adanya kemauan sungguh-sungguh dari Polri untuk menangkap Tommy Soeharto. Di Rapat Kabinet, Gus Dur telah menyinggung,

---

Presiden, bukan untuk kepentingan institusi Polri. Selain mengajukan permohonan judicial review atas Keppres No 77/2001, Persatuan Purnawirawan Polri juga meminta hak uji material atas Keppres Nomor 40/Polri/2001, Keppres Nomor 41/Polri/2001 dan Keppres Nomor 49/Polri/2001. Namun, permohonan ini ditolak MA karena bersifat pribadi, final dan konkret, yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Lihat *Kompas*, 1 Agustus 2001 dan http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=3334, 31 Juli 2001, diakses pada 8 Mei 2003.

20 Lihat Taufiequrachman Ruki, "Problematika Wakil Kepala Polri," *Kompas*, 9 Juli 2001.

21 *Kompas*, 5 Juni 2001.

bahwa seharusnya Kapolri tanggap terhadap hal itu. Gus Dur sampai menyebut alamat dan tempat persembunyian Tommy yang sebenarnya juga telah diketahui oleh Kapolri. Kata Khofifah menirukan Gus Dur, "*Wong* jelas Tommy ada di situ *kok* masih enggak mau *nangkep.*" [22]

Gus Dur juga kecewa dengan cara kepolisian menangani para demonstran. "Demo yang mendukung Gus Dur *dipukulin*, sementara yang anti-Gus Dur dibiarkan," lanjut Khofifah. Fenomena ini, menurut Khoiffah terjadi di banyak tempat, di Malang, di Pasuruan, dan sebagainya. "Bukan berarti yang membela Gus Dur harus di-*back up* sebab Gus Dur Presiden, tetapi bahwa seandainya tidak melakukan pelanggaran, mestinya juga mendapat perlakuan yang sama," demikian dikatakan Khofifah. [23]

Menurut Wakil Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munir (alm.), alasan pencopotan Bimantoro telah sangat kuat. Bimantoro, menurut Munir, telah melakukan "tindakan militerisme" terhadap kepolisian. Bimantoro telah membekali polisi dengan senjata AK-47. Menurut Munir, anggota polisi di belahan dunia manapun tidak ada yang memakai senjata AK-47. Senjata AK-47 adalah senjata tempur pembunuh yang paling ampuh dan andal. Senjata ini mudah digunakan dan tahan terhadap cuaca serta air. Munir juga menyebutkan, Bimantoro sengaja menciptakan situasi konflik antara DPR dan Presiden. Bimantoro bahkan dinilai Munir pasang badan dengan memanfaatkan

22 Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Pemberdayaan Wanita Era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, 2 Juli 2003.

23 Ibid.

momentum upaya pelengseran dirinya dari Kepala Polri. [24]

Keputusan Presiden untuk menonaktifkan Kapolri Surojo Bimantoro dan melantik Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri yang menjalankan tugas Kapolri mendapat protes dari berbagai kalangan. Pada Minggu, 3 Juni 2001, sekitar seratus dua perwira tinggi dan menengah polisi berhimpun menyatakan protes yang pada intinya menolak polisi dijadikan sebagai alat kekuasaan dan politik.[25] Pernyataan sikap para perwira ini dibacakan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Irjen Sofjan Jacoeb, dalam sebuah upacara singkat di Ruang Yudha Markas Besar Polri usai pelantikan sembilan puluh dua perwira tinggi dan menengah untuk mengisi struktur Polri yang baru.[26]

Kepala Polri yang dinonaktifkan, Jenderal Polisi S. Bimantoro, sendiri tidak tinggal diam. Pada 3 Juni 2001, dia mengadakan pertemuan dengan delapan Pimpinan Fraksi DPR di Hotel Dharmawangsa. Kesimpulan dari pertemuan itu adalah bahwa Pimpinan Fraksi DPR tetap menganggap Bimantoro sebagai Kepala Polri. Kedelapan pimpinan fraksi DPR yang hadir ialah Arifin Panigoro (PDI Perjuangan), Syamsul Muarif (Partai Golkar), Ali Marwan Hanan (PPP), Hatta Radjasa (Reformasi), Achmad Sumargono (PBB), Mudahan Hazdi (PDU), Sutradara Gintings (KKI), dan P.L. Tobing (TNI/Polri). [27]

Pada tanggal 4 Juni 2001, para mantan Kepala Polri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri juga mengeluarkan pernyataan yang berisi menolak penonaktifan Biman-

24 *Kompas*, 12 Juli 2001.

25 *Kompas*, 10 Juni 2001.

26 *Kompas*, 5 Juni 2001.

27 Ibid.

toro sebagai Kepala Polri. Pernyataan dukungan dan sikap purnawirawan Polri tersebut dibacakan Awaloeddin Djamin (Kepala Polri 1978-1982), disaksikan Roesmanhadi (Kepala Polri 1998-1999), Moch Sanoesi (Kepala Polri 1986-1991), M. Hasan (Kepala Polri 1971-1978), Made Sugiarta (mantan Kepala Sespim), Taufik Effendi (Sekjen PP Polri Pusat) dan beberapa anggota PP Polri lainnya. [28]

Pada hari yang sama, Senin, 4 Juni 2001, Juru Bicara Kepresidenan, Adhie Massardi, menanggapi berita *Kompas* yang mengatakan Presiden telah menyeret Polri jadi alat kekuasaan. Adhie menjelaskan, di dunia ini hanya ada tiga sistem kepolisian, yakni bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Presiden, dan Menteri Kehakiman. "Jadi, tidak ada sistem yang membuat Polri bertanggung jawab kepada parlemen," ujar Adhie. Menurut Adhie, saat ini, ada yang berusaha menyeret Polri masuk dalam dunia rekayasa politik dan diadu dengan Presiden. Bertemunya Jenderal Bimantoro dengan beberapa elite politik setelah dinonaktifkan, kata Adhie, memperjelas indikasi bahwa Polri hendak diseret ke rekayasa politik. [29]

Rodjil Ghufron, mantan anggota Komisi II DPR RI pada masa pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, menanggapi adanya pertemuan Jenderal Polisi S. Bimantoro dengan delapan Pimpinan Fraksi DPR di Hotel Dharmawangsa pada tanggal 3 Juni 2001. Dia mengatakan bahwa kalau dilihat dari lokasi pertemuan, forum itu jelas di luar institusi. Karena itu, aksi politik mereka adalah inkonstitusional. Hal itu menunjukkan bahwa forum itu memang *politicking*.

28 Ibid.

29 Ibid.

Rodjil juga menilai, apa yang dilakukan Fraksi-fraksi di DPR dengan menggalang dukungan untuk menolak keputusan penonaktifan Bimantoro dan pengakuan mereka atas status Bimantoro tetap sebagai Kapolri merupakan tindakan Parlemen mengintervensi hak-hak prerogratif Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Sistem Presidensil, menurut Rodjil, "Begitu diberhentikan oleh Presiden, ya selesai, Parlemen tidak boleh ikut campur." Rodjil menilai, apa yang dilakukan sebagian anggota Dewan itu merupakan bukti bahwa mereka memberlakukan Sistem Parlementer dalam tata penyelenggaraan negara. Jelas, ini menyalahi konstitusi sebab Indonesia, menurut UUD 1945, menganut Sistem Presidensiel.[30]

Pada Selasa, 5 Juni 2001, Fraksi-fraksi DPR mengadakan Rapat Pimpinan dengan Pimpinan DPR. "Sejumlah sembilan Fraksi DPR berpendapat bahwa Kapolri saat ini adalah Jenderal (Pol) S. Bimantoro, berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2000," demikian dikatakan Ketua DPR Akbar Tanjung. [31]

Selanjutnya, pada Rabu, 6 Juni 2001, Bimantoro mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) berlangsung panas. Bahkan, salah seorang anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, menyatakan *walk out* dari ruangan karena menolak kehadiran Bimantoro. Namun, Komisi I tetap mengakui Bimantoro sebagai Kapolri.[32]

---

30 Wawancara penulis dengan Rodjil Ghufron, anggota F-KB DPR RI pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, 28 Juni 2003.

31 *Panji Masyarakat*, 13 Juni 2001, 56.

32 http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=2842, 6 Juni 2001, diakses pada 8 Mei 2003.

Dalam Rapat itu, Bimantoro menjelaskan panjang lebar mengenai kemelut di tubuh Polri sebagai dampak keputusan Presiden menunjuk dan mengangkat Chaeruddin sebagai Wakapolri yang menjalankan tugas sehari-hari sebagai Kepala Polri. Ia juga menegaskan bahwa tindakan para jenderal polisi mengikrarkan sikap dukungan terhadap dirinya adalah karena ingin menegakkan mekanisme konstitusional, bukan tindakan pembangkangan.[33] Pada dasarnya, seperti dilansir Ketua MPR Amien Rais, Bimantoro dapat menerima penonaktifan dan penggantian dirinya secara l*egowo*. Akan tetapi, yang diminta Bimantoro, penggantian itu harus dilakukan secara prosedural, yakni mengacu kepada Ketetapan MPR.[34]

Polemik mengenai penonaktifan Bimantoro semakin membesar saat Presiden Gus Dur memutuskan untuk memberhentikan Jenderal S. Bimantoro –yang sudah dinyatakan nonaktif dengan Keppres No. 41/Polri/2001 sejak 2 Juni 2001— dari jabatan Kapolri melalui Keppres Nomor 49/Polri/2001 pada tanggal 30 Juni 2001.[35] Selanjutnya, Presiden Gus Dur menawarkan posisi Duta Besar Malaysia kepada Jenderal Bimantoro. Tawaran ini disampaikan Gus Dur pada saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-55 Bhayangkara di lapangan Bhayangkara, Markas Besar Polri di Jakarta, pada Minggu, 1 Juli 2001. Pada kesempatan ini, Gus Dur juga mengatakan bahwa Wakil Kepala Polri Jenderal Chaeruddin Ismail akan menjalankan tugas Kapolri untuk sementara sebelum Kapolri ditetapkan.[36] Namun, tawaran itu ditolak oleh Bimantoro.[37]

33 *Kompas*, 10 Juni 2001.

34 *Kompas*, 7 Juni 2001.

35 *Kompas*, 3 Juli 2001.

36 *Kompas*, 2 Juli 2001.

37 Ibid.

Percepatan Sidang Istimewa MPR

Keputusan Presiden Gus Dur memberhentikan Kepala Polri (non-aktif) Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro dan menempatkannya sebagai Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia memancing protes dari tujuh Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuh dari sepuluh Pimpinan Fraksi DPR dalam jumpa pers di Jakarta memprotes keberadaan Keppres Nomor 49/Polri/2001 mengenai pemberhentian Kepala Polri (non-aktif) Jenderal (Pol) Bimantoro, serta pengumuman pengangkatannya sebagai Duta Besar di Malaysia. Protes ditandatangani tujuh Pimpinan Fraksi setelah mengadakan pertemuan selama setengah jam di ruangan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Hadir bersama Soetardjo ialah Wakil Ketua DPR AM Fatwa. Ketujuh fraksi DPR itu adalah PDI Perjuangan diwakili Arifin Panigoro, Partai Golkar diwakili Syamsul Muarif, PPP diwakili Ali Marwan Hanan, Fraksi Reformasi diwakili Hatta Radjasa, PDU diwakili Mudahan Hadzi, PBB diwakili Mawardi Abdullah, dan KKI diwakili Sutradara Gintings.[38]

Menurut tujuh Fraksi di DPR itu, Keputusan Presiden dalam mengeluarkan Keppres Nomor 49/Polri/2001 mengenai pemberhentian Kapolri (non-aktif) Jenderal (Pol) S. Bimantoro merupakan pelanggaran ketiga yang dilakukan Presiden terhadap keberadaan Tap. MPR No VII/MPR/2000. Pelanggaran pertama adalah saat memberhentikan Roesdihardjo dan mengangkat Bimantoro sebagai Kepala Polri. Pelanggaran kedua adalah menonaktifkan Bimantoro.[39]

38 Ibid.

39 Ibid.

Tujuh Fraksi, sebagaimana disampaikan Ali Marwan Hanan, menganggap kebijakan dan tindakan Presiden merupakan pelanggaran terhadap haluan negara secara berulang yang dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan negara. Untuk mencegah berulangnya hal yang berkaitan dengan pelanggaran haluan negara yang telah beberapa kali terjadi, serta dalam rangka penyelamatan bangsa dan negara, tujuh Fraksi, menurut Ali Marwan, akan menyampaikan pertimbangan kepada MPR untuk sesegera mungkin melakukan SI MPR. "Kami mendesak Pimpinan DPR untuk memproses tindak lanjut secara institusional," kata Ali Marwan. [40]

Presiden Gus Dur menanggapi dengan enteng tuduhan tujuh Pimpinan fraksi DPR yang menilai dirinya telah melanggar haluan Negara dengan menyatakan. "Itu kan pendapat mereka, pendapat saya lain," katanya saat menjawab pertanyaan wartawan ketika hendak meninggalkan Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2001. [41]

Perihal penunjukan Bimantoro sebagai Dubes RI untuk Malaysia, menurut Akbar Tanjung, juga menyimpan masalah karena belum memenuhi prosedur. Menurut Akbar, perubahan pertama UUD 1945 mengharuskan penempatan seseorang untuk menjadi duta besar dibicarakan dengan DPR. Akbar berencana meminta Komisi I memeriksa sejauh mana pemerintah telah melaksanakan aturan-aturan secara prosedural tentang hal tersebut. Ketua MPR, Amien Rais, juga menilai bahwa tindakan Presiden "mendubeskan" Bimantoro sebagai salah langkah dan menyalahi konstitusi.[42]

40 Ibid.

41 *Kompas*, 4 Juli 2001.

42 *Kompas*, 3 Juli 2001.

Dalam jumpa pers sesaat usai bertemu Bimantoro, Komisi I DPR, pada Selasa, 3 Juni 2001, tetap menghendaki penggantian Kepala Polri (nonaktif) Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro dilakukan sesuai proses konstitusi dan sesuai Ketetapan (Tap) MPR Nomor VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, yang dalam salah satu pasalnya mensyaratkan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Polri harus atas persetujuan DPR. "Sebelum proses itu dilaksanakan, Komisi I DPR tetap mengakui Pak Bimantoro sebagai Kepala Polri," kata Ketua Komisi I Yasril Ananta Baharuddin. Mendampingi Yasril, hadir pula Wakil Ketua Komisi I RK Sembiring Meliala dan Kepala Badan Humas Polri Irjen Didi Widayadi.[43]

Menanggapi permintaan tujuh Pimpinan Fraksi di DPR kepada Pimpinan DPR agar diadakan percepatan SI MPR yang semula telah dijadwalkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Pimpinan DPR melaksanakan Rapat Pimpinan di Hotel Mulia pada Senin, 3 Juli 2001, malam. Rapat Pimpinan DPR ini menyepakati membawa usulan ini kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk ditentukan apakah dilanjutkan ke Paripurna DPR atau tidak. [44]

Selanjutnya, usulan ini dibahas di Bamus pada Rabu, 4 Juli 2001, yang dipimpin Wakil Ketua DPR AM. Fatwa. Hasil Bamus tidak menyepakati usulan dari tujuh Fraksi di DPR untuk dibawa ke Paripurna. Bamus hanya menyepakati mengirim surat kepada Presiden agar mengindahkan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri sesuai Tap. MPR No. VII/MPR/2000.[45] Hasil Bamus ini kemudian ditindaklanjuti

43 *Kompas*, 4 Juli 2001.

44 *Kompas*, 5 Juli 2001.

45 Ibid.

oleh Pimpinan DPR dengan melayangkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden bernomor KD.02/3461/DPR RI/2001 tanggal 5 Juli 2001.

Selain itu, Bamus sepakat menyampaikan kepada Pimpinan DPR agar surat permintaan tujuh Fraksi diteruskan kepada Pimpinan MPR untuk ditindaklanjuti.[46] Kesepakatan Bamus ini ditindaklanjuti dengan surat Ketua DPR RI kepada Ketua MPR Nomor KD.02/3462/DPR RI/2001 tanggal 5 Juli 2001.

Adanya surat dari Ketua DPR kepada Ketua MPR ini direspon dengan adanya pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi di MPR pada tanggal 6 Juli 2001 pada pukul 20.00 WIB. Pertemuan ini merekomendasikan agar Pimpinan MPR mengundang anggota Badan Pekerja (BP) MPR untuk mengadakan rapat BP MPR dengan agenda mendengarkan pendapat Fraksi MPR terhadap usulan percepatan penyelenggaraan SI MPR.

Rapat BP MPR dengan Surat Keputusan BP MPR No. 3/BP/2001 tentang Saran BP MPR kepada Pimpinan MPR RI tanggal 9 Juli 2001, merekomendasikan kepada Pimpinan MPR bahwa penyelenggaraan SI MPR dimulai tanggal 1 Agustus 2001. Sekalipun demikian, apabila terjadi perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk yang mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan dan tindakan Presiden, BP MPR menyerukan Pimpinan MPR agar secepatnya mengundang anggota MPR untuk melaksanakan Rapat Paripurna MPR RI dalam rangka SI MPR.

46 *Kompas*, 5 Juli 2001.

Menjawab surat dari BP MPR, maka Ketua MPR melayangkan Surat Pimpinan MPR No. MJ.950/65/2001, tertanggal 11 Juli 2001, perihal Undangan SI MPR 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001 dan kemungkinan mengundang anggota MPR untuk Rapat Paripurna MPR sewaktu-waktu.

Adanya percepatan SI MPR ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR Sabtu, 21 Juli 2001, yang diselenggarakan secara mendadak berkaitan dengan adanya kebijakan Presiden Gus Dur melantik Wakapolri Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Kepala Polri, pada Jum'at, 20 Juli 2001. Sebenarnya, SI berdasarkan hasi rancangan yang disiapkan Panitia Ad Hoc (PAH) Khusus, baru akan digelar pada 1 Agustus 2001. "Namun karena melihat kondisi yang semakin memburuk maka tidak ada salahnya SI dipercepat," ungkap Amien. Sedangkan F-KB MPR menanggapi rencana percepatan SI mengatakan, "Percepatan SI itu barang haram dan kita akan melakukan perlawanan terhadap segala putusan yang dikeluarkan SI tersebut termaksud mengangkat presiden baru." [47]

Dekrit Presiden sebagai Perlawanan Politik

Menghadapi manuver politik para politisi di Senayan, akhirnya Presiden Gus Dur memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden. Pada Senin 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB, Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi tiga poin. *Pertama*, membekukan DPR-MPR. *Kedua*, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan

47 http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=3238, 21 Juli 2001, diakses pada 8 Mei 2003.

serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan *ketiga*, menyelamatkan gerakan Reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

"Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa," kata Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf yang tugaskan Presiden Gus Dur membacakan isi Dekrit Presiden.[48]

Langkah yang ditempuh Presiden Gus Dur, sebagaimana dijelaskan mantan Juru Bicara Kepresidenan, Adhie Massardi, adalah untuk mencegah pelaksanaan Sidang Istimewa yang dianggap tidak sejalan dengan cita-cita Reformasi. "Untuk menyetop (Sidang Istimewa) itu kemudian dikeluarkanlah Dekrit, begitu Dekrit dikeluarkan alasan Sidang Istimewa diganti karena Gus Dur mengeluarkan Dekrit berubah tiba-tiba alasannya (Sidang Istimewa) diganti," papar Adhie.[49]

Pada akhirnya, Sidang Istimewa MPR 2001 dipercepat mulai pada Senin, 23 Juli 2001. Sidang istimewa ini akhirnya memutuskan memakzulkan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden.

---

48 https://www.liputan6.com/news/read/4019189/23-juli-2001-dekret-presiden-perlawanan-parlemen-dan-celana-pendek-gus-dur, 23 Juli 2019, diakses pada 31 Januari 2020.

49 https://nasional.okezone.com/read/2018/07/23/337/1925953/gus-dur-sudah-ingin-dilengserkan-meski-dekrit-belum-dikeluarkan?page=2, 23 Juli 2018, diakses pada 31 Januari 2020.

Menurut Alissa Wahid, Gus Dur awalnya bertekad tetap bertahan di Istana sebagai bentuk memperjuangkan kebenaran. Karena SI MPR yang menjatuhkan dirinya ditempuh secara inkonstitusional. Namun demikian, pemakzulan Gus Dur ini membuat para pendukungnya marah. Terutama para santri NU dan simpatisan Gus Dur khususnya dari Jawa Timur. Mereka mengepung Istana Presiden dan Gedung DPR-MPR di Jakarta. Keadaan seperti itu membuat sikap Gus Dur berubah. Sebab, Gus Dur tidak ingin ada korban di antara sesama warga masyarakat. [50]

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas sudah sangat jelas bahwasannya pemakzulan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden merupakan soal politis, bukan yuridis. Pemakzulan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah ulah dari anasir-anasir kekuatan Orde Baru yang tidak menginginkan adanya Reformasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Anasi-anasir Orde Baru ini bersekutu dengan para politisi baru yang bertopeng reformasi, tapi sebetulnya mabok kekuasaan. Di mata kelompok ini, Gus Dur adalah kepentingan ekonomi politik mereka.

Raison d'etre-nya Memorandum DPR berawal dari laporan Pansus Buloggate dan Bruneigate kepada DPR yang melaporkan dugaan keterlibatan Presiden Gus Dur dalam dua kasus tersebut. Memorandum I DPR maupun Memorandum II DPR menyatakan bahwa Presiden Gus Dur sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan melanggar Tap. MPR No. XI/

50 https://www.liputan6.com/news/read/4019189/23-juli-2001-dekret-presiden-perlawanan-parlemen-dan-celana-pendek-gus-dur, 23 Juli 2019, diakses pada 31 Januari 2020.

MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Dari sisi teknis prosedural, keabsahan Pansus Buloggate dan Bruneigate sendiri sepenuhnya bisa dipertanyakan. Hal ini karena tidak didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan dimasukkan dalam Lembaran Negara, sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR. Sementara dari sisi substansi hukum, dugaan Gus Dur melanggar hukum seharusnya diserahkan kepada pengadilan, bukan ditentukan oleh pendapat DPR.

Namun dalam kenyataannya, Memorandum I DPR langsung begitu saja dilanjutkan dengan Memorandum II DPR. Tidak ada uji yuridis soal apa yang dituduhkan dalam memorandum I DPR atas Presiden Gus Dur mengenai keterlibatan Gus Dur dalam kasus Buloggate dan kasus Bruneigate. Bahkan, langsung dinaikkan menjadi Sidang Istimewa MPR.

Jika Sidang Istimewa MPR karena penonaktifan dan pemberhentian Jenderal S. Bimantoro, maka digelarnya Sidang Istimewa juga tidak bisa diterima menurut hukum. Dari sudut teori maupun peraturan perundang-undangan, langkah yang dilakukan Presiden Gus Dur juga memiliki landasan hukum. Persoalan keabsahan penonaktifan dan pemberhentian Jenderal S. Bimantoro seharusnya diajukan melalui pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh yang bersangkutan, bukan dengan manuver politik bersama para politisi di Senayan.

Pun, jika alasan percepatan Sidang Istimewa MPR karena penonaktifan dan pemberhentian Jenderal S. Bimantoro, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya dimulai dengan Memorandum I dan Memorandum

II DPR. Faktanya, tidak ada Memorandum DPR mengenai penonaktifan dan pemberhentian Jenderal S. Bimantoro.

Oleh karena itu, Dekrit Presiden yang dikeluarkan Gus Dur harus dipahami dalam konteks perlawanan politik Presiden Gus Dur atas keseluruhan manuver politik yang inkonstitusional yang dilakukan oleh para politisi yang tidak rela dengan konsekuensi Reformasi di Indonesia. Presiden Gus Dur secara tersurat menegaskan kepada rakyat dalam salah satu isi dekrit yang dikeluarkannya, "menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung".

Harus diakui secara jujur, sejarah bangsa ini telah mencatat bahwa pemakzulan Gus Dur bukan karena adanya pelanggaran hokum, namun manuver politik para politisi yang ketakutan kekuasan ekonomi-politiknya akan runtuh, atau tidak mendapat bagian dari kue kekuasaan eknomi-politik yang diincarnya. Sosok Gus Dur yang sepanjang hidupnya memperjuangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan sengaja menghindarkan diri dari perlawanan yang melibatkan konflik dan korban sesama anak bangsa. Ia memang kalah secara politik, tapi tidak ada pelanggaran konstitusi dan hukum yang dilakukannya.

Gus Dur telah mendidik kita bahwa yang terpenting dalam politik adalah kemanusiaan. Jabatan bukan segala-galanya hingga harus dipertahankan dengan darah. Dia telah mengajarkan kemuliaan, kini, kitalah yang harus mengabarkan kebenaran. *Wallahu a'lam!*

Daftar Kepustakaan

As'ad, Ali. et. al. *Menegakkan Kebenaran Kesaksian Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI tentang Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei.* Jakarta: F-KB DPR RI, t. th.

http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=2842. 6 Juni 2001.

http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=3238. 21 Juli 2001.

https://nasional.okezone.com/read/2018/07/23/337/1925953/gus-dur-sudah-ingin-dilengserkan-meski-dekrit-belum-dikeluarkan?page=2. 23 Juli 2018.

https://www.liputan6.com/news/read/4019189/23-juli-2001-dekret-presiden-perlawanan-parlemen-dan-celana-pendek-gus-dur. 23 Juli 2019.

Januar, Paulus (ed.) et.al, *Memorandum II: Krisis Sebuah Demokrasi Minimalis.* Jakarta: Institut Aspirasi Publik (INSPIRASI), 2001.

Kompas. 19 Juni 2000.

Kompas. 5 Juni 2001.

Kompas. 7 Juni 2001.

Kompas. 3 Juli 2001.

Kompas. 4 Juli 2001.

Kompas. 5 Juli 2001.

Kompas. 12 Juli 2001.

Mahfud MD, Moh. *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit.* Jakarta: LP3ES, 2003.

Muhammad, Agus. "Gus Dur versus Parlemen: Pertarungan tanpa Aturan Main". dalam Khamami Zada (ed.). *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan.* Jakarta: LAKPESDAM, 2002.

Panji Masyarakat. 13 Juni 2001.

Ruki, Taufiequrachman. "Problematika Wakil Kepala Polri". dalam *Kompas.* 9 Juli 2001.

Tohadi, *Pergeseran Kekuasaan Antara Lembaga Kepresidenan dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu 1999 Pasa Masa Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid,* Jakarta: Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia, 2003.

Pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid: Kecelakaan Politik Ketatanegaraan

Hufron

Pendahuluan

MEMBICARAKAN pemakzulan presiden adalah isu yang menarik, seksi sekaligus *sensi* dalam sistem politik ketatanegaraan, tidak terkecuali dalam konteks Pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mengapa? Karena, kalau kita meminjam istilah Jody C Baumgartner and Naoko Kada, dalam buku berjudul *Checking Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Perspective*, pemberhentian presiden dalam masa jabatan (*impeachment, pemakzulan*) merupakan gempa bumi politik (*the political earthquake*) bagi seorang kepala negara atau pemerintah suatu negera.

Sedikit perlu disampaikan, istilah ”pemakzulan”, berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar ”*azala*”, yang memiliki dua arti yaitu (1) *isolate, set apart, separate, segregate, seclude*, yang berarti mengasingkan diri atau melepaskan diri, dan (2)

dismiss, discharge, recall, remove from office, yang berarti pemberhentian dari jabatan. Kemudian, kata "*azala*" berubah menjadi kata kerja pasif yaitu "makzul", yang berarti diasingkan/dilepaskan. Bila dikaitkan dengan suatu jabatan, maka dimakzulkan dari jabatan bermakna "dilepas dari jabatannya atau dituruntahtakan".

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), "makzul" berarti berhenti dari memegang jabatan atau turun-tahta. Memakzulkan berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. Dengan demikian, pemakzulan presiden sama artinya dengan pemberhentian presiden dalam masa jabatan. Dalam terminologi hukum dan politik asing, istilah pemakzulan biasa disinonimkan dengan istilah *impeachment*.

Dalam sejarah ketatanegaraan RI, tercatat telah empat kali terjadi presiden berhenti sebelum masa jabatan berakhir. *Pertama*, Presiden Soekarno diberhentikan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno. *Kedua*, Presiden Soeharto 'berhenti' setelah Ketua MPR/DPR mengumumkan permintaan MPR agar Soeharto mengundurkan diri menyusul desakan demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. *Ketiga*, Presiden B.J. Habibie berhenti setelah MPR menolak pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR tahun 1999. *Keempat*, Presiden KH Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid karena tidak hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001 dinilai terlibat dalam kasus penyelewengan dana Bulog (*Bu-*

logate) dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam (*Bruneigate*) serta menerbitkan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli Tahun 2001.

Alasan dan Prosedur Pemakzulan Presiden

Dalam kesempatan ini, hanya akan dibahas satu topik khusus yaitu, pemakzulan Presiden KH Abdurrahman wahid. Perlu diketahui, proses pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid diawali oleh maraknya polemik di media massa mengenai dana Yanatera Bulog sebesar Rp35 milyar dan dana bantuan Sultan Brunai Darussalam sebesar US$ 2 juta yang mengaitkan nama Presiden KH Abdurrahman Wahid. Hal ini kemudian memicu 236 anggota DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut.

Usul hak angket tersebut disetujui oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Agustus 2000, dan secara resmi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dibentuk untuk mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut pada tanggal 5 September 2000. Setelah bekerja selama empat setengah 5 bulan, Pansus melaporkan hasilnya pada rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 5 Januari 2001, dengan kesimpulan dari hasil penyelidikan: (a) Dalam kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat "Patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog"; (b) Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Pansus berpendapat: "Adanya inkonsistensi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam, menunjukkan bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat".

Dari hasil kerja dan kesimpulan Pansus, rapat Paripurna DPR RI memutuskan: (a) Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden KH Abdurrahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu: (1) melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan; (2) melanggar Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ". (b) Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dasar keputusan tersebut, DPR RI menyampaikan Memorandun Pertama kepada Presiden pada tanggal 1 Februari 2001, kemudian disusul dengan Memorandum Kedua pada tanggal 1 Mei 2001, dan keputusan untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 1-7 Agustus 2001 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Menjelang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR RI yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001, Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail. Kebijakan tersebut dianggap melanggar ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Pasal 7 ayat 3, yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Karena itulah Sidang Istimewa MPR dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001.

Pada dini hari tanggal 23 Juli 2001, Presiden KH Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden RI yang isinya: (1) Membekukan MPR RI dan DPR RI; (2) Mengembalikan

kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan, serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun ; (3) Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sampai menunggu putusan MA; dan (4) Memerintahkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial serta ekonomi seperti biasa.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, MPR RI memakzulkan Presiden KH Abdurrahman Wahid karena dinyatakan melanggar haluan Negara, yaitu tidak hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan Penerbitan Maklumat Presiden Republik Indinesia tanggal 23 Juli 2001. Dari diktum keputusan alasan pemberhentian Presiden KH Abdurrahman Wahid tersebut, ternyata Pemberhentian Presiden KH Abdurrahman Wahid tidak didasarkan pada memorandum DPR RI, akan tetapi karena alasan lain, yaitu ketidakhadiran dan penolakan Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR dan dikeluarkannya maklumat oleh Presiden.

Dari alasan pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid tersebut terdapat satu pertanyaan kritis: Salah satu alasan pemakzulan Presiden dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 adalah sungguh melanggar haluan negara, tapi nyatanya, ketika mengeluarkan Memorandum 2001, DPR hanya menggunakan alasan bahwa “Presiden patut diduga ikut berperan” dalam kasus bobolnya dana Yanatera Bulog”. Bagaimana adanya syarat “Sungguh melanggar haluan negara” bisa disamakan

begitu saja dengan "patut diduga ikut berperan " dalam kasus bobolnya dana Yanatera Bulog"? Sementara "ikut berperan pun" belum tentu bisa disamakan dengan "sungguh melanggar haluan negara", apalagi hanya "patut diduga ikut berperan". Menurut hemat saya, alasan demikian selain ada lompatan dan sesat pikir, termasuk salah dalam menerapkan ketetapan MPR No. III/MPR/1978 dalam kasus konkret.

Sementara itu, percepatan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid yang berujung pada pemakzulannya, menurut pendirian saya, telah melanggar Pasal 7 Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 *jo*. pasal 33 ayat 3 Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2000, di mana DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden setelah terlebih dahulu menyampaikan memorandum pertama (dalam waktu 3 bulan) dan memorandum kedua (dalam waktu 1 bulan). Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2000, khususnya pada pasal 33 ayat 3 menentukan bahwa: "Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa, Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa diselenggarakan, kecuali Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap".

Dengan demikian, seharusnya waktu yang diperlukan untuk memakzulkan Presiden KH Abdurrahman Wahid adalah 6 (enam) bulan. Kenyataannya, MPR memakzulkan Presiden KH Abdurrahman Wahid dalam waktu 4 (empat) bulan dengan mengabaikan ketentuan pasal 33 ayat 3 TAP MPR II/MPR/2000. Ada sebagian pihak mengatakan itu sebagai "terobosan hukum" (*rule breaking*), tetapi saya mengatakan itu sebagai "terabasan hukum" (*unlawful*).

Dengan demikian, pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid tidak saja terdapat cacat substansi, tapi juga cacat prosedural. Cacat substansi, berkaitan erat dengan alasan pemakzulan, yang melompat dari "**Presiden patut diduga ikut berperan**" dalam kasus bobolnya dana Yanatera, disamakan dengan "**sungguh-sungguh melanggar haluan negara**". Adapun cacat prosedural, yaitu menabrak Pasal 7 Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 jo. Pasal 33 ayat 3 Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2000, di mana waktu yang ditentukan dan diperlukan untuk memakzulkan Presiden KH Abdurrahman Wahid adalah enam bulan. Akan tetapi praktiknya, MPR memakzulkan Presiden KH Abdurrahman Wahid hanya dalam waktu empat bulan. Apakah negara sedang sedemikian darurat? Tidak. Jawabannya adalah karena semata-mata ambisi kekuasaan.

Hikmah Ketatanegaraan

Dari tragedi atau kecelakaan politik "pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid" terdapat *"blessing in disguise*" bagi kehidupan dan praktik ketetanegaraan yang luar biasa dalam amandemen UUD 1945. Misalnya, perubahan ketiga Pasal 8 ayat (1), ada penambahan satu alasan sebagai penyebab pergantian Presiden oleh Wakil Presiden dalam masa jabatannya dibandingkan rumusan pasal 8 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu "diberhentikan". Kata "diberhentikan" dirumuskan dalam konteks adanya upaya konstitusional yang datang dari luar diri presiden, yaitu oleh MPR. Penambahan alasan "diberhentikan" tidak terlepas dari pengalaman sejarah dua kali praktik pemberhentian presiden, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden KH Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan pengalaman Presiden KH Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit Presiden terkait pembekuan DPR RI, melahirkan Pasal 7C pada Amandemen Ketiga UUD 1945, yaitu Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, pembubaran partai politik di Indonesia harus melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 68-73 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak boleh langsung diputuskan oleh pemerintah secara sepihak.

Sementara itu, pada Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan pasal-pasal tentang alasan dan prosedur pemakzulan presiden dan/ atau wakil presiden. Pasal-pasal itu antara lain: Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan pasal 7B, Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan (3) serta Pasal 24C ayat (2), yang pada intinya, bahwa proses pemakzulan presiden tidak semata merupakan proses dan keputusan politik (*politieke beslissing*), tetapi harus melibat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji, apakah pendapat DPR bahwa Presiden melanggar konstitusi sebagai alasan pemakzulan terbukti atau tidak secara yuridis (*judiciele vonnis*).

Dalam konteks mekanisme pemakzulan presiden, MK diletakkan sebagai salah satu "mekanisme antara" dalam proses pemakzulan, yang berkewajiban membuktikan dari sudut pandang hukum mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum presiden. Jika dalam putusan MK terbukti bahwa presiden melakukan pelanggaran hukum, tidak secara otomatis putusan MK tersebut dapat memberhentikan Presiden karena itu bukan wewenang dari MK. DPR akan meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR.

Persidangan MPR nantinya, yang akan menentukan apakah Presiden diberhentikan atau tetap dalam jabatan. Dengan demikian, kewenangan untuk memberhentikan atau tidak seorang presiden dalam jabatannya, sepenuhnya ada pada mayoritas suara anggota MPR dalam Sidang Paripurna untuk itu. Dalam konteks demikian, supremasi politik lebih menonjol dibandingkan supremasi hukum, karena suara mayoritas anggota MPR menentukan keputusan.

Dalam hemat saya, seharusnya posisi MK tidak diletakkan di tengah sebagai "mekanisme antara" yang memperantarai pengajuan Pendapat DPR dan Sidang Paripurna MPR, tetapi diletakkan pada posisi sebagai "benteng terakhir " proses pemakzulan Presiden. Sehingga, kedudukan dan fungsi MK dapat menguji apakah keputusan politik untuk memakzulkan presiden oleh MPR telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Praktik seperti ini dilakukan di Korea Selatan dan Jerman, yang tingkat pemeriksaannya pertama sekaligus terakhir, dan putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding).* Sehingga, lebih memberi kepastian hukum yang adil bagi presiden dalam proses pemakzulan presiden jika terpaksa harus dilakukan di masa yang akan datang. Semoga!

Risiko Presiden Antikompromi

Marzuki Wahid

"Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi. Karena itu, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan datang. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perbedaan agama. ....

"Demikian pula kita harus meletakkan sendi-sendi kehidupan yang sentosa bagi bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Ini bukanlah tugas yang ringan. Ini tugas yang berat. Apalagi karena kita sedang didera oleh perbedaan paham yang besar oleh longgarnya ikatan-ikatan sebagai bangsa."[1]

1 (Pidato perdana Presiden KH. Abdurrahman Wahid, setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden RI keempat, 20 Oktober 1999 di gedung DPR/MPR RI)

Terpilih karena Kapabilitas

KH. ABDURRAHMAN Wahid (Gus Dur) adalah presiden pertama Indonesia dalam era demokrasi (Reformasi) yang terpilih secara demokratis. Masa kepemimpinannya adalah masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, dari Orde Baru menuju Orde Reformasi.

Sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri karena desakan demonstrasi mahasiswa pada 1998, lalu digantikan oleh Presiden BJ. Habibie hingga Oktober 1999, sulit rasanya disebut bahwa rezim telah berganti. Sebab BJ. Habibie adalah 'anak' kesayangan dan didikan politik Soeharto. Kepemimpinannya bisa dikatakan metamorfosis langgam politik Orde Baru. Perbaikan-perbaikan kebijakan memang dilakukan oleh Presiden BJ. Habibie, tetapi tidak lebih karena tuntutan situasi politik yang sulit dihindari.

Pergantian rezim politik baru dimulai ketika Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI keempat pada 20 Oktober 1999.[2] Pemilihan presiden oleh MPR tahun 1999, di mana Gus Dur terpilih, adalah pemilihan presiden pertama paling demokratis setelah tahun 1955. Ini adalah awalan yang baik untuk membedakan dengan rezim otoritarian "Orde Baru" sebelumnya.

Gus Dur terpilih bukan karena partainya memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) 1999,[3] bukan karena kontrak poli-

2 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia setelah hasil voting tertutup menunjukkan bahwa dari 700 anggota MPR, 373 memberikan suara bagi Gus Dur (53,28%), dan 313 memberikan suara bagi Megawati (44,72%), sementara 14 suara tidak sah (9 suara abstain, 5 suara menyerah). Gus Dur mengungguli 60 suara dari Megawati.

3 Pemilihan Umum (Pemilu) pertama era Reformasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik. Berdasarkan

tik dengan Poros Tengah, tetapi karena kualifikasi dan kapasitas dirinya yang dipandang paling tepat memimpin Indonesia masa transisi menuju demokrasi. Masa transisi ini sungguh tidak gampang, tidak bisa dipimpin oleh sembarang orang. Biasanya penuh gejolak bak cacing kepanasan, banyak resistensi, *euphoria*, dan *blunder* di tengah jalan. Bila salah urus, alih-alih akan mengantarkan pada cahaya demokrasi sebagaimana tuntutan Reformasi, malah jatuh kembali pada genggaman rezim lama Orde Baru, yang bisa jadi telah berganti "baju" dengan gaya baru.

Gus Dur dinilai memiliki kemampuan memimpin Indonesia dalam masa transisi yang pelik ini. Ada beberapa alasan Gus Dur dipilih. *Pertama*, Gus Dur memiliki *track record* politik antitesis Orde Baru yang konsisten. Dia pengkritik paling nyaring sepanjang Orde Baru berkuasa. Pernah memimpin Forum Demokrasi (Fordem), forum para cendekiawan, budayawan, dan aktivis gerakan sosial untuk mengkritik kebijakan Orde Baru. Atas pertimbangan ini, Gus Dur dipandang sebagai orang yang paling tepat untuk mendekonstruksi rezim Orde Baru.

Kedua, Gus Dur pernah memimpin organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama) selama lima belas tahun, sehingga dipandang memiliki dukungan massa yang besar dan menyeluruh hingga ke akar rumput. Dalam waktu yang sama, Gus Dur juga memimpin gerakan sosial

---

keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), tanggal 1 September 1999, 5 partai besar menduduki 417 kursi dari 462 di DPR adalah PDIP sebagai pemenang Pemilu meraih 153 kursi, Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, PPP 48 kursi, dan PAN 34 kursi.

keagamaan dan gerakan sosial budaya secara konsisten dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis, adil, setara, toleran, inklusif, beradab, dan bermartabat sepanjang Orde Baru memerintah.

Ketiga, Gus Dur dipandang memiliki kerangka pemikiran demokrasi yang kokoh dan bisa diterapkan untuk menggantikan atau setidaknya memperbaiki sistem politik yang sudah dibangun Orde Baru. Selain sebagai agamawan, budayawan, aktivis sosial dan pegiat demokrasi, Gus Dur juga seorang penulis dan pemikir yang handal. Tulisan-tulisannya bertebaran di berbagai media.

Dalam riset saya pada tahun 1999, saya berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan Gus Dur yang terpublikasikan dalam bentuk artikel, kolom, kata pengantar, dan makalah sebanyak 493 tulisan. Saya meyakini masih banyak tulisan Gus Dur yang belum saya temukan, apalagi dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan. Ternyata benar adanya, setelah hasil riset saya terbit dengan judul *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, bermunculan buku berisi kumpulan tulisan-tulisan Gus Dur. Saya memperkirakan tulisan-tulisan Gus Dur hingga akhir hayatnya berjumlah 800-an tulisan.

Dengan demikian, jelaslah keterpilihan Gus Dur menjadi presiden di masa transisi karena dia secara *de facto* adalah pemimpin terbesar di eranya. Dia adalah pemimpin multidimensi dengan basis massa yang sangat besar. Sosok Gus Dur sebagai pemimpin multi dimensi, secara sederhana, dapat digambar berikut ini:

GUS DUR
PEMIMPIN MULTIDIMENSI

Dari sisi pengalaman mengelola gerakan sosial, memimpin *civil society,* dan memimpin lembaga pendidikan, tak seorang pun yang meragukan kemampuan Gus Dur. Gus Dur bukan politisi karbitan atau politisi instan yang langsung menikmati kursi kekuasaan, melainkan sosok multidimensi yang berproses sangat lama dan mendalam melalui berbagai bidang yang ia geluti.

Di bawah ini adalah proses intelektual, profesional, dan kultural yang dialui Gus Dur hingga menjadi presiden dan sejumlah daftar posisi strategis yang pernah diduduki Gus Dur sebelum dan sesudah menjadi Presiden RI. Bagi Gus Dur, jabatan presiden bukanlah puncak perjuangan. Presiden—seperti jabatan yang lain—hanyalah amanah yang harus dijalani sesuai dengan mandatnya.

PERIODESASI PERJALANAN KEHIDUPAN GUS DUR

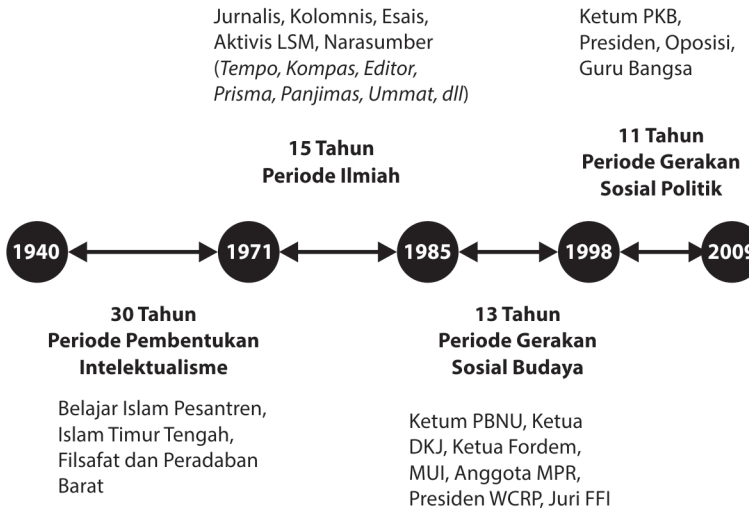

POSISI STRATEGIS YANG DISINGGAHI GUS DUR

Usia	Periode	Posisi Strategis
19	1959-1963	Ustadz Pesantren Tambakberas (4 tahun)
32	1972-1974	Dekan dan Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asyhari, Jombang (2 tahun)
34	1974-1980	Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng (6 tahun)
36	1976	Pengasuh Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta
40	1980-1984	Ketib Awwal PBNU (4 tahun)
43	1983-1985	Ketua DPH Dewan Kesenian Jakarta
44	1984-1999	Ketua Umum PBNU (15 tahun)
45	1985-1987	Dewan Juri Festival Film Indonesia (FFI)
47	1987-1992	Ketua Majelis Ulama Indonesia (5 tahun)

49	1989-1993	Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (4 tahun)
51	1991	Ketua Forum Demokrasi Jakarta
54	1994	President or World Conference of Religion and Peace (WCRP), Italia
58	1998	Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
59	1999	Ketua Dewan Maritim Indonesia (DMI)
59	1999-2001	Presiden Republik Indonesia (21 bulan)
60	2000-2009	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mustasyar (9 tahun)
62	2002	Rektor Universitas Darul Ulum, Jombang
62	2002	Penasihat Solidaritas Korban Pelanggaran HAM
63	2003	Penasihat Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional
64	2004	Pendiri the Wahid Institute, Indonesia

Sebagai presiden, kekurangan Gus Dur adalah belum punya pengalaman menjadi birokrat (mengelola birokrasi negara). Sekalipun demikian, tidak memiliki pengalaman di birokrasi tidak mesti adalah sebuah kelemahan. Dalam kasus Gus Dur, hal itu tampaknya justru menjadi kekuatan. Dia tidak memiliki beban masa lalu sehingga terasa *enteng* saja ketika hendak melakukan pembongkaran sistem birokrasi bobrok warisan Orde Baru.

Gus Dur Meletakkan Pondasi Indonesia Ideal

Pada saat Gus Dur menjadi presiden, ekonomi Indonesia tengah terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Meskipun kebijakan ekonomi beruntun dilahirkan semasa Presiden BJ. Habibie, namun kondisi ekonomi tidak juga membaik. Kondisi politik dalam negeri pun tidak stabil pasca-Soeharto dilengserkan sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa. Saling menyalahkan dan "cuci tangan" atas dosa masa lalu sangat terasa dalam birokrasi pemerintahan pasca-Orde Baru.

Selain dua permasalahan di atas, ancaman perpecahan (disintegrasi) wilayah-wilayah kepulauan NKRI juga menjadi sesuatu yang menakutkan. Pada pemerintahan BJ. Habibie sebelumnya, Timor Timur (sekarang Timor Leste) telah lebih dulu memilih merdeka melalui referendum pada 1999. Tuntutan merdeka juga disuarakan dari Indonesia paling barat, Aceh, dan Indonesia paling timur, Papua. Kerusuhan Ambon dan Poso, serta birokrasi yang korup warisan Orde Baru adalah daftar panjang kerapuhan negara pasca-Orde Baru yang dihadapi Presiden Gus Dur.

Menghadapi kondisi negara seperti ini, sesuai dengan misi perjuangan yang dibangun puluhan tahun sebelumnya dalam gerakan sosial dan kepemimpinan *civil society*, Presiden Gus Dur dengan tegas dan berani mengambil kebijakan yang fundamental bagi demokrasi dan keutuhan NKRI, meskipun tidak populer, bahkan ditentang oleh sejumlah kalangan.

Di antaranya adalah memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri,[4] membubarkan dwifungsi ABRI, mengembalikan TNI ke barak, memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI, mengangkat pejabat sipil sebagai Menteri Pertahanan, mengangkat Panglima TNI dari Angkatan Laut (sebelumnya selalu dari Angkatan Darat), melikuidasi lembaga represif Orde Baru Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakorstanas) pengganti Kopkamtib dan penelitian khusus (Litsus), membubarkan Departemen Penerangan sebagai sarana hegemoni dan kooptasi negara, membubarkan Departemen Sosial yang dulu digunakan sarana korupsi, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desem-

4 Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ber 1999, mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora Papua, mengakui Konghucu sebagai agama resmi,[5] menetapkan tahun baru Cina (Imlek) sebagai hari besar agama dan menjadi hari libur nasional, dan menerapkan otonomi daerah.

Lebih dari itu, Gus Dur juga berani melawan tekanan IMF, mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat dalam KKN, menggagas Poros Jakarta-Beijing-India, menggagas pengadilan untuk Presiden Soeharto (hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan),[6] dan mengusulkan pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.[7]

Semua yang dilakukan oleh Gus Dur dalam masa singkat kepemimpinannya sesungguhnya adalah agenda Reformasi Total yang disuarakan pada saat Presiden Soeharto lengser. Ini pula yang dulu diperjuangkan Gus Dur saat menjadi pemimpin *civil society*. Bagi Gus Dur, menjadi presiden atau menjadi masyarakat sama saja, yakni terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi semuanya.

Dengan terobosan-terobosan kebijakan yang ditempuh Gus Dur, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah di In-

5 Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu.

6 Untuk pertama kalinya, pada 30 Agustus 2000, pengadilan terhadap Presiden Soeharto dilaksanakan.

7 Dalam rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR, seluruh Fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik ini.

donesia berhasil diredam. Pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer di Aceh dan Papua. Militer kembali ke barak. Kepemimpinan dipegang masyarakat sipil. Hukum menjadi panglima. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak Reformasi. Ketimpangan turun. Peningkatan ekonomi menjadi sangat baik.

Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga tiga kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang berada pada minus tiga saat ditinggalkan Habibie, pada era Gus Dur tumbuh hingga ke 4,9 persen pada tahun 2000. Yang lebih penting lagi, pertumbuhan ekonomi ini dibagi secara merata. [8] Sebelum krisis ekonomi 1998, indeks ketimpangan (Rasio Gini) sangat tinggi. Gus Dur yang tidak menginginkan kesenjangan menjadi akar konflik sosial berhasil menurunkan Rasio Gini hingga 0,31, atau terendah dalam 50 tahun terakhir. [9]

Inilah tekad Gus Dur sebagaimana yang disampaikannya seusai pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden RI keempat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Dur menekankan komitmennya untuk menegakkan keadilan, mendatangkan kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga masyarakat, dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat.

8 Baca artikel "Perkembangan Ekonomi dan Politik di Era Gus Dur" pada https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/170000769/perkembangan-ekonomi-dan-politik-di-era-gus-dur?page=all.

9 Rasio gini 0,32 hanya sekali pernah dicapai pada era Soeharto pada tahun 1993. Bedanya, Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan rasio gini hingga ke angka 0,32 (1993). Sedangkan Gus Dur hanya perlu waktu kurang dari dua tahun untuk menurunkan koefisien Rasio Gini dari 0,37 (1999) ke 0,31 (2001). *Ibid*.

Oligark Melawan Balik

Untuk memastikan semua kebijakan Gus Dur berjalan dan terealisasi sesuai dengan harapan, Gus Dur sangat ketat dalam memilih menteri di kabinetnya. Gus Dur memanfaatkan hak prerogatifnya sebagai presiden untuk memilih menteri sesuai dengan kriterianya. Konsolidasi kabinet harus dilakukan. Perombakan kabinet di tengah jalan menjadi tak terhindarkan. Gus Dur berulang kali mengganti menteri di kabinetnya yang dipandang tidak sejalan atau menghalangi misi perjuangannya.

Di antara menteri yang diganti atau mengundurkan diri adalah Hamzah Haz dari PPP (Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan),[10] Wiranto dari TNI (Menko Politik dan Keamanan),[11] Laksamana Sukardi dari PDIP (Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN)[12] Jusuf Kalla dari Golkar (Menteri Perindustrian dan Perdagangan),[13] Bambang Sudibyo dari PAN (Menteri Keuangan),[14] M. Prakosa dari PDIP (Menteri Pertanian),[15] Bomer Pasaribu dari Golkar (Menteri Tenaga Kerja),[16] Susilo B. Yudhoyono dari TNI (Menteri Pertambangan dan Energi, diganti menjadi Menko Polsoskam),[17] dan Alirrahman (Mensesneg).[18] Tidak hanya itu, teman akrab-

10 Direshuffle pada tanggal 26 November 1999.

11 Direshuffle pada tanggal 15 Februari 2000.

12 Dibebastugaskan pada tanggal 24 April 2000.

13 Dibebastugaskan pada tanggal 24 April 2000.

14 Direshuffle pada tanggal 26 Agustus 2000.

15 Direshuffle pada tanggal 26 Agustus 2000.

16 Direshuffle pada tanggal 26 Agustus 2000.

17 Digeser posisi pada tanggal 26 Agustus 2000.

18 Direshuffle pada tanggal 15 Februari 2000.

nya sendiri juga tidak luput dari koreksi. Gus Dur mengganti Bondan Gunawan (Mensesneg)[19] dan Rozy Munir dari PKB (Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN).[20]

Selanjutnya, Gus Dur me-*reshuffle* Yusril Ihza Mahendra dari PBB (Menteri Hukum dan Perundang-undangan),[21] Sarwono Kusumaatmadja dari PKP (Menteri Kelautan dan Perikanan),[22] Cacuk Sudarijanto dari Persatuan Daulat Umat (Menteri Muda Percepatan Restrukturisasi Perekonomian),[23] Rizal Ramli (Menko Bidang Perekonomian, diganti menjadi Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN),[24] Prijadi Praptosuharjo (Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN),[25] Nurmahmudi Ismail dari PK (Menteri Kehutanan dan Perkebunan),[26] dan Kwik Kian Gie dari PDIP (Menko Ekuin).[27] Bukan sekadar menteri di kabinetnya, Gus Dur juga mengganti Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi dan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat.

Kebijakan Gus Dur yang progresif, fundamental, dan tanpa kompromi ini tentu mengundang resistensi bagi lawan-lawan politiknya, baik dari Parpol maupun Parlemen, yang sebagian besar adalah politisi sisa-sisa Orde Baru yang selama ini telah membentuk oligarki politik-ekonomi. Apalagi, Gus Dur

19 Direshuffle pada tanggal 29 Mei 2000.

20 Direshuffle pada tanggal 26 Agustus 2000.

21 Direshuffle pada tanggal 7 Februari 2001.

22 Direshuffle pada tanggal 1 Juni 2001.

23 Direshuffle pada tanggal 1 Juni 2001.

24 Direshuffle pada tanggal 12 Juni 2001.

25 Direshuffle pada tanggal 12 Juni 2001.

26 Diminta mundur pada tanggal 15 Maret 2001.

27 Mengundurkan diri pada tanggal 10 Agustus 2000.

beberapa kali terlibat perseteruan dengan DPR yang disebutnya seperti taman kanak-kanak. Tak terkecuali dari pihak-pihak yang paling tersingkirkan dari kebijakan fundamental Gus Dur, yakni militer.

Karuan saja, isu-isu buruk tentang Gus Dur mulai dihembuskan. Yang paling fenomenal tentu saja adalah kasus Buloggate dan Bruneigate (yang tidak pernah terbukti sampai kini). Dua kasus ini digelindingkan secara sistematis hingga menjadi bola salju pelengseran. Puncaknya, pada 1 Februari 2001, DPR RI yang saat itu diketuai oleh Akbar Tandjung mengeluarkan Memorandum I. Dalam Memorandum I, Presiden Gus Dur dinilai DPR secara sungguh-sungguh telah melanggar Haluan Negara, melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Padahal, dugaan kasus korupsi Buloggate dan Bruneigate sama sekali tidak terbukti. Namun, DPR bersikukuh dengan tuduhannya, sehingga tetap melanjutkan mengeluarkan Memorandum II pada 30 April 2001 yang meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid.[28]

Dalam menyikapi Memorandum II DPR RI yang berujung pada percepatan Sidang Istimewa MPR, berbagai tawaran kompromi, negosiasi, dan kompensasi berseliweran. Jika Gus Dur bersikap pragmatis dan hanya berorientasi pada kelangsungan kekuasaannya, tentu kompromi-kompromi itu akan diterima. Namun, dengan keberanian yang tanpa kompromi, pada

28 Keputusan DPR RI Nomor 51/DPR-RI/IV/2000-2001.

pukul 01.10 WIB tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur selaku Presiden RI dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI menanggapi Memorandum tersebut dengan mengeluarkan Maklumat Presiden RI--yang biasa disebut Dekrit Presiden. Isi Maklumat adalah [1] membekukan MPR dan DPR-RI, [2] mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun, [3] menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Hanya dalam 16 jam setelah Gus Dur mengeluarkan Maklumat Presiden, drama penjatuhan Gus Dur dipertontonkan. Puncaknya, dalam Rapat Paripurna ke-4 Sidang Istimewa MPR tahun 2001, pukul 17.00 tanggal 23 Juli 2001. Rapat yang dipimpin oleh Ketua MPR Amien Rais itu memutuskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH. Abdurahman Wahid, yang berisi:

Pasal 1: Ketidakhadiran dan penolakan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001, sungguh-sungguh melanggar haluan negara. *Pasal 2*: Memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi TAP MPR RI Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden RI.

Mencermati TAP MPR No. II/MPR/2001 yang memberhentikan Gus Dur di atas, maka pelanggaran haluan negara yang dilakukan Gus Dur menurut MPR adalah [1] ketidakhadiran dan penolakan Presiden RI untuk memberikan per-

tanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001, dan [2] penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001. Pertanyaan penting untuk kajian lanjutan adalah apakah betul dua hal itu secara konstitusional adalah bentuk pelanggaran terhadap haluan negara? Apakah yang dimaksud dengan haluan negara itu? Bukankah DPR dan MPR sudah dibekukan oleh Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid pada hari yang sama 16 jam sebelumnya? Bagaimana status hukum MPR yang telah dibekukan mengeluarkan ketetapan? Apakah ketetapannya dapat diakui secara konstitusional? Bagaimana status hukum dan kekuatan hukum Maklumat Presiden RI? Apakah putusan Maklumat Presiden RI dapat berlaku secara efektif? Pertanyaan finalnya, apakah TAP MPR No. II/MPR/2001 yang memberhentikan Gus Dur itu konstitusional?

Kehormatan yang Tetap Tegak

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin memberikan tiga catatan refleksi atas drama penjatuhan Gus Dur sebagai presiden oleh oligarki politik sisa-sisa Orde Baru melalui DPR RI dan MPR RI.

Pertama, adalah suatu kesalahan fatal, membaca Gus Dur hanya pada fase menjadi presiden RI. Pemahaman ini sangat mungkin terjadi pada generasi milenial yang lahir tahun '90-an ke atas. Selain menjadi presiden bukan tujuan Gus Dur, juga konstelasi politik saat itu harus dibaca dalam konteks pertarungan antara kelompok pro-demokrasi (gerakan Reformasi Total) yang dimotori oleh Gus Dur dengan kelompok status quo (oligarki politik sisa-sisa otoritarian Orde Baru) yang dimotori oleh Golkar dan TNI. Ingat, pilar politik Orde Baru

selama 32 tahun berkuasa adalah Golkar, ABRI (TNI), dan birokrasi.

Gus Dur sendiri sebetulnya bukan politisi yang menghamba pada kekuasaan, apalagi politisi karbitan atau politisi instan. Gus Dur adalah sosok agamawan, ilmuwan, aktivis demokrasi, aktivis HAM, dan aktivis gerakan sosial yang hidupnya diabdikan untuk kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian semesta.

Kedua, tanpa ditulis secara ilmiah pun sebetulnya publik sudah paham bahwa Presiden RI keempat Gus Dur itu tidak jatuh sendiri, baik karena *kesandung*, maupun *keseleo,* tapi dijatuhkan dan di-*jorogke* (didorong paksa). Ini sangat terang benderang dilakukan melalui skenario yang rapi dan *sophisticated* sebagaimana ditulis oleh Virdika Rizky Utama dalam buku *Menjerat Gus Dur*. Dengan kearifannya, publik sangat memahami ini.

Karena kebijakan-kebijakannya mengancam kepentingan sejumlah orang, maka dirancang dan diskenariokanlah penjatuhan Presiden Gus Dur. Meskipun memperoleh penentangan dari rakyat yang luar biasa, namun karena akumulasi kekecewaan politik yang memuncak dan kepentingan besar yang terus tersingkir, bak bisul besar yang hendak pecah, maka prinsipnya lebih cepat lebih baik Gus Dur dijatuhkan.

Saat itu, rakyat sebetulnya bisa melawan, bahkan bisa menghentikan Sidang Istimewa MPR, namun pertumpahan darah akan sulit dihindari. Sebab, kelompok pro dan kontra Sidang Istimewa sudah berhadap-hadapan. Gus Dur memilih untuk mundur dari jabatan presiden daripada terjadi pertumpahan darah. “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan,” pesan Gus Dur kepada para pendukungnya

Ketiga, sebagai bukti kebenaran dan kemuliaan Gus Dur, bukan hanya dihormati dan dimuliakan semasa hidupnya meski sudah tidak menjabat presiden, tetapi juga dimuliakan setelah wafatnya. Gus Dur adalah presiden Indonesia yang paling sering dikunjungi rakyat Indonesia setelah wafatnya. Antara 3000 sampai 5000 orang setiap harinya, bahkan dalam momen tertentu bisa 10.000 orang, berkunjung ke makam Gus Dur di Jombang.[29] Tidak hanya karena rindu dan mendoakan Gus Dur, tetapi juga *ngalap barokah* (*tabarrukan*). Oleh sebagian kalangan, Gus Dur bukan hanya *waliyul amri* (presiden), tetapi juga diyakini sebagai *waliyullah* (wali kesepuluh setelah Walisongo) yang terus menginspirasi sepanjang zaman.

29 Baca https://www.tribunnews.com/ramadan/2012/07/19/makam-gus-dur-dikunjungi-8.000-orang-tiap-hari; https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4535882/ribuan-peziarah-kunjungi-makam-gus-dur-di-jombang-jelang-ramadhan; https://faktualnews.co/2018/12/25/liburan-pengunjung-makam-gus-dur-meningkat-tiga-kali-lipat/114678/

Gus Dur dan Kebenaran yang Tertunda:
Kesaksian Korlap Aksi Melawan Penjatuhan Presiden Gus Dur

Moh. Syaeful Bahar

GEGARA buku *Menjerat Gus Dur*, karya Virdika Rizky Utama, seorang teman membuka-buka arsip lama berupa foto dan kliping koran aksi mahasiswa Jawa Timur saat mendukung Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mengunggahnya di FB dan WA-Group. Meskipun telah berumur 19 tahun, foto dan kliping koran tersebut masih tampak bagus, utuh tidak rusak sama sekali. Membuktikan bahwa arsip lama tersebut tersimpan dan terawat dengan baik.

Sontak saja, foto dan kliping koran ini mendapat tanggapan luas dari teman dan sahabat-sahabat sesama pelaku sejarah aksi mahasiswa pembela Gus Dur di tahun 2000-2001. Beragam komentar muncul, mulai dari yang paling emosional, langsung terbakar hingga komentar bijak yang mendinginkan. Namun, semua komentar bermuara pada satu pernyataan, sesal.

Kami semua menyesalkan, mengapa dokumen penting, tentang kejahatan luar biasa ini baru terkuak? Kenapa buku

ini baru terbit? Seandainya saja dokumen ini terkuak sebelum Gus Dur dikudeta, mungkin Gus Dur tak akan jatuh, dan jika Gus Dur tidak jatuh, mungkin wajah demokrasi di Indonesia tak sebabak belur saat ini.

Tesis ini bukan bualan. Ini realitas yang dibenarkan oleh berbagai penelitian. Meskipun tidak semua pengamat dan peneliti menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia gagal, namun bukti-bukti akan melambatnya atau bahkan gagalnya demokratisasi di Indonesia banyak ditemukan. Misal, pendapat Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz (2004), yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia belum terbentuk sempurna. Salah satu indikator yang dipakai oleh kedua pengamat ini adalah terkonsolidasinya kembali kekuatan oligarki di pusat kekuasaan negara.

Segelintir orang yang pernah menikmati kekuasaan Orde Baru, kembali ke pusat kekuasaan, terutama pasca-pelengseran Gus Dur. Akibat berikutnya, demokrasi yang seharusnya menjadi penjamin tidak adanya praktik korupsi (Blake dan Martin, 2006), tidak terbukti. Justru sebaliknya, pada kasus di Indonesia, demokrasi menjadi sebab merebaknya korupsi di mana-mana. Hal ini, pernah disampaikan oleh R. William Lidle. Tak hanya Lidle, Saiful Mujani, dalam bukunya, *Kuasa Rakyat* (2012), juga menyampaikan hal senada. Mujani mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami distorsi. Demokrasi di Indonesia dibegal oleh para elit.

Demokrasi di Indonesia tak ubahnya sebuah ungkapan, dari rakyat, oleh elit dan untuk elit. Rakyat hanya menjadi bagian dari demokrasi elektoral di saat pemilu saja. Selanjutnya, rakyat tak pernah bisa berbuat apa-apa dalam menentukan kebijakan negara.

Pasukan Berani Mati dan Matinya Demokrasi

"Tidak boleh hanya karena alasan kekuasaan, darah rakyat Indonesia tumpah membasahi bumi pertiwi, toh nanti sejarah akan membuktikan siapa yang benar," begitu petuah dan pengakuan Gus Dur di mana-mana pasca pelengseran dirinya sebagai Presiden RI ke 4. Petuah dan pengakuan ini bukan basa basi.

Ribuan bahkan ratusan ribu orang para pecinta Gus Dur, rela mengorbankan nyawa untuk membela kehormatan Gus Dur di saat konflik politik terjadi akhir tahun 2000 hingga awal tahun 2001. Mereka, adalah orang-orang kampung, para santri yang sangat menghormati dan mencintai Gus Dur. Mereka menamakan diri Pasukan Berani Mati.

Tak sedikit di antaranya telah menulis surat wasiat sebelum berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Bagi mereka, membela Gus Dur adalah membela kiai, membela NU, dan membela kebenaran. *Mahabbah* (rasa cinta) yang teramat tinggi kepada Gus Dur, menggeser rasa takut dan khawatir. Bila perlu, maut pun akan mereka hadapi dengan senyum merekah. Para pecinta Gus Dur ini, ikhlas tanpa beban. Tujuan mereka hanya satu, membela Gus Dur.

Saya adalah salah satu dari mereka. Tentu tidak sendiri, ribuan mahasiswa juga memiliki rasa yang sama. Membela Gus Dur, membela kebenaran, menjaga dan merawat demokrasi serta melawan kembalinya kekuatan otoritarianisme Orde Baru. Kami, para mahasiswa tak sepenuhnya sama dengan massa pendukung Gus Dur pada umumnya.

Jika mereka terpanggil karena rasa cinta yang teramat sangat pada Gus Dur, kami, para mahasiswa Jawa Timur, lebih

dari pada itu. Tidak hanya sekadar mencintai dan menghormati Gus Dur, kami percaya, bahwa masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh jatuh atau tidaknya Gus Dur dari kursi Presiden RI. Gus Dur menjadi taruhan bagi masa depan demokrasi dan Indonesia.

Jika Gus Dur jatuh, maka sama artinya Indonesia kembali ke genggaman para oligark, kembali dikuasai oleh anasir jahat Orde Baru. Sebaliknya, jika Gus Dur bertahan sama artinya dengan menyelamatkan transisi dan konsolidasi demokrasi serta memastikan tercapainya cita-cita Reformasi.

Kekhawatiran kami pada masa depan Indonesia dan demokrasi tidak lahir serta merta, namun lahir dari sebuah kajian yang tidak sederhana, panjang dan mendalam. Berbagai informasi kami kumpulkan dengan hati-hati, fakta-fakta yang tampak dan bermunculan di lapangan, kami coba terus konfirmasi dan klarifikasi dalam diskusi-diskusi panas, jauh sebelum kami bersepakat mendukung dan membela Gus Dur.

Sebagai mahasiswa, kami tidak ingin membeli kucing dalam karung. Kami tidak ingin berkhianat pada semangat Reformasi yang telah memakan korban nyawa teman-teman kami di ujung pemerintahan Orde Baru. Kami harus memastikan, siapa yang berada di jalur dan nilai-nilai Reformasi dan siapa yang berkhianat pada konstitusi. Kami harus benar-benar memilah, mana kepentingan kekuasaan yang berdampak pendek, dan mana kepentingan bangsa yang berdampak panjang.

Hal yang paling sensitif dan kami jaga adalah terbelahnya kekuatan mahasiswa. Mana mungkin, setelah sukses bersatu padu menggulingkan Soeharto dan Orde Baru, kami, para mahasiswa harus berhadap-hadapan, terbelah menjadi dua kubu, antara menjatuhkan Gus Dur dan mempertahankan Gus Dur.

Sangat tidak gampang menentukan pilihan saat itu, mengingat, kekuatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta, sebagian besar telah bergerak mendukung kekuatan politik di senayan, DPR/MPR.

Amien Rais sebagai inisiator penggulingan Gus Dur, selalu menjadi bintang di panggung-panggung parlemen jalanan mahasiswa. Sebagai "Bapak Reformasi" dan pendukung utama poros tengah, kekuatan politik yang mengantarkan Gus Dur menjadi presiden, Amien Rais mendapatkan legitimasi untuk berteriak lantang turunkan Gus Dur. Belakangan, kelompok mahasiswa yang mendukung Amien Rais dan Akbar Tanjung ini lebih dikenal dengan sebutan BEM SI (BEM Seluruh Indonesia).

Terlebih, ketika, hampir semua media *mainstream*, baik cetak maupun elektronik, jelas-jelas berpihak ke BEM SI. *Blow up* dan *framing*, bahwa Gus Dur tidak becus, ugal-ugalan dan bahkan tersandung kasus *Bruneigate* dan *Buloggate* semakin kencang diwartakan.

Sumber berita yang paling diburu adalah mereka yang menentang Gus Dur, Amien Rais dan Akbar Tanjung cs, tidak terkecuali aktivis mahasiswa yang tergabung di BEM SI. Sedikit sekali kelompok pendukung Gus Dur mendapat porsi pemberitaan yang berimbang. Kami sadar, bahwa mayoritas media *mainstream* berpihak ke Amien Rais dan BEM SI, cs.

Mengapa bisa demikian? Jelas karena kekuatan uang. Persis sama dengan data yang diungkap oleh Verdika dalam bukunya, yaitu tentang tugas Surya Paloh dan Parni Hadi untuk mengendalikan media massa yang pro-upaya penggulingan Gus Dur. Karena itu, pilihan mendukung Gus Dur bukan pekerjaan mudah.

Pada posisi seperti itulah, kami para mahasiswa Jawa Timur dan beberapa komponen mahasiswa pro-demokrasi di kota-kota besar lainnya, mulai membaca dan berpikir kritis. Kami mulai menyadari bahwa ada kekuatan besar yang bekerja secara sistematis dan terstruktur mengendalikan demo-demo yang dilakukan oleh BEM SI untuk menggerus legitimasi Gus Dur sebagai presiden.

Jaringan BEM SI yang akhirnya kami ketahui terhubung dengan jejaring HMI dan IMM, mulai membuat kami sadar, bahwa Gus Dur sedang ditikam dari belakang oleh senior-senior HMI yang dikomandani oleh Akbar Tanjung, Amien Rais, Priyo Budi Santuso, Fuad Bawazier dan Din Syamsuddin.

Paling tidak, ada lima isu yang kerap kami diskusikan saat itu untuk memantapkan pilihan mendukung Gus Dur. *Pertama*, gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan BEM SI terindikasi kuat memiliki koneksi khusus ke senayan, DPR/MPR, terutama melalui senior-senior HMI dan IMM. Sehingga kami berkesimpulan, bahwa gerakan mereka tak lagi murni suara mahasiswa.

Kedua, kami melihat ada keterlibatan Cendana dalam demo-demo anti-Gus Dur yang dilakukan oleh BEM SI saat itu. Dalam pengamatan kami, Cendana tidak akan tinggal diam dengan upaya Gus Dur menyeret Cendana ke meja hijau serta memaksanya untuk mengembalikan harta negara yang telah mereka curi selama tiga puluh dua tahun. Maka, ketika ada gerakan menjatuhkan Gus Dur, dengan senang hati mereka menjadi bagian dari gerakan tersebut.

Ketiga, ada indikasi kuat, beberapa oknum militer terlibat dalam gerakan demo BEM SI. Persis sama, kami juga menilai,

bahwa masih banyak oknum militer yang tidak rela peran dan kekuasaan mereka dikurangi sedemikian hebat, sebagaimana amanat Reformasi.

Keempat, kami mengkhawatirkan kekuasaan DPR yang terlalu besar, bahkan terkesan *overlapping*, sehingga dapat mengancam demokrasi terutama sistem presidensial sebagaimana amanat konstitusi.

Kelima, kami melihat, media massa yang seharusnya berdiri independen, tampak sekali berpihak dan menjadi alat propaganda upaya penggulingan Gus Dur.

Kebenaran yang Akhirnya Terungkap

Sebagai tandingan, kami mengatasnamakan BEM Indonesia (BEMI). Jika BEM SI menuntut Gus Dur mundur, maka kami, BEMI meminta Golkar dan DPR dibubarkan. Jika massa BEM SI mengepung Istana Negara, kami BEMI mengepung DPR/MPR. Jika massa BEM SI lebih banyak didominasi mahasiswa Jakarta, maka BEMI lebih banyak mahasiswa dari kota lain selain Jakarta. Jika BEM SI digerakkan oleh para alumni HMI, maka BEMI digerakkan oleh para aktivis prodemokrasi.

Puncaknya adalah persekusi dan kekerasan fisik yang dialami massa BEMI oleh massa kontra-Gus Dur. Awalnya, konsentrasi massa masih terbelah, BEM SI dan kekuatan massa kontra-Gus Dur berada di Istana Negara, sedangkan BEMI dan massa pro-Gus Dur berada di kantor DPR/MPR. Entah karena alasan apa, massa kontra-Gus Dur yang jauh lebih besar itu, bergerak dari Istana Negara ke DPR/MPR.

Sebagai salah satu korlap saat itu, saya dan beberapa rekan mengambil keputusan untuk menghindar. Tensi politik

yang sedang memanas dan provokasi berbagai pihak, cukup menyadarkan saya akan kemungkinan terjadinya konflik fisik antardua massa, dan itu sangat tidak kami inginkan.

Kampus Atmajaya adalah pilihan evakuasi dan konsolidasi massa BEMI dan massa pendukung Gus Dur. Selain alasan jarak yang tak terlalu jauh dari kantor DPR/MPR, sambutan teman-teman BEM Atmajaya juga sangat *welcome* pada kami. Tidak disangka, ternyata massa kontra-Gus Dur merengsek ke Atmajaya juga. Mereka langsung memprovokasi, memersekusi, bahkan melakukan kekerasan fisik pada sebagian massa pro-Gus Dur yang terlambat dievakuasi.

Beberapa mobil di halaman parkir kampus Atmajaya juga dirusak dan dibakar. Sebagian dari kami melawan, beberapa orang korlap, termasuk saya, yang sudah dibekali doa-doa khusus (ilmu kebal) oleh kiai-kiai Jawa Timur, keluar dari kampus Atmajaya dan melawan. Tentu, perlawanan yang siasia, mengingat massa kontra-Gus Dur jauh lebih besar dan beringas. Sebagai pilihan terakhir, atas saran teman-teman BEM Atmajaya, kami dipindah dan dievakuasi ke Universitas Sahid melalui pintu belakang kampus Atmajaya.

Selang beberapa hari di Jakarta, ada informasi bahwa saya dipanggil KH. Abd. Mujib Manan, Sekretaris Pribadi Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagai mantan Dekan Fakultas Dakwah, senior sekaligus dosen saya di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, saya memang kenal dan dekat dengan beliau. Pak Mujib, begitu kami memanggilnya, mempersilahkan saya dan beberapa teman menghadap ke Istana Negara.

Di saat pertemuan itu, kami merasakan betul betapa tegarnya Gus Dur. Hal ini tercermin dari pesan yang Gus Dur sampaikan kepada kami, agar tidak melakukan tindakan-tin-

dakan anarkis, tidak terprovokasi dan sebisa mungkin segera kembali ke Jawa Timur dengan tertib dan aman. Persis sama dengan apa yang sering Gus Dur sampaikan, bahwa jabatan presiden tak perlu dibela hingga menumpahan darah orang Indonesia.

Toh, akhirnya kebenaran akan tampak; sejarah akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ternyata, setelah sembilan belas tahun, kebenaran itu benar-benar muncul dalam buku *Menjerat Gus Dur*.

Mihnah Gus Dur:
Menjerat Para Politisi dan Intelektual Pengkhianat Reformasi

Aksin Wijaya

Pengantar

MENJELANG berakhirnya tahun 2019, publik Indonesia diramaikan oleh munculnya dokumen rahasia permufakatan jahat penjatuhan KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur (29 Januari 2001) yang ditemukan oleh penulis muda bernama Virdika Rizky Utama. Dokumen ini kemudian menjadi data utama buku yang sangat fenomenal, *Menjerat Gus Dur*. Tidak hanya karena *timing* kemunculannya yang membuat publik Indonesia ramai membincang buku itu, yakni di bulan Desember yang disebut Bulan Gus Dur, yang bertepatan dengan haul Gus Dur yang ke 10, tetapi juga dan terutama adalah keberadaan orang-orang yang disebut di dalam dokumen permufakatan jahat itu serta ramalan Gus Dur atas mereka.

Gus Dur dijatuhkan oleh para politisi yang merasa terancam dari kekuasaan dan kehidupannya yang mereka nikmati selama berkuasanya pemerintahan otoriter Orde Baru. Dengan berbagai kebijakannya yang mendobrak kuatnya kekuasaan Orde Baru dan kroni-kroninya, sembari memberi ruang demokrasi yang luas kepada masyarakat banyak yang selama ini terpinggirkan, Gus Dur dijatuhkan dengan mem-*fraiming* kasus Bruneigate dan Buloggate yang tidak pernah terbukti itu. Terhadap tuduhan itu, Gus Dur memberikan pernyataan prediktif, "sejarah yang akan membuktikan".

Sekian lama (sekitar 18 tahun), publik Indonesia bertanya-tanya, apa maksud pernyataan Gus Dur itu. Setelah ditemukannya naskah permufakatan jahat itu baru semua orang memahami bahwa inilah maksud pernyataan Gus Dur itu.

Tulisan ini tidak akan menyajikan dimensi politik dari kisah penjatuhan Gus Dur ini. Masalah itu sudah diketahui publik, karena selama berjalannya peristiwa itu, berbagai media memberitakannya, baik yang pro maupun yang kontra. Bagitu juga, kisah politik suram itu sudah dinarasikan secara baik oleh Virdika di dalam bukunya yang fenomenal itu. Tulisan ini ingin menyingkap dimensi "tak terkatakan" di balik peristiwa *mihnah* (peradilan [sesat])[1] Gus Dur dan bagaimana naskah yang ditemukan Virdika itu justru "menjerat para pengkhianat Reformasi dan intelektual".

Mihnah Gus Dur ini mengingatkan saya pada berbagai kisah *mihnah* yang menimpa beberapa intelektual Muslim

1 Istilah "*mihnah*" biasanya disamakan dengan istilah "inkuisisi", yaitu peradilan yang digelar oleh otoritas agama [dalam praktiknya biasanya berkolusi dengan kekuasaan politik] terhadap ajaran seseorang yang dianggap menyimpang dari doktrin "resmi".

lainnya. Saya ingin memulai tulisan ini dari rasa heran saya atas tragedi (*mihnah*) yang menimpa para intelektual Muslim seperti Ahmad bin Hambal, al-Hallaj, Ibn Arabi, Suhrawardi, Mahmud Muhammad Thaha, Syekh Siti Jenar, dan Gus Dur. Mereka adalah para intelektual Muslim yang berpengaruh, namun menjadi korban konspirasi, fitnah dan *hoax*, baik oleh penguasa maupun para intelektual yang berselingkuh dengan penguasa.

Mereka dihukum dengan alasan yang bermacam-macam dan seringkali dipaksakan, baik alasan keyakinan, pemikiran, politik, maupun ideologi. Tulisan ini fokus pada: *pertama*, apa yang membuat beberapa intelektual Muslim berpengaruh itu dihukum oleh pemerintah atau oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya kaum intelektual, dan apa yang membuat mereka "bersedia" dihukum? *Kedua,* mengapa mereka menghukum Gus Dur, dan mengapa Gus Dur "membiarkan" dirinya dihukum secara politik?

Mereka Membiarkan Dirinya Dihukum

Banyak intelektual Muslim berpengaruh yang dihukum oleh para penguasa dan kaum intelektual yang berselingkuh dengan penguasa dengan alasan yang berbeda-beda, dan seringkali dipaksakan. Biasanya, mereka memulainya dari persoalan keyakinan dan pemikiran mereka yang melampaui zamannya, lalu memberi tuduhan sebagai intelektual yang kontroversial, sesat dan menyesatkan. Kesimpulan itu diambil dari ungkapan-ungkapan brilian yang "sulit dipahami" maksudnya oleh para intelektual yang berada di lingkungan kekuasaan, atau bisa dipahami namun dianggap membahayakan posisi mereka.

Para intelektual itu kemudian dituduh mengganggu keyakinan dan pikiran masyarakat pada umumnya.

Di antara intelektual Muslim berpengaruh yang menjadi korban itu adalah Ahmad bin Hambal yang menolak paksaan dari penguasa Muktazilah untuk mengakui kemakhlukan al-Qur'an; Ibn Araby dan al-Hallaj dengan ajaran *wujudiyah*-nya; serta beberapa intelektual Muslim lain. Para intelektual Muslim yang berada di lingkaran kekuasaan merasa absah menilai para intelektual Muslim yang otonom itu, sembari merekomendasikan kepada penguasa untuk menghukum mereka. Hukuman itu diyakini sebagai bentuk pelaksanaan perintah Tuhan, dan untuk menyelamatkan keyakinan dan pikiran masyarakat.

Saya tidak heran, bahkan sangat memahami peristiwa *mihnah* yang menimpa para intelektual Muslim otonom itu. Para intelektual yang berselingkuh dengan penguasa (Gus Dur menyebut mereka dengan istilah "intelektual tukang") sudah biasa melakukan berbagai manuver demi kekuasaan. Mereka menggunakan nalar kepentingan dan kuasanya dalam melihat sesuatu, bukan nalar pikirannya. Keyakinan dan pemikirannya justru digunakan untuk meraih kekuasaan. Karena kuatnya nalar kepentingan dan kuasa, siapa pun yang melawan kepentingan dan kekuasaan mereka harus disingkirkan. Cara yang paling ampuh adalah dengan menggunakan bahasa agama seperti sesat-menyesatkan, murtad, dan mengganggu keyakinan dan pemikiran masyarakat awam. Di sinilah, intelektualisme mereka digadaikan yang oleh Julian Benda disebut sebagai pengkhianat intelektual.

Yang membuat saya penasaran adalah mengapa para intelektual Muslim otonom yang namanya masih harum sampai

sekarang itu "membiarkan" dirinya dihukum oleh penguasa dan para pengkhianat intelektual? Bukankah para intelektual Muslim otonom itu bisa melakukan negosiasi agar terhindar dari hukuman sebagaimana biasa dilakukan para penguasa? Para intelektual otonom itu juga bisa menarik keyakinan dan pikirannya yang dituduh sesat dan menyesatkan itu. Misalnya, Ahmad bin Hambal bersedia mengakui kemakhlukan al-Qur'an, al-Hallaj dan ibn Arabi bersedia mencabut paham *wujudiyah*-nya.

Akan tetapi, mereka terkesan membiarkan dirinya difitnah, disesatkan dan dihukum atas alasan yang tidak mereka lakukan. Mereka mengorbankan raga dan nama baiknya yang dibangun selama bertahun-tahun selama masa hidupnya. Bahkan, di antara mereka ada yang sampai dihukum mati, misalnya, Suhrawardi yang dikenal dengan julukan Suhrawardi al-Maktul. Apa yang membuat mereka bersikap seperti itu?

Menurut saya, kesediaan mereka mengorbankan dirinya diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh penguasa dan para pengkhianat intelektual disebabkan oleh kekokohan mereka dalam memegang keyakinan dan pemikirannya. Mereka tidak mau mengorbakan pemikirannya dan kebenaran yang diyakininya demi kepentingan duniawi seperti jabatan politik. Sikap ini berbeda jauh dengan sikap para intelektual yang menjual prinsip-prinsip keyakinan dan pemikirannya demi meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Apakah para intelektual Muslim itu benar-benar mati, dan hilang dari sejarah sebagaimana jasadnya atau jabatannya? Ataukah, para pengkhianat intelektual itu yang terlempar dari sejarah? Di sini, lagi-lagi saya heran, karena kenyataan sejarah justru menunjukkan sebaiknya. Mungkin para penguasa dan

pengkhianat intelektual itu yakin, para intelektual Muslim otonom yang diperlakukan tidak adil itu benar-benar mati dan tersingkir dari sejarah.

Al-Qur'an menegaskan, para pejuang kebenaran yang mati syahid di awal kehadiran Islam itu sebenarnya tidaklah mati. Mereka hidup. Tentu saja, hidup yang dimaksud bukan hidup secara fisik, melainkan hidup secara spirit. Kendati raganya sudah lebur bersama tanah, pikiran-pikiran mereka masih hidup sampai kapan pun. Para syahid itu menginspirasi para intelektual Muslim belakangan sehingga muncul banyak pengikut yang menamakan diri dengan nama mereka.

Kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan para penguasa dan para intelektual yang menjual keyakinan dan pemikirannya demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kendati masih hidup, mereka bisa dikatakan sudah mati, atau diharapkan kematiannya, karena keberadaan mereka yang masih hidup itu bukan hanya dinilai tidak membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi justru dianggap mengganggu kehidupan masyarakat. Pada saat itulah, keberadaan mereka sama dengan tidak ada. Dalam bahasa Arab disebut "*wujuduhu ka 'adamihi*".

Gus Dur Membiarkan Dirinya Dilengserkan

Di Nusantara, tragedi *mihnah* seperti di dunia Islam abad pertengahan itu juga pernah terjadi, baik pada para intelektual Muslim Nusantara periode awal semacam Hamzah Fansuri dan Syekh Siti Jenar, maupun intelektual Muslim periode modern seperti Gus Dur. Dua intelektual muslim periode awal

itu dituduh sesat karena membawa paham *wahdatul wujud*[2] ke Indonesia. Hamzah Fansuri diadili para intelektual Muslim Sumatra dan Aceh, sedang Syekh Siti Jenar diadili oleh para wali di tanah Jawa.

Lalu, bagaimana dengan Gus Dur?

Gus Dur merupakan perpaduan sempurna dua pahlawan nasional: KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahid Hasyim. Perjalanan hidup Gus Dur menunjukkan sejarah intelektualisme yang kaya dan penuh warna. Selain mengenyam pendidikan tradisional semacam pondok pesantren, dia juga menikmati pendidikan tinggi di Timur Tengah. Dia juga mengalami hidup di lingkungan ideologi lain yang berseberangan secara diametral dengan tradisi pesantren dan NU, seperti Ikhwan al-Muslimin, Sosialisme Arab, Nasioanalisme Arab, dan Liberalisme Arab.

Gus Dur terbiasa membaca karya-karya lintas iman dan pemikiran, yang juga berseberangan secara diametral dengan tradisi keimanan dan pemikiran pesantren dan NU. Tidak mengherankan jika wawasannya begitu luas mencakup berbagai bidang kehidupan dan melampuai zamannya. Dia bisa disebut sebagai kyai, ulama' intelektual, budayawan, politisi, pelawak, hingga seorang humanis. Wawasannya yang luas itu tentu saja membuat Gus Dur melintasi ruang dan waktu, kendati juga muncul penolakan dari sebgian kelompok yang membawa agenda tersembunyi ke Indonesia, seperti kelompok Islam politik. Mereka ini tidak hanya mengkritik, tapi bahkan menganggap Gus Dur sebagai sesat. Misalnya, Gus

2 Secara sederhana, paham *wahdatul wujud* adalah paham tentang persatuan antara Tuhan dan makhluk, atau dalam Bahasa Jawa biasa disebut dengan istilah "*manunggaling kawula lan Gusti*".

Dur disebut sebagai pemikir muslim liberal, yang bukan hanya keluar dari tradisi NU dan Islam, tetapi juga merusak NU dan Islam; Gus Dur dituduh menyesatkan warga NU dan umat Islam Indonesia.

Aneh sekali rasanya. Gus Dur yang mengenyam pendidikan agama dari sumbernya yang utama, pesantren dan Timur Tengah, justru dituduh liberal dan sesat. Kebanyakan para penuduh itu justru sama sekali tidak mengeyam pendidikan agama secara memadai. Salah satu gagasannya yang dituduh liberal, namun original, adalah konsep "Pribumisasi Islam". Mengapa mereka marah dengan gagasan pribumisasi islam? Karena melalui gagasannya inilah Gus Dur mengkritik tendensi Arabisme dari sekelompok umat Islam Indonesia.

Gagasan pribumisasi Islam intelektual Muslim yang *nyeleneh* ini dibangun di atas tiga bangunan dasar: universalisme, kosmopolitanisme, dan pribumisasi. Universalisme Islam bersifat teoritis dan bertumpu pada prinsip *humanism*. Kosmopolitanisme Islam bersifat praktis dan bertumpu pada dialog Islam dengan peradaban-peradaban. Pribumisasi Islam merupakan hasil dari dialog Islam dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Islam pribumi sebagai kata benda dan hasil dari proses pribumisasi Islam ini merupkan perpaduan antara "Islamku" dan "Islam Anda" yang melahirkan "Islam Kita". "Islam Kita" adalah Islam pribumi, dan Islam pribumi adalah Islam kita. Untuk menjadi Muslim yang baik, tidak seharusnya orang Indonesia melepaskan identitas keindonesiaannya (kepribumiannya) lalu mengubah diri menjadi beridentitas Arab. Dengan tetap mempertahankan identitas keindonesiaan (kepribumiann), kita bisa menjadi Muslim yang baik.

Dengan gagasan pribumisasi Islam, Gus Dur menolak mempertentangkan Islam dan negara, karena keduanya bisa berjalan beriringan, berdialektika bahkan saling memberi inspirasi. Islam adalah urusan akidah, sedang negara urusan politik. Islam bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam berpolitik, baik politik praktis maupun politik kebangsaan. Dengan tetap ber NKRI, kita tetap menjalankan ajaran agama. Tidak harus mengubah bentuk negara menjadi khilafah untuk menjadi Muslim yang baik atau untuk menjalankan ajaran agama. Karena itulah, Gus Dur begitu gigih dalam memperjuangkan dan mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Ripublik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dikatakan, pribumisasi Islam adalah pijakan Gus Dur dalam merumuskan visi dan misi keislaman dan keindonesiannya.

Gus Dur adalah satu-satunya santri yang terpilih menjadi Presiden RI, suatu jabatan politik yang belum pernah terbayang di masyarakat Muslim tradisional. Rasanya tak terbayangkan ada seorang santri menduduki jabatan sebagai presiden. Kendati sebagai santri, Gus Dur memimpin Indonesia dengan visi yang jelas. Dia menjadikan kekuasaan sebatas sebagai alat untuk mewujudkan visinya. Visi yang dia perjuangkan adalah kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan. Misi utamanya menciptakan kedamaian, kemakmuran, dan keadilan seluruh warga negara, tanpa diskiriminasi.

Karena itu, wajar jika dia seringkali berseberangan dengan para elit politik yang hanya memiliki nalar kepentingan kekuasaan. Seperti dua kereta yang berjalan ke arah yang berbeda, koalisi mereka pada akhirnya akan pecah. Tidak mengherankan jika ketegangan sering terjadi antara idealisme

Gus Dur dengan pragmatisme mereka. *Ending*-nya adalah pelengseran Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden RI ke-4 oleh para politisi yang merasa terancam oleh idealisme politik Gus Dur.

Mengapa mereka melengserkan Gus Dur? Mengapa Gus Dur membiarkan dirinya dilengserkan? Kedua pertanyaan ini sepertinya biasa saja, tapi dua pertanyaan ini bisa menyingkap dimensi tak terkatakan di balik peristiwa pelengseran Gus Dur yang selama ini menjadi misteri. Dimensi tak terkatakan itu, di satu sisi berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelengseran Gus Dur, dan disisi lain dengan Gus Dur sendiri.

Jika kita membuka kembali lembaran sejarah pelengseran Gus Dur, akan kita temukan banyak isu yang dialamatkan kepada Gus Dur, terutama isu korupsi yang dikenal dengan istilah Bruneigate dan Buloggate. Karena kuatnya dan gencarnya para politisi yang pernah menikmati kekuasaan pada masa Orde Baru menuduh Gus Dur terlibat kasus korupsi itu, masyarakat awam yang awalnya meragukannya karena melihat integritas Gus Dur selama ini, lama-kelamaan meyakini isu penuh fitnah itu. Seolah Gus Dur benar-benar korupsi, dan layak diturunkan dari jabatannya sebagai presiden RI yang untuk pertamakalinya dipilih secara demokratis pasca-Reformasi. Secara politik, mereka berhasil melngserkan Gus Dur.

Akan tetapi, masyarakat yang cerdas dan menelusuri lebih jauh siapa yang melemparkan isu-isu itu, dan getol melengserkan Gus Dur, dengan mudah meragukan isu-isu penuh fitnah itu. Isu fitnah itu jelas sengaja dilontarkan demi kepentingan politik dan ideologi kelompok tertentu. Dikatakan bersifat politis, karena Gus Dur membuat keputusan berani dengan mencopot beberapa menteri kabinetnya yang berasal dari

Golkar dan PDI-P yang dinilai bermasalah. Gus Dur juga sedang membidik beberapa kasus korupsi para tokoh Orde Baru yang selama ini mengeruk kekayaan negara dan memiskinkan kehidupan rakyat. Dikatakan bersifat ideologis, karena para mantan penguasa Orde Baru itu bergandengan mesra dengan kelompok intelektual Muslim yang berideologi pragmatis.

Pembacaan masyarakat yang cerdas itu ternyata terbukti di belakang hari dengan ditemukannya naskah rahasia permufakatan jahat pelengseran Gus Dur oleh Virdika Rizky Utama pada tahun 2017 itu. Dari naskah rahasia inilah terungkap bahwa motif yang sebenarnya dari pelengseran Gus Dur adalah kepentingan politik kekuasaan dan ideologis, baik dari para politisi Orde Baru maupun beberapa intelektual Muslim yang berafiliasi pada HMI, misalnya, Akbar Tanjung, Fuad Bawazir, Amien Rais, Din Syamsuddin, Azyumardi Azra, Anas Urbaningrum, dsb.

Karena kekuasaan dan ideologinya terancam oleh kebijakan berani Gus Dur, mereka memutuskan untuk menjatuhkan Gus Dur. Namun karena sulit bagi mereka mencari celah kekurangan Gus Dur, mereka pun membuat fitnah dengan kasus korupsi Buloggate dan Bruneigate melalui pansus DPR; memanfaatkan lembaga keagamaan semacam MUI melalui Din Samsuddin sebagai pembenarnya melalui isu Ajinomoto; memanfaatkan kaum intelektual untuk menggerus keyakinan kaum intelektual seperti Azyumardi Azra, dan membeli gerakan mahasiswa di berbagai kampus yang berafiliasi pada organisasi mereka yang bernama HMI. Kendati tidak terbukti secara hukum atas tuduhan-tuduhan itu, mereka berhasil melengserkan Gus Dur, dan mengangkat Megawati menjadi presiden.

Yang fantastis lagi, hanya untuk melengserkan Gus Dur dari presiden, mereka menghabiskan dana sebesar empat triliun rupiah. Dana siluman itu tentu saja bukan milik mereka secara pribadi, melainkan milik sekelompok elit politik yang pernah merampok uang negara. Tidak ada artinya uang empat triliun rupiah itu jika Gus Dur masih berkuasa. Karena jika Gus Dur tetap berkuasa, bukan hanya empat triliun yang akan hilang dari mereka, melainkan juga kehidupan mereka, karena Gus Dur tidak akan berkompromi dengan para perampok uang rakyat itu. Karena itulah, demi uang dan kekuasaan, mereka menjual agama dan pemikirannya dengan melontarkan fitnah yang keji kepada Gus Dur.

Mengapa Gus Dur membiarkan dirinya dilengserkan?

Pertanyaan ini muncul di benak saya lantaran Gus Dur pernah ditawari untuk berbagi kekuasaan dengan Megawati, dan partai pendukungnya. Andaikan Gus Dur bersedia berkompromi, dia tidak akan dilengserkan, dan tetap menjadi Presiden RI sampai masa jabatannya habis. Anehnya, Gus Dur, sang pendekar demokrasi tidak mau berkompromi dengan mereka. Bagi Gus Dur, prinsip-prinsip demokrasi harus dipertahankan, dan tidak boleh digadaikan hanya demi mempertahankaan kekuasaan yang sifatnya sementara. Gus Dur juga tidak mau berkompromi dengan sekelompok orang yang hendak membela Gus Dur dengan syarat dia mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau Khilafah Islamiyah. Kuatnya Gus Dur berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan Islam pribumilah yang membuat cucu KH. Hasyim Asy'ari ini menolak kedua tawaran itu, dan membiar-

kan dirinya dilengserkan dari presiden. Dia tidak mau menggadaikan keyakinan dan pemikirannya demi kekuasaan.

Apakah Gus Dur hilang setelah dilengserkan?

Jawabannya tidak. Gus Dur masih tetap menjadi pendekar demokrasi di Indonesia. Dia tidak berubah, baik sebelum, saat, dan setelah menjadi presiden. Dia beraktifitas seperti biasanya, membela kemanusiaan dan keindonesiaan. Dia juga tidak hilang produktifitasnya dalam menuangkan gagasan-gagasannya, baik melalui seminar maupun tulisan. Bahkan beberapa bulan setelah tidak menjadi presiden, Gus Dur menelorkan karya fenomenal berjudul, *IslamKu, Islam Anda dan Islam Kita*. Ketika wafat pun, nama Gus Dur tetap harum. Masyarakat dari berbagai kalangan berziarah ke makamnya yang berada di Jombang dan bersanding dengan makam kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari.

Selain nama baiknya, yang juga fenomenal adalah gagasan-gagasannya. Kini, muncul gerakan GUSDURian di berbagai belahan kota di Indonesia yang memperjuangkan gagasan-gagasan Gus Dur. Mereka yang berasal dari lintas ruang dan waktu, warga NU maupun non-NU, Muslim maupun non-Muslim, aktif di gerakan GUSDURian ini. Karena semasa hidupnya melintasi ruang dan waktu, setelah wafat pun gagasannya yang brilian itu melintasi ruang dan waktu. Selain Soekarno dan KH. Hasyim Asy'ari, belum ada intelektual Muslim yang melahirkan gerakan semacam GUSDURian di Indonesia.

Di sisi lain, banyak di antara para intelektual dan politisi pengkhianat yang melakukan permufakatan jahat atas Gus

Dur yang sudah dilemparkan ke penjara dengan kasus korupsi, persis seperti yang mereka tuduhkan kepada Gus Dur, seperti Bactiar Hamzah, Anas Urbaningrum, Patrialis Akbar dan beberapa penghianat Reformasi lainnya. Ada juga politisi yang menjadi gelandangan politik persis prediksi Gus Dur.

Jadi, naskah rahasia permufakatan jahat penuh fitnah yang ditemukan itu pada ahirnya "menjerat mereka" dalam kubangan sejarah hitam. Mereka akan dikenang sebagai pengkhianat Reformasi dan intelektual, yang berpolitik dengan fitnah. Para pengkhianat itu boleh dimaafkan, tetapi tidak boleh dilupakan. Generasi kita tidak boleh melupakan pengkhianatan mereka, sehingga kita tidak melakukan penghianatan yang sama dengan mereka. Sejarah itu kejam, tetapi juga memberi pelajaran bijak bagi generasi mendatang. Sejarah berikutnya akan membuktikan.

Ini hanya ulasan singkat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan, jauh melebihi apa yang saya tulis dalam lembaran kertas ini.

Gus Dur, Megawati, dan Jeratan Oligarki [1]

Ahmad Zainul Hamdi

LIMA tahun sebelum Reformasi '98, tepatnya 10 Desember 1993, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerbitkan artikelnya yang berjudul "Megawati dan KLB PDI". Artikel yang terbit empat hari setelah Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (kini PDI-P), Surabaya 2-6 Desember 1993, yang berakhir kisruh itu jelas sekali berisi dukungan Gus Dur terhadap Megawati.

Artikel ini menunjukkan sikap resmi Gus Dur terhadap perlawanan Megawati bersama kelompoknya di PDI terhadap otoritarianisme rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Perlu diketahui bahwa dekade 80-an hingga 90-an awal merupakan puncak kekuasaan Orde Baru. Nyaris tidak ada tokoh dan kekuatan rakyat yang berani menantang rejim.

1 Tulisan ini sudah pernah diterbitkan NU Online dengan judul sama, 9 Januari 2020.

Awal 90-an, Gus Dur justru meletakkan dirinya sebagai pengkritik rejim yang paling keras. Ia muncul sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap pemerintah. Ketika nyaris semua intelektual Muslim berhasil dirangkul pemerintah melalui wadah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gus Dur bergeming, justru semakin memperkeras kritikan-kritikannya.

Seperti sengaja menantang, setahun setelah pendirian ICMI, tepatnya tahun 1991, Gus Dur mendirikan dan memimpin Forum Demokrasi (Fordem) yang bisa dianggap sebagai embrio kekuatan civil society di Indonesia. Di dalamnya, berkumpul para aktivis dan intelektual yang selama ini dikenal sangat kritis kepada rejim. Dari sini, dimulailah kisah pencekalan Gus Dur di mana-mana. Sebagai *icon* kekuatan oposisi, forum-forumnya selalu dipenuhi oleh pengunjung yang hadir dengan antusiasme sekaligus perasaan takut.

Dalam konteks inilah, dukungan Gus Dur terhadap Megawati harus didudukkan. Artikulasi politik keluarga Soekaro yang telah lama direpresesi oleh rejim Orde Baru pada akhirnya muncul melalui sosok Megawati. Ketika dalam sebuah KLB yang kisruh dan penuh kekerasan, Megawati yang dikehendaki mayoritas peserta Kongres hendak dijegal pemerintah melalui intervensi yang brutal, Gus Dur menunjukkan sikapnya melalui artikel di atas.

Ketika pemerintah tampak mau menerima keterpilihan Megawati sebagai Ketua Umum PDI tapi dengan memasang "orang-orang pemerintah" di sekitarnya, Gus Dur menulis: "Dari sudut pandangan pihak pemerintah ini secara objektif haruslah dikembangkan sikap untuk mengakomodasikan kenyataan faktual akan dukungan besar warga masyarakat ke-

pada putri Bung Karno itu. Artinya tidak hanya sekedar menerima dia sebagai ketua umum, melainkan memberikan porsi dan tempat yang layak kepada para pendukungnya. Tanpa hal itu, dalam praktek pemerintah telah mengingkari konstitusi PDI dan mencoreng Demokrasi Pancasila sendiri."

Bahkan, Gus Dur juga secara implisit mendorong Megawati agar tidak tunduk pada skenario "kompromi" yang ditawarkan rejim. Jika Megawati menerimanya, hal itu berarti "memberikan toleransi kepada oportunisme dan praktik-praktik politik kotor untuk tetap berkembang di lingkungan PDI."

Sejak saat itu, Gus Dur-Megawati tidak hanya menjadi sepasang sahabat, tapi juga *icon* gerakan *civil society* Indonesia. Gus Dur bergerak melalui NU dan Fordem-nya, Megawati menggalang perlawanan melalui PDI-nya. Kedekatan dua orang ini tetap terjaga hingga detik-detik akhir kekuasaan rejim Orde Baru yang akhirnya tumbang oleh gelombang Reformasi 1998. Bersama dengan Amien Rais, mereka bisa dikatakan sebagai imam dari gerakan Reformasi saat itu. Sejarah akhirnya mencatat, Gus Dur dan Megawati berpasangan menjadi presiden dan wakil presiden, sedang Amien Rais menjadi ketua MPR.

Sebuah *ending* yang indah bukan? Sayangnya, ini bukan akhir kisahnya. Berkali-kali, Gus Dur menyatakan bahwa dalam politik, tidak ada kawan abadi, karena yang abadi adalah kepentingan. Karena kepentingan itulah pertemanan antara Gus Dur dan Megawati pecah di tengah jalan. Buku *Menjerat Gus Dur* yang ditulis Virdika Rizky Utama telah membuka bagaimana kepentingan oligarki yang diorkrestrasi oleh Fuad Bawazir, Akbar Tanjung, Amien Raies, Arifin Panigoro dan sisa-sisa kekuatan rejim Orde Baru lain akhirnya berhasil "mem-

bujuk" Megawati untuk hadir di MPR guna menjungkalkan sahabat yang telah lama mendukung dan melindunginya.

Huntington dalam *Political Order in Changing Societies* menyatakan, transisi politik pasca-reformasi penuh dengan risiko. Tidak jarang transisi politik pasca-reformasi tidak mengarah pada demokrasi, tapi justru kembalinya otoritarianisme lama dalam bentuk baru. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kekuatan masyarakat tidak terorganisir secara baik, bahkan tidak jarang antarkelompok dalam masyarakat memiliki isu dan kepentingan politik sendiri-sendiri yang saling bertentangan. *Kedua*, kekuatan rejim lama beserta infrasturuktur politik yang menopangnya serta nilai-nilai politik yang menjadi basis ideologisnya masih ada. Kekuatan lama sewaktu-waktu masih bisa mengkonsolidasikan kekuatannya kembali dan kemudian membelokkan arah reformasi.

Buku Huntington yang terbit di awal 70-an itu seakan secara khusus ditulis untuk menggambarkan wajah politik Indonesia pasca-Reformasi '98. Kekuatan reformis menyimpan kepentingan politiknya sendiri-sendiri yang bahkan sama sekali tidak terkait dengan agenda reformasi politik. Sementara kekuatan rejim lama tidak hanya berhasil mengkonsolidasi kekuatannya kembali, namun juga bersekutu dengan sebagian kelompok reformis untuk membajak reformasi dengan iming-iming kekuasaan sekalipun hal itu berarti menoleransi oportunisme dan berbagai praktik politik kotor.

Di dalam artikel yang sama, Gus Dur menulis sebuah kalimat yang terasa sangat profetik: "Efektivitas 'arus bawah' dalam percaturan politik kita ternyata masih belum dapat menandingi 'pola pembinaan' yang diterapkan oleh aparat pemerintah atas gerakan kemasyarakatan."

Bagian Dua

SEDIH

Luka ini Bukan karena Dikalahkan, Melainkan karena Dikhianati

Fawaizul Umam

GUS DUR itu "jimat" NU. Demikianlah sebutan populer yang diungkap KH Muchit Muzadi dan KH M. Cholil Bisri ke publik saat merespons politisi Poros Tengah yang bersikeras mendorong Gus Dur jadi presiden sekaligus merayu simpati NU menjelang Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999. Dimaksudkan sebagai *warning* agar tidak mempermainkan Gus Dur karena di kalangan Nahdliyin ia laksana "jimat", diyakini bertuah sebagai mata air kearifan dan inspirasi kebenaran, tuah yang tak pernah lekang oleh panas dan dilapukkan hujan.

Sebutan itu tidaklah berlebihan. Hingga kini, tidak ada tokoh NU yang begitu dimuliakan, disayang, diistimewakan, dan dicintai seperti Gus Dur. Cinta terhadapnya bahkan tidak hanya datang dari kaum Nahdliyin di mana ia didekap dan dihayati seperti "jimat", tetapi juga berasal dari berbagai kalangan lintas etnis dan agama. Ketika wafat pun, cinta kepadanya terus mengalir.

Inilah sepotong kisah getir tentang cinta yang otentik dan bagaimana ia diekspresikan. Cinta yang tak sederhana dari orang-orang sederhana kepada sang guru bangsa yang penuh kesederhanaan, Gus Dur. Di suatu waktu, di paruh awal 2001. Di suatu tempat, di kawasan utara ujung timur Pulau Jawa.

Kisahnya mengajak kita menengok serangkaian peristiwa beraroma politis yang berlangsung pada paruh awal 2001 di sepanjang wilayah Situbondo-Banyuwangi, tepatnya di sebuah kecamatan tempat aku dilahirkan. Wilayah di mana orang-orang sederhana itu bermukim, orang-orang yang oleh euforia Reformasi 1998 berkesempatan punya kebanggaan tentang arti memiliki seorang presiden. Tak aneh, mengingat yang menjadi presiden kali ini ialah KH Abdurrahman Wahid, sosok kinasih yang berasal dari kalangan mereka sendiri, kaum Muslim tradisional.

Sedihnya, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Tak sampai setahun Gus Dur terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden RI oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 20 Oktober 1999, pemerintahannya terus menerus dilemahkan justru oleh kelompok yang semula bersikeras menggadang-gadangnya, Poros Tengah *wa alihi wa shohbihi*. Perasaan dipermainkan dan dikhianati tentu saja meruap, tidak hanya di kalangan kiai dan pesantren, tetapi juga berkecambah di tengah mereka.

Kebahagiaan itu perlahan memalih rupa menjadi kesedihan dan kemudian menjadi gelegak amarah yang mendidih. Melalui pelengseran Gus Dur, kaum tradisional itu dipaksa mengkhidmati luka pengkhianatan, setelah dipanggul-panggul lalu dijungkalkan. Keluguan mereka dalam memaknai kebahagiaan politis yang berakhir cepat itu ternyata harus dibayar mahal.

Bulan-bulan di paruh awal 2001 itu memang melelahkan. Konstelasi politik nasional di rentang waktu itu terus memanas gegara *ontran-ontran* politik yang berujung pemakzulan Gus Dur dari kursi kepresidenan sebagaimana akhirnya terkonfirmasi oleh buku *Menjerat Gus Dur* karya Virdika Rizky Utama. Hampir di setiap momen, cerita "kewalian" Gus Dur dan ancaman pelengseran terhadapnya selalu menjadi tema bincang utama. Aroma kesedihan dan kebencian dan juga ketakberdayaan campur aduk mencipta kegetiran. Mereka, orang-orang sederhana, itu berupaya menunjukkan cinta kepada Presiden Gus Dur, sang "jimat NU". Mengekspresikannya dengan cara khas kebatinan kalangan bawah.

Suasana kebatinan itu pada gilirannya diejawantahkan dalam aneka rupa perlawanan. *Rerasan*, menebar spanduk, berdemo adalah cara mereka merawat cinta dan rasa hormat pada sang "jimat" tersebut. Sebagian ekspresi pada akhirnya memang anarkis, dan karena itu kontraproduktif. Namun, itu "hanyalah" ekspresi dari rasa cinta terhadap Gus Dur, ekspresi yang lahir dari ketidakberdayaan di hadapan "permainan" para elite bebal di Jakarta sana.

Di bulan-bulan itu, demonstrasi memang berlangsung di mana-mana, di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi dan Situbondo. Para pendemo yang oleh media massa diidentifikasi sebagai massa "pro-Gus Dur" terus berusaha melawan upaya sistematis pelengseran atas Gus Dur dari kursi presiden. Pada saat yang sama, demo kontra yang bersetuju siasat pelengseran juga terjadi di sejumlah daerah, tetapi sama sekali tidak pernah berlangsung di dua kabupaten tersebut. Wajar, karena kedua kabupaten itu adalah salah dua basis utama pendukung Gus Dur yang *notabene* kantong utama Nahdliyin tapal kuda.

Khusus di tanah kelahiranku, Banyuwangi, lebih khusus lagi di kecamatanku, situasi keseharian saat itu memang terasa hangat cenderung panas. Kejengkelan menjalar dari forum-forum pengajian, even *hajatan*, dan juga membuncah di momen-momen *rerasan* sambil lalu usai *tahlilan*. Orang-orang riuh membincang Gus Dur dengan penuh getir. Juga geram.

Seiring memanasnya eskalasi, kejengkelan itu lalu tumpah di jalanan. Selain dalam bentuk demo, juga tertuang di bentangan spanduk-spanduk. Di sejumlah ruas jalan di Banyuwangi, termasuk kecamatanku, hingga Situbondo kala itu, banyak bertebaran spanduk heroik mendukung Gus Dur. Sebagian berbalut kemarahan, sebagian lagi bernada humor. Semuannya berpangkal pada rongrongan konspiratif tiada henti para elite di Jakarta terhadap pemeritahan Gus Dur yang masih seumur jagung.

Saat itu, aku sudah berada di Lombok NTB (Nusa Tenggara Barat), menjalani tahun pertama sebagai dosen di IAIN Mataram sejak Maret 2000. Namun, situasi yang terus memanas itu memaksaku sering pulang, sebulan sekali, bahkan belakangan menjadi seminggu saat eskalasi kian memanas. Apalagi Ayah sering meneleponku, memintaku pulang jika mungkin. Ia seorang Rais Syuriah MWC (Majelis Wakil Cabang) NU (Nahdlatul Ulama) kecamatan setempat yang juga sangat aktif memfasilitasi berdirinya kepengurusan DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sebuah partai politik besutan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Di bulan-bulan itu, beliau juga selalu bersemangat mengajakku berbincang tentang NU, pesantren, soal *khittah*, PKB, Gus Dur, Buloggate-Bruneigate, memorandum, ancaman Sidang Istimewa MPR, dan *last but not least*...Amien Rais.

Hari-hari menjelang dan sesudah dilayangkannya Memorandum I DPR terhadap Presiden Gus Dur, semakin banyak saja tamu ayah berdatangan ke rumah. Biasanya yang bertamu wali santri atau orang-orang yang meminta doa atau nasihat untuk problem-problem keseharian mereka. Saat itu, para tamu tidak hanya kiai-kiai atau pengurus NU setempat, tetapi juga para politisi lokal. Diskusi-diskusi sering berlanjut hingga tengah malam. *Gayeng*. Diskusi tak kalah *gayeng* juga berlangsung di serambi masjid pesantren di mana anak-anak muda berkumpul. Di situ pula aku bergabung.

Anak-anak muda itu, seiring kian memanasnya situasi, memang semakin banyak berganti-silih datang bertamu. Aku tidak tahu pasti apakah mereka berasal dari Banser atau Ansor atau Garda Bangsa PKB. Mereka lebih suka menyebut diri Pasukan Berani Mati (PBM). Aku juga tak tahu pasti apakah secara struktural mereka memang terkoordinasi dengan KH Nuril Arifin, Panglima PBM, komunitas yang sangat militan membela Gus Dur. Aku tak berminat menanyakannya kala itu. Yang pasti, suasananya memang agak mencekam seperti masa "teror ninja" di kurun antara Februari-September 1998.

Pada saat "teror ninja" dulu, anak-anak muda juga berdatangan. Minta "diisi", biar kebal senjata melawan ninja, lalu berjaga di lingkungan pesantren siang-malam. Menurut seorang sepuh tetangga pesantren, suasananya sepintas seperti menyambut perang, menegangkan. "Mirip seperti 1965 dulu, mau merangi orang-orang Gestapu," katanya. Mungkin penggambarannya agak berlebihan, tapi aku tahu betul para tetamu saat berdiksusi lebih sering pasang muka serius diliput amarah ketimbang *guyon* tertawa-tawa seperti biasa.

Aku sendiri, setiap kali pulang ke Banyuwangi, selain menemani *jagongan* diskusi anak-anak muda itu juga semakin sering dimintai "kata-kata" provokatif untuk ditorehkan di spanduk-spanduk yang hendak mereka bentangkan di jalan-jalan. Pimpinan anak-anak muda itulah yang memintaku. Dengan senang hati kupenuhi. Mereka menuliskannya di spanduk-spanduk dengan sapuan kuas kasar. Kata mereka, biaya pembuatannya berasal dari hasil "bantingan" antarmereka sendiri. Diksi yang kupilihkan umumnya bernada *satire* atau sindiran-sindiran kocak. Namun, belakangan, mereka lebih "mandiri" dalam membuat spanduk. Diksi mereka cenderung penuh amarah, menantang, bahkan mengancam.

Kemarahan betul-betul memuncak setelah DPR melayangkan Memorandum I kepada Presiden Gus Dur pada 2 Februari 2001. Tumpah ruah di jalanan. Hari-hari setelah itu, demo semakin sering berlangsung, baik di Situbondo maupun Banyuwangi. Nyaris tiap hari. Dan lebih panas tinimbang aksi-aksi penolakan terhadap kerja Panitia Khusus (Pansus) Buloggate-Bruneigate yang marak sebelumnya.[1] Kini aksi tidak lagi terpusat di DPRD setempat, tetapi sudah berwujud aksi-aksi blokade ruas jalan-jalan utama di dua kabupaten itu dan juga aksi melumpuhkan Pelabuhan Ketapang semakin sering terjadi.

---

1 Pansus ini resmi dibentuk DPR pada Rapat Paripurna tanggal 5 September 2001. Dimaksudkan untuk mengusut lebih lanjut apa yang oleh para politisi DPR sebut kasus korupsi di Bulog dan hadiah dari Sultan Brunei Darussalam di mana Presiden Gus Dur mereka tuduh terlibat di dalamnya. Pansus ini hanya dijadikan pintu masuk bagi DPR untuk memberi sanksi politis berupa *impeachment* terhadap Gus Dur. Sementara secara hukum, tuduhan itu sama sekali tidak pernah terbukti, bahkan hingga Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, sehingga pelengseran dirinya merupakan tindakan politik inkonstitusional.

Kiai-kiai setempat semakin sibuk meredam situasi. Merekalah yang sejauh itu mampu meredam massa agar aksi-aksi itu tak berujung anarkis. Kala itu, aparat keamanan nyaris tak berdaya. Cenderung hanya diam menonton; boleh jadi tak menyangka gelombang amarah massa begitu dahsyat. Dan aksi-aksi sedemikian merata di banyak daerah, tidak hanya di dua kabupaten tersebut.

Menanggapi aksi-aksi yang kian cenderung memanas tersebut KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, mengaku bahwa PBNU tidak mampu lagi mengendalikan warga Nahdliyin yang marah. Menurutnya, situasi seperti itu hendaknya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menuntaskannya secara arif dan bijaksana. Ia juga menghimbau agar Sidang Istimewa MPR (sebagai konsekuensi lanjut Memorandum DPR) tidak perlu digelar. "Jika SI sampai digelar, dapat dikatakan DPR sebagai muara segala konflik yang terjadi!" tandasnya kala itu.[2]

Di dua kabupaten tersebut, hari-hari setelah Memorandum DPR memang mencekam. Jalan protokol sepanjang Situbondo, terutama di zona timur, hingga Banyuwangi belahan utara diblokade massa. Pepohonan sepanjang tepi jalan ditebangi dan dibiarkan melintang menutup jalan.[3] Akibatnya, arus lalu lintas Surabaya menuju Bali via Situbondo lumpuh total. Saat itu arus lalu lintas terhenti di Situbondo dan ter-

2 Lihat "Ribuan Massa pro-Gus Dur Turun ke Jalan" dalam https://www.liputan6.com/news/read/ 7580/ribuan-massa-pro-gus-dur-turun-ke-jalan (diakses 19 Januari 2020).

3 Lihat "Laporan Utama: Tumpas Kelor Robohkan Beringin" dalam http://arsip.gatra.com/2001-02-17/majalah/artikel.php?id=45192 (diakses 18 Januari 2020).

paksa dialihkan lewat Jember via Bondowoso. Alternatif jalur lain ialah Surabaya lewat Lumajang menuju Jember kemudian ke Banyuwangi (Pelabuhan Ketapang), atau setiba di Besuki, Situbondo, mau tak mau harus ambil jurusan Arak-Arak menuju Bondowoso lalu ke Jember dan berlanjut ke Ketapang.

Sehari dua hari pengalihan tersebut lancar. Namun, di hari berikutnya, aksi tebang pohon ternyata juga menular ke Banyuwangi belahan selatan. Sejumlah ruas jalan menuju Banyuwangi dari arah Jember tertutup oleh puluhan batang pohon yang dipasang melintang membarikade jalan. Akibatnya, jalur Jember-Banyuwangi juga lumpuh total sehingga jalur menuju ke Pelabuhan Ketapang dari arah selatan juga praktis lumpuh.

Aksi blokade jalan bermula di Situbondo. Adalah KH Achmad Fawaid As'ad, Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang menjadi motor utamanya. Kita tahu, Kiai Fawaid adalah salah satu kiai muda pendukung militan Gus Dur. Di bulan-bulan itu, dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menemani dan selalu berada di sisi Gus Dur. Sebagai putra kiai kharismatik KH As'ad Syamsul Arifin, inisiasinya didukung dan dengan cepat diduplikasi oleh para pecintanya, khususnya di kawasan Situbondo dan Banyuwangi. Dua kabupaten ini, tak terkecuali masyarakat di kecamatanku, memang basis utama santri, alumni, dan simpatisan Pesantren Sukorejo.

Awalnya, blokade dilakukan dengan menghelat *istighatsah* di tengah jalan. Lalu, entah kenapa dan tak jelas siapa yang menyuruh, di hari-hari berikutnya, blokade *istighatsah* tersebut berubah menjadi aksi tebang pohon dan melintangkannya di tengah jalan. Aparat keamanan tak berdaya mencegah, apalagi menangkapi. Ketika terdengar desas-desus Kiai

Fawaid bakal ditangkap untuk dimintai tanggung jawab atas aksi-aksi tersebut, orang-orang sederhana itu kembali turun ke jalan dan santer menebar ancaman, "Jangankan sampai ditangkap, menyentuh sedikit saja kulit *tang keaeh* (bhs. Madura, kiai saya), Situbondo-Banyuwangi pasti banjir darah."[4] Dan kita tahu, Kiai Fawaid tetap leluasa bepergian menemani Gus Dur ke berbagai tempat.

Pada saat itu, Pelabuhan Ketapang yang merupakan satu-satunya pintu penyeberangan terdekat dari Banyuwangi (Jawa) ke Gilimanuk (Bali) juga tak luput dari aksi blokade massa.[5] Ratusan anak muda yang mendaku massa Pasukan Berani Mati memblokade pelabuhan yang berjarak sekitar 15 kilometer ke selatan dari tempatku tinggal. Mereka menduduki pelabuhan dan melakukan *istighatsah*. Akibatnya, arus lalu lintas penyeberangam menuju Bali dan sebaliknya terhambat. Lumpuh total. Kemacetan mengular hingga ke Bangsring, sebuah desa di utara Banyuwangi, sekitar 15 km dari Pelabuhan Ketapang. Mereka mengaku, aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap upaya sejumlah elite politik di Jakarta yang terus menerus merongrong dan mendesak Gus Dur mundur.

Gus Dur sendiri selaku presiden menyesalkan insiden pemblokiran jalan dan pelabuhan, apalagi aksi tebang pohon. "*Ngapain* ngerusak-rusak. Selesaikan dengan proses demokrasi saja," ujarnya. Selain menyesalkan, Gus Dur juga meminta

4 Berdasar kesaksian KH Muhyiddin Abdusshomad, Pengasuh PP Nurul Islam Jember, saat menyampaikan manaqib *almaghfurlah* KH Fawaid As'ad pada acara Haul Majemuk Masyayikh Pesantren Sukorejo Situbondo pada 13 Januari 2020 tempo hari.

5 Lihat "Pendukung Gus Dur Menduduki Gedung Rakyat" dalam https://www.liputan6.com/news/ read/9563/pendukung-gus-dur-menduduki-gedung-rakyat (diakses 18 Januari 2020)

aparat keamanan menindak tegas aksi massa yang merusak, bahkan Gus Dur telah memerintahkan agar para pengurus PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) se-Indonesia bisa menenangkan massanya di daerah masing-masing.[6] Akhirnya, guna meredam situasi, polisi meminta para kiai untuk mencegah massa terus beraksi anarkis.

Setelah Gus Dur positif dilengserkan pada 23 Juli 2019, situasi panas mencekam justru mereda, mendingin, termasuk di kawasan Banyuwangi dan Situbondo. Hal itu dimungkinkan karena PBNU dan para pengurus PWNU di daerah-daerah aktif menginstruksikan warganya untuk menahan diri. Dalam hal ini peran para kiai dalam meredam aksi-aksi kemarahan kaum Muslim tradisional itu sangatlah signifikan. Demikian pulalah yang dilakukan sejumlah kiai di Situbondo dan Banyuwangi, termasuk di kecamatanku. Mereka sangat aktif menenangkan massa di banyak tempat dan forum.

Di kediaman Ayahku sendiri, hingga dua atau tiga hari setelah Gus Dur dimakzulkan, para tetamu masih banyak berkumpul di rumah hingga larut malam. Juga anak-anak muda itu. Sejumlah kiai bergantian hadir. Juga beberapa politisi PKB setempat. Anak-anak muda meriung di pintu, teras, dan serambi masjid. Tegang menunggu "komando" para kiai. Amarah dan kecewa masih membayang kuat di wajah mereka.

Menjelang tengah malam, seorang kiai sepuh panutan tiba membawa "komando" itu. Sejumlah pengurus NU setempat menemani. Ia meminta ayahku untuk menyampaikan "komando" itu ke para hadirin. Namun, ayah mempersilakan

6 Lihat "Dihentikan, Aksi Penebangan Pohon di Stubondo" dalam https://nasional.tempo.co/read/ 24001/dihentikan-aksi-penebangan-pohon-di-situbondo/full&view=ok (diakses 19 Januari 2020).

sang kiai untuk menyampaikannya sendiri di hadapan mereka. Dan pesan "komando"-nya jelas, hadirin diminta pulang, kembali ke rumah masing-masing. Diminta bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun, hadirin bergeming. Para kiai yang hadir terdiam menunduk. Ruang tamu terasa panas. Aku, yang duduk *ndomprok* di samping kursi ayah, hanya bisa ikutan diam. Beberapa tamu terdengar terisak. Anak-anak muda di luar mendengung kesal. Lalu, pelan-pelan hening.

Sungguh, andai kalian juga hadir di situ, aku yakin engkau tak akan kuat membendung air mata. Melihat para kiai yang mencoba tegar, helaan nafas, isak tangis, dan wajah-wajah tak rela memendam amarah dari anak-anak muda itu sungguh mengiris hati. Andai karena kekalahan, luka yang ditimbulkan tak akan sedalam ini. Ini bukan kekalahan. Ini pengkhianatan. Perasaan telah dipermainkan begitu kuat terasa. Makanya luka dan kecewa yang ditimbulkannya sungguh tak terperi.

Sambil menahan tangis, sang kiai sepuh menghiba memohon-mohon agar hadirin pulang. Meminta mereka untuk menyudahi kemarahan dan belajar mengikhlaskan. Di ujung *tawshiyah*-nya, ia berkali-kali berupaya meyakinkan hadirin bahwa ada yang lebih penting dari politik dan kekuasaan, yakni kemanusiaan. Ia juga berkali menyebut bahwa tidak ada jabatan politik di dunia ini yang pantas dipertahankan mati-matian, apalagi sampai harus menumpahkan darah. Belakangan baru aku tahu bahwa itu semua bagian dari ucapan Gus Dur untuk mendinginkan massa yang terus bergolak panas di banyak daerah kala itu.

Tepat ketika *tarhim* penanda sepertiga malam terakhir dikumandangkan santri dari *loud speaker* masjid, hadirin satu

demi satu pamit undur diri beranjak pulang. Beberapa anak muda masih bertahan terduduk lesu di emperan masjid pesantren. Aku sempatkan menemani mereka. Mereka tak lagi antusias mengajakku diskusi. Kami lebih banyak diam. Hingga Subuh menjelang.

Duh, andai saja kiai-kiai tidak bergerak meredam, aku yakin darah pasti tumpah. Dan kita bisa menduga ke mana dan kepada siapa ujung kemarahan itu mengarah!

***

Berminggu-minggu setelahnya, ayah lebih banyak diam. Masih tetap menerima tamu, tetapi sepertinya menghindari obrolan politik. Di ruang tamunya, ia tetap membiarkan foto Gus Dur dalam pose Presiden RI terpajang. Baginya, Presiden RI tetaplah Gus Dur. Ia tetap meyakini bahwa pelengseran Gus Dur tidak sah karena prosesnya inkonstitusional. Belakangan, ia memutuskan mundur dari Dewan Syura DPAC PKB setempat dan memilih hanya fokus berkhidmat di Syuriah MWC NU dan kepengurusan MUI kecamatan setempat hingga wafatnya pada 31 Maret 2009.

Begitulah sepotong kisah tentang bagaimana orang-orang sederhana mengekspresikan cinta mereka yang tidak sederhana kepada Gus Dur, sosok penuh kesederhanaan. Mereka membela Gus Dur, melawan aniaya konspiratif para politisi yang bersikeras melengserkannya. Bukan semata karena ia Presiden RI yang sah, tetapi juga karena Gus Dur adalah "jimat" NU tercinta yang terus-menerus dianiaya.

Dengan cinta yang tak sederhana, orang-orang sederhana itu sudah melawan. Mereka telah melakukan perlawanan, kurang-lebih seperti ungkapan Nyai Ontosoroh kepada

Minke, dua tokoh rekaan Pramoedya Ananta Toer di halaman terakhir *Bumi Manusia*: “Kita sudah melawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Sang Pembela yang Tidak Dibela

M. Said Hudaini

SUATU hari, ketika Pak Harto masih berkuasa, Gus Dur pernah terlihat datang sendirian ke Istana Negara. Turun dari bajaj sambil menenteng sebuah map hijau, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini berniat menemui sang Presiden. Bambang Semedhi, wartawan senior TVRI yang ditugaskan di Istana kala itu, penasaran apa kiranya urusan Gus Dur sampai harus datang sendiri menemui Soeharto. Apalagi, seingat Bambang, pemandangan semacam ini tidak hanya sekali. Ada beberapa kali ia melihat cucu Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari itu melakukannya. Dalam hematnya, pastilah itu urusan penting, bukan sekadar *kaleng-kaleng*.

Usut punya usut, Gus Dur ingin menghadap Pak Harto untuk meminta izin pendirian stasiun radio dan televisi NU. Apa keinginan Gus Dur itu dikabulkan? Ya jelas tidak. Gus Dur adalah vokalis gerakan prodemokrasi yang bukan hanya tak disukai, tapi juga beberapa kali terbukti ingin disingkirkan

dari gelanggang oleh Pak Harto. NU juga bukan Ormas anak manis di mata penguasa Orde Baru. Dan yang lebih penting, di era awal dan pertengahan 90-an, izin pendirian televisi bisa turun jika dan hanya jika yang menyodorkan proposal adalah anak dan kroni Soeharto. Siapa tidak tahu ada Mbak Tutut di balik Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), ada tangan Bambang Trihatmodjo di dalam Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan Surya Citra Televisi (SCTV). Semua orang mafhum soal itu.

Permit untuk pendirian stasiun radio dan televisi NU memang tidak pernah turun. Saya *haqqul yaqin* Gus Dur sudah tahu risiko gagal ini sejak niatan menemui Soeharto hadir di benaknya. Sikap ngototnya adalah pelajaran bagi kita semua bahwa perjuangan menuju kemerdekaan pers harus ditempuh. Urusan ini bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan hal yang harus diupayakan terus menerus. Sebab, mustahil memimpikan demokrasi yang kokoh dalam suasana pers yang dipasung dan sakit-sakitan.

Allah Maha Baik kepada bangsa ini sehingga menakdirkan Gus Dur menjadi presiden. Dengan begitu ia bisa melikuidasi Departemen Penerangan. Pers pun bersorak gembira. Maklum, siapapun tahu fungsi dan kekuatan departemen ini di masa Soeharto. Menjadi mesin propaganda (*government opinion*) dan alat kontrol terhadap penyelenggaraan pers sehari-hari. Departemen yang pernah dipimpin Ali Moertopo ini terkenal dengan semboyan "Api Nan Tak Kunjung Padam". Di tangan Gus Dur, departemen yang dosa terbesarnya adalah memonopoli kebenaran ini akhirnya padam juga. Sembari berkelakar, Gus Dur pernah bilang, "Seperti Tuhan saja, tidak bisa padam. Sini tak tiup, mati sudah."

Gus Dur sungguh-sungguh menyayangi pers dan menghargai kebebasannya. Sebagai presiden, ia tidak menggunakan tangan kekuasaan untuk membredel pers *ngawur*, mencekal lawan-lawan politik yang menghujatnya di muka umum, dan membiarkan saja televisi yang menyiarkan orasi-orasi yang menghina cacat fisiknya. Semua *looss* saja tanpa restriksi. Gus Dur menganggap kecil urusan-urusan macam begitu. Sejauh yang dihina dan dipojokkan adalah diri pribadi, Gus Dur bergeming dan menganggap itu risiko kecil dari mimpi besar menuju pers Indonesia yang merdeka.

Membangun kemerdekaan pers adalah membangun kebiasaan bebas berbicara dan menyatakan pendapat. Beberapa kali Adi M. Massardi, juru bicara presiden, mengingatkan agar Gus Dur membatasi diri dan mengingatkan DPR yang kelewat batas dalam melakukan kritik kepada presiden. Tapi apa jawab Gus Dur? "Sudahlah biarkan saja. Mereka baru saja berlatih untuk berani berbicara. Kalau sekarang kita gertak lagi, mereka pasti akan mundur lagi."

Sikap *woles* Gus Dur terhadap pers tidak selamanya bisa dianggap seperti hujan yang senantiasa membawa berkah. Pers bebas yang Gus Dur bela ada kalanya menjadi banjir bandang yang merepotkan. Dan di kemudian hari terbukti, pers turut serta membantu para politisi *kapiran* untuk mem-*bully* dan merongrong kekuasaannya. Kita bersyukur atas keberanian Virdika Rizky Utama untuk menulis fakta sejarah dalam *Menjerat Gus Dur*. Itu mengafirmasi tali-temali kepentingan para politisi, oknum pers, dan pengusaha yang ingin menjungkalkan Gus Dur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Desain besar para elite politik nakal kala itu tak bakal memuluskan langkah pemimpin tanpa kompromi macam Gus

Dur. Seperti kata Gus Mus, yang memilih Gus Dur menjadi presiden adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Kalau tak percaya, belahlah dada satu persatu tokoh Poros Tengah yang kala itu mendukung Gus Dur. Jika tidak ada kepentingan politik yang jauh lebih besar, tentu hati kecil mereka tidak akan sungguh-sungguh mengatakan "iya". Catatan Bondan Gunawan, dalam *Hari-hari Terakhir Bersama Gus Dur* mengafirmasi kebenaran fakta ini. Usaha merongrong kekuasaan Presiden Gus Dur sudah dimulai sejak seratus hari pertama ia dilantik. Bondan menyebut Amien Rais sebagai tokoh yang paling awal mem-*bully* Gus Dur terkait program 100 hari presiden.

Lewat sejumlah media, mantan Ketua PP Muhammadiyah dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu bicara bahwa pemerintahan Gus Dur tidak memiliki konsep program yang jelas pada 100 hari pertama pemerintahannya. Padahal, secara konstitusi, Indonesia tidak mengenal penilaian kinerja pemimpin yang dibingkai dalam persepsi keberhasilan 100 hari kerja pertama. Konsep itu dicomot secara serampangan dari cara Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt saat menyelesaikan urusan di negaranya. Tapi siapa peduli, urusan sudah kepalang basah. Isu ini sudah menjadi santapan pers dan bergerak seperti air mengalir sampai jauh.

Sepintas kita bisa mencurigai bahwa suasana ini muncul karena greget dan selera pers kita terdegradasi pasca-kehilangan musuh bersama bernama Orde Baru. Pers kita menjadi *kemaruk* dengan kebebasannya sehingga lupa memilah bahwa kebebasan pers tidak hanya bermakna *freedom from*, tapi juga *freedom for*. Kemerdekaan dari kungkungan penguasa Orde Baru tidak seharusnya dimaknai sebagai kebebasan pers untuk berbuat apa saja tanpa menempatkan publik sebagai tuan besarnya.

Sirikit Syah, mantan praktisi media cum akademisi, mencatat bagaimana naifnya selera pemberitaan pers di hari-hari menjelang kejatuhan Gus Dur. Dalam *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*, ia menyebut pers telah kehilangan daya kritis bahkan berpotensi melakukan *libel* (fitnah melalui tulisan yang disebarluaskan). Tidak ada pers yang mencoba mengejar jawaban kenapa isu Bruneigate yang tidak terbukti secara hukum lebih menarik ketimbang korupsi Rp200 miliar di tubuh Kostrad? Kenapa pula tidak ada yang berusaha mencari sebab kenapa kasus penipuan di Bulog senilai Rp35 miliar ditembakkan kepada Gus Dur dan menjadi materi dasar Hak Angket di DPR? Mengapa juga gosip dan berita pengakuan Aryanti Sitepu, menjadi lebih penting ketimbang persidangan mantan Presiden Soeharto?

Di hari-hari itu, kita bisa lihat bagaimana sesi-sesi *talking news* Amien Rais, Akbar Tandjung, Fuad Bawazier, Patrialis Akbar, Dewi Fortuna Anwar, Hamzah Haz dan lawan-lawan politik Gus Dur yang lain, mewarnai etelase pemberitaan di media massa. Nyaris tidak ada suara lain sebagai pembanding yang seimbang. Media tidak pernah mengungkap sisik melik kasus dana Yanatera Bulog Rp35 miliar (Buloggate) dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam senilai $2 juta (Bruneigate) berdasar kebenaran hukum yang seharusnya menguntungkan Gus Dur.

Pada situasi ini Gus Dur memilih tidak lagi diam. Menilai apa yang dilakukan pers bersama lawan-lawan politiknya tidak lagi sekadar menyerang secara pribadi, tapi mulai membahayakan konstitusi negara. Gus Dur pun membentuk Lembaga Pemantau Media Kepersidenan. Tapi api sudah kadung menjalar membakar apa saja. Pers sebagai *watch dog* sudah kadung me-

nyalak keras dan menggigiti apa saja tanpa kontrol sedikit pun.

Gus Dur makin terkucil dari pers ketika ia mengeluarkan Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001. Senjata pamungkas yang nyaris tidak berguna karena apa yang muncul di media berikutnya adalah suara para elit politik *kerang-keroh* yang menentangnya. Tidak ada ikhtiar pers untuk menyuarakan keberimbangan dan menampilkan suara lain dalam isu tersebut. Tidak ada upaya pers untuk menggali lebih jauh alasan kenapa dekrit turun, serta apa dan siapa yang mendesak Gus Dur untuk mengeluarkannya.

Gus Dur pun dimakzulkan. Tidak ada pers yang memasalahkan Sidang Istimewa yang berubah-ubah agenda dan waktunya. Tidak ada. Yang penting Gus Dur harus dijatuhkan. Apapun caranya. Pers, anjing penjaga yang dilindungi Gus Dur, tumbuh besar menjadi macan yang menerkam sosok yang selama ini selalu membelanya.

Apakah Gus Dur menyesal? Saya belum pernah mewawancarai Gus Dur terkait hal ini. Tapi melihat rekam jejak dan karakter hubungan pribadi Gus Dur dengan pers, saya *haqqul yaqin* Presiden RI ke-4 ini tidak pernah menyesal. Bahkan saya juga yakin Gus Dur menganggap pembelaan dan keberpihakan terhadap kemerdekaan pers adalah "jalan ninja" yang harus ditempuh dengan segala risikonya. Dan, itulah satu di antara alasan terbesar kita terus-menerus merindui Gus Dur hingga hari ini.

Suatu hari, delapan belas tahun setelah Gus Dur lengser, saya membaca artikel di medcom.id, sebuah portal berita online jaringan Media Group. Perusahaan ini milik Surya Paloh, salah seorang baron media yang namanya disebut di dokumen Fuad Bawazier dalam buku *Menjerat Gus Dur*.

Artikel berjudul "Gus Dur Sang Pembela Kebebasan Pers" itu ditulis Coki Lubis dengan titi mangsa 05 Desember 2016. Dalam artikel itu, Coki menulis kesaksian mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara. Tokoh sepuh itu bercerita Gus Dur pernah mengiriminya sebuah pigura istimewa. Dalam pigura itu tertulis pernyataan bahwa sebagai Presiden RI, Gus Dur menghargai dan melindungi kebebasan pers. Kata Leo, waktu itu, dari tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, Gus Dur satu-satunya presiden yang jelas, tertulis dan menandatangani dukungan kepada kemerdekaan pers. Saking girangnya, Leo mengirim pigura dari Gus Dur itu ke World Assembly Newspaper. Kepada forum suratkabar sedunia itu, Leo dengan bangga mengatakan bahwa, "Presiden kami pembela kemerdekaan pers."

Ingatan tentang Gus Dur sebagai pendekar kemerdekaan pers adalah ingatan kolektif warga bangsa ini. Sejatinya, Gus Dur tidak pernah mangkat. Jasadnya memang telah ditanam di bumi, tapi nilai-nilai yang ia wariskan senantiasa hidup, bahkan makin rimbun menaungi siapa saja yang ingin berteduh dari hujan keruwetan dalam berbangsa dan bernegara.

Gus Dur *is the great man*. Catatan ini hanya mewakili satu dimensi saja dalam spektrum besar sosoknya. Pembelaannya kepada kemerdekaan pers hanyalah secuil dari ribuan pembelaan yang ia pernah lakukan kepada siapa saja yang perlu dibela. Soal yang ia bela di kemudian hari tak membela dan bahkan meninggalkannya sendirian, itu adalah perkara lain. *The eagle flies alone*. Seringkali, kebenaran tidak butuh teman.

Bagian Tiga

TAWA

Kisah Sebuah *Joke* di Istana Negara Menjelang Pelengseran Gus Dur

Moh. Syaeful Bahar

SAYA bersorak gembira ketika dihubungi Mas Inung (panggilan akrab Ahmad Zainul Hamdi), girang bukan kepalang. Merasa tersanjung karena dipercaya menjadi salah seorang kontributor buku ini. Merasa senang karena mendapatkan media dan tempat yang tepat untuk menumpahkan marah. Rasa marah yang dahsyat karena membaca buku *Menjerat Gus Dur*, karya Virdika Rizky Utama. Rasa marah ini seperti yang saya rasakan sembilan tahun lalu.

Saya yakin buku ini adalah salah satu cara Tuhan memperbaiki cerita sejarah bangsa Indonesia sekaligus sebagai isyarat Tuhan tentang keadilan-Nya. Gampangnya, buku ini adalah cara Tuhan membela Gus Dur dan menunjukkan kebenaran. Dari *feeling* dan tangan seorang wartawan, Virdika Rizky Utama, Tuhan menuntun dan menguak dokumen-dokumen kejahatan gerombolan oligarki yang mengkudeta Gus Dur. Tak tanggung-tanggung, semua nama para pengkhianat

demokrasi serta peran culas apa yang harus dilakukan, terkuak semuanya. Jelas, telanjang dan tanpa aling-aling. Sekali lagi, ini cara Tuhan menelanjangi kejahatan dan membuka tabir kebenaran. Jelas sudah, siapa pengkhianat Reformasi dan siapa pejuang demokrasi.

Demokrasi yang Dipertaruhkan

Saya masih ingat persis satu ketika, pasca-rusuh pembakaran kantor Golkar di Jawa Timur, bersama beberapa orang kiai dan aktivis mahasiswa Jawa Timur, bertemu dan menyampaikan desakan pada Gus Dur di Istana Negara. Sebenarnya, pertemuan tersebut adalah cara Gus Dur untuk bertemu para pendukungnya yang sedang marah, kecewa dan terluka. Cara Gus Dur mendinginkan emosi para pecintanya yang tak lagi terkendali.

Awalnya, pertemuan itu berjalan dengan tegang, penuh emosi. Para kiai yang hadir, setelah dipersilahkan menyampaikan pendapatnya, langsung mendesak Gus Dur untuk tegas melawan kejahatan konspiratif yang berusahan menggulingkannya. Para aktivis dan para mahasiswa pun, dengan berbagai analisis dan teori politik, tampak tak sabar juga mendesak Gus Dur untuk segera membubarkan Golkar, kekuatan yang dianggap sebagai biang kerok teror politik pada Gus Dur saat itu.

Semua pihak yang hadir saat itu bersepakat, bahwa Gus Dur harus melawan, Gus Dur harus tegas dan segera membubarkan Golkar. Tidak ada jalan lain, karena adalah hal mustahil, membiarkan Golkar yang menjadi bagian dari kejahatan Orde Baru menjadi bagian dari proses transisi demokrasi yang baru tumbuh seumur jagung di Indonesia. Tidak mungkin,

Golkar yang pernah menjadi bagian dari otoritarianisme Orde Baru dan masih memiliki akar politik kuat, akan membiarkan transisi dan konsolidasi demokrasi berjalan, sebagaimana amanat Reformasi. Bagaimana mungkin, demokrasi akan tegak berdiri di saat duri-duri masa lalu, masih dibiarkan ada dalam luka yang membusuk di negeri ini.

Golkar, bagi kami, para aktivis yang hadir di istana saat itu, bukan hanya tak mungkin menfasilitasi demokrasi, tapi hampir bisa dipastikan akan menjadi batu sandungan serius dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Kampanye Akbar Tanjung, ketua DPR RI dan sekaligus Ketua Golkar saat itu, dengan slogan Golkar Baru, tak bisa dipercaya, mengingat semua aset, fasilitas dan jaringan yang dipakai oleh Golkar hampir semuanya adalah hasil kerja jahat Orde Baru selama tiga puluh dua tahun berkuasa.

Logika sederhanya, membiarkan Golkar terus ada, sama artinya dengan membiarkan Orde Baru tak bisa diseret ke pengadilan atas semua tuduhan kejahatan yang dilakukan selama tiga puluh dua tahun. Tak mungkin, Golkar akan menyerahkan diri, mengemis maaf dan menjadi tunduk pada proses reformasi, di saat semua jaringan mereka masih sangat kuat dan menguasai aset-aset penting di negeri ini. Padahal, salah satu tuntutan terpenting dari Reformasi adalah menyeret Orde Baru dan kroni-kroninya ke meja hijau untuk diadili.

Bagaimanapun juga, reformasi politik pada dasarnya adalah sebuah proses transisi dari pemerintahan otoritarian menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Karena sebuah proses, maka tak mungkin membiarkan semua yang berpotensi menghalau laju demokratisasi menjadi bagian dari gerbong demokrasi. Memakai paradigma transisi O'Donnel & Shmitter

(1986), paling tidak, ada tiga tahap yang harus dilalui sebelum mencapai demokrasi yang kokoh, yaitu liberalisasi, transisi, dan konsolidasi. Artinya, sebagai sebuah proses, demokratisasi butuh tempat yang tepat untuk berkembang, butuh lahan yang subur dan aman untuk disemai, dikawal, dilayani dan difasilitasi, di mana semua itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki komitmen kuat untuk mengantarkan demokrasi menjadi realitas berbangsa dan bernegara.

Golkar jelas tak memiliki syarat untuk dikatakan berkomitmen menjaga dan menfasilitasi demokrasi. Karena bagaimanapun juga, Golkar adalah produk dan sekaligus anak kandung Orde Baru. Mustahil akan berhasil membuang dan membersihkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan semua sisa-sisa budaya politik Orde Baru, tanpa membuang dan membubarkan Golkar. Sebagaimana yang dinyatakan Robinson dan Hadiz (2004), keruntuhan Orde Baru tidak serta merta menjadi jaminan Indonesia akan menjadi demokratis. Mengapa? Karena jatuhnya Orde Baru tidak diiringi oleh hancurnya basis politik pemerintahan Orde Baru, salah satunya adalah Golkar.

Tapi Gus Dur adalah Pemaaf

Pertemuan yang dibayangkan akan panas, heroik dan penuh emosi itu tak persis sama dengan harapan. Gus Dur tidak terprovokasi. Gus Dur menanggapi semua amarah pendukungnya dengan santai, sangat santai, bahkan terkesan *slengean*. Gus Dur sama sekali tidak tampak tertekan, tetap "selow" sebagaimana Gus Dur biasanya. Satu pemandangan yang jauh dari perkiraan kami yang datang jauh-jauh dari Jawa Timur.

Gus Dur meyakinkan kami, para pendukungnya, bahwa demokrasi harus diselamatkan, dan karena demokrasi harus diselamatkan, maka butuh waktu dan kesabaran untuk membenahinya. Tidak boleh atas nama demokrasi, lalu berperilaku dan bersikap tidak demokratis, marah, apalagi hingga menutup ruang dialog dengan lawan politik. Tentu Gus Dur bukan tidak tahu, siapa yang dilawannya. Gus Dur juga bukan tidak paham konspirasi jahat macam apa yang akan menjeratnya. Gus Dur tentu jauh lebih paham dari pada kami, bahwa musuh yang berhadapan dengannya adalah para oligark yang tak kenal kata ampun untuk mempertahankan kekuasaan. Persis sama dengan apa yang ditulis oleh Fuad Bawazier di dalam suratnya kepada Akbar Tanjung.

Gus Dur tetap pada prinsipnya, bahwa demokrasi butuh penyanggah, dan salah satu penyangga utamanya adalah menghormati perbedaan pandangan politik. Artinya, Gus Dur tidak berkenan memanfaatkan kekuasaan untuk menutup perbedaan pandangan politik. Di akhir pertemuan, Gus Dur menutup dengan sebuah kisah, tepatnya sebuah *joke*, tentang pentingnya budaya maaf memaafkan.

"Dulu pernah ada sayembara. Sayembara ketangkasan. Tiga orang jagoan dari tiga negara yang berbeda. Seorang dari Inggris, seorang dari Amerika, dan seorang lagi dari Indonesia, kebetulan dari Madura", sela Gus Dur di ujung pertemuan di Istana Negara itu. Saya pribadi, sudah bisa menebak, pasti guyon (gurauan). Kenapa? Karena Gus Dur menyebut orang Madura. Hanya Gus Dur dan orang Madura sendiri yang berani menertawai orang Madura.

Gus Dur melanjutkan ceritanya, "Kesempatan pertama orang Inggris. Dia mengambil panah. Dia bidik sebuah apel

yang terletak di atas kepala sebuah manekin. Dan, *jleb*! Tepat mengenai tengah buah apel. Dengan bangga, si orang Inggris ini berujar, '*I am Robin Hood*'. Berikutnya, giliran orang Amerika. Dia mengambil senjata api laras panjang untuk membidik buah apel yang juga ditempat di atas kepala boneka manekin. Dengan sekali tarikan pelatuk, peluru tepat mengenai tengah buah apel. Dengan lantang, pria ini teriak, '*I am Rambo*'".

Semua orang sebetulnya sudah tahu bahwa cerita ini hanyalah sebuah *joke*. Tapi semua orang tetap penasaran ingin tahu apa yang akan diperbuat si orang Madura untuk mengalahkan Amerika dan Inggris. Gus Dur pun melanjutkan ceritanya. "Giliran ketiga adalah orang Indonesia, kebetulan orang Madura hehehe...," tawa Gus Dur renyah. "Dengan santai dan percaya diri yang tinggi, dia ambil sebilah clurit. Sebentar menarik nafas, dan tentu dengan sedikit merapal mantra, dia lempar clurit tadi sekuat tenaga, dan... *srit*, tepat mengenai leher boneka. Dengan santai, laki-laki Madura ini mengatakan 'I am Sorry' hahahaha." Gus Dur terkekeh-kekeh mengakhiri ceritanya. Tiba-tiba semua orang lupa bahwa ini adalah pertemuan yang seharusnya tegang, penuh emosi, dan serius.

Guyonan Gus Dur tadi seketika berhasil mendinginkan suasana hati kami. *Pertama*, *joke* Gus Dur tadi memang lucu. *Kedua*, kami lega, melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan Gus Dur tetap bahagia, riang gembira. Gus Dur sama sekali tidak tertekan. Gus Dur masih Gus Dur kami yang selalu optimis dan percaya diri, dan itu menjadi alasan kuat bagi kami untuk percaya bahwa Gus Dur baik-baik saja. Gus Dur tetap Gus Dur yang tak terbang karena dipuji, dan tak tumbang karena dimaki.

Presiden Oleng

M. Faizi

PERNAH lihat video truk oleng? Di Youtube, video seperti itu banyak sekali, biasanya truk-truk pengangkut cabai. Ketika oleng, truk tersebut sedang atraksi, bukan begitu karena jalan yang rusak atau karena beban terlalu berjibun. Ia murni pertunjukan. Aktor utamanya adalah sopir yang akrab disebut "sopir oleng".

Saya membayangkan, saat menjadi presiden, manuver-manuver Gus Dur mirip itu, semacam—mohon maaf—"presiden oleng" begitulah. Ia menjadi presiden dan negara ini dibawanya melaju, goyang ke kanan dan kiri. Bedanya, Gus Dur mengemudikan negara di jalan yang rusak, banyak cekungan dan lubang, makanya oleng dengan sendirinya, bukan sedang membuat pertunjukan. Jadi, olengnya ini "oleng organik", bukan "sirkus oleng" alias oleng sebagai pertunjukan di jalan.

Pada awal-awal masa jabatan kepresidennya, tanggal dan bulannya saya lupa, Gus Dur datang ke Guluk-Guluk (saya tinggal di desa/kecamatan tersebut) sebagai presiden. Ini ada-

lah momen langka bagi kami karena merupakan kunjungan presiden untuk yang pertama kali. Sebelumnya, Gus Dur memang pernah kemari, tapi sebagai kiai. Sepanjang sejarah NKRI, belum ada satu pun presiden yang datang ke Guluk-Guluk. Kami makin pede: Kabupaten Sumenep yang selama ini tidak di-*reken* oleh tiga presiden sebelumnya, sekarang presidennya malah berkunjung ke Guluk-Guluk, salah satu desa di wilayah Sumenep. *Wow*!

Saat itu, kondisi negara sedang oleng, baik politik maupun ekonomi, lebih-lebih bagi orang Madura yang baru merasakan "teror" bertubi-tubi: kisruh di Sambas, rusuh Sampit, beban batin dan ekonomi karena pemadaman massal selama tiga bulan. Kasus-kasus itu tampak berjalan wajar walaupun sebagian orang menciumnya sebagai bagian dari aroma kemenyan politis. Entah kedatangan Gus Dur untuk menghibur kesedihan ini atau karena alasan yang lain, saya tidak paham. Tapi, yang bikin kaget, Presiden Gus Dur—yang dalam pada itu jelas ikut diguncang dan terguncang—tidak *curhat* sama sekali di podium, tidak *nyentil* isu gonjang-ganjing negara, sama sekali tidak membahas itu. Yang dibahas malah basis "epistemologis" yang mendasari penamaan pondok pesantren Annuqayah, pesantren yang beliau kunjungi itu. Informasi yang disampaikannya itu bahkan juga baru diketahui oleh kebanyakan santri, sangat ilmiah.

Sebagaimana kita tahu, Gus Dur selalu dilekatkan dengan isu-isu kemanusiaan atau humanisme dan pluralisme—namun isu kedua ini kadang disalahpahami oleh beberapa kalangan sehingga Gus Dur dianggap melanggar syariat atau melanggar adab ketimuran yang pada akhirnya kerap memicu lahirnya caci-maki dari (bahkan) sesama anggota NU. Beliau

bahkan mendapatkan gelar "pahlawan kemanusiaan" atas tindakan-tindakan yang dilakukannya, yang oleh sebagian pihak terkadang dianggap kebablasan.

Setelah beliau turun dari kursi kepresidenan, ada satu kesan tersisa, sekurang-kurangnya di mata saya, yaitu sikap remehnya terhadap segala keunggulan, kejayaan, dan kekuasaan di hadapan kemanusiaan. Jadi, kalau dibuat semacam frasa, lengsernya Gus Dur tergambar dalam ungkapan "kekuasaan dan kejayaan tidak ada apa-apanya dibanding kemanusiaan".

Memimpin republik hanya dua puluh satu bulan, dua tahun kurang, merupakan masa yang iseng untuk ukuran jabatan kepresidenan di Indonesia, lebih-lebih jika diukur pakai ukuran Orde Baru. Situasi ini semakin ironis karena itu terjadi ketika bangsa Indonesia baru saja siuman dari bius kekuasaan selama tiga puluh dua tahun Orde Baru (yang mengalami kelanjutan perpanjangan tangan oleh Presiden BJ Habibie selama dua tahun). Itulah orde otoriter yang di saat yang sama malah dianggap orde kejayaan di mata rakyat kebanyakan karena subsidi tersedia untuk semua barang: minyak murah, gas murah, dan stabilitas nasional. Rakyat baru disadarkan oleh Gus Dur, bahwa mereka kini menanggung hutang triliunan dolar, kerusakan lingkungan yang parah, dan penyakit mental akut (seperti korupsi dan rasuah) yang diwariskan oleh kekuasaan yang mereka anggap jaya dan nyaman itu.

Tapi, ya, itu, mereka berpikir, buat apa tahu itu kalo semua harga-harga barang terus tak terjangkau?

Karena muncul di masa peralihan kekuasaan, Gus Dur jadi mirip sopir pengganti untuk sebuah mobil yang selama ini berjalan *klunak-klunuk* sehingga para penumpangnya tidur

lelap dan menikmati perjalanan, para penumpang yang tak sadar kalau mereka begitu lama berada di atas mobil tapi jarak sejati yang sudah ditempuh tidaklah seberapa jauh. Kenikmatan telah menipunya.

Nah, jika negara ini diibaratkan dengan mobil tadi, Gus Dur itu tiba-tiba mengemudikannya dengan cepat dan sesekali melakukan manuver. Mobil oleng, penumpang histeris. Sopir menggoyang kanan dan kiri. Sang "presiden oleng" membawa armada NKRI doyong ke kanan dan miring ke kiri. Bedanya, ini bukanlah atraksi, bukan truk oleng yang suka aksi, melainkan oleng organik, auto-oleng sesuai hukum fisika, yakni oleng dengan sendirinya karena kendaraan dengan muatan berjibun yang berjalan cepat tapi sekaligus menghindari lubang-lubang di jalan yang menganga.

***

Sekurang-kurangnya buat saya—dan sangat mungkin juga bagi Anda—Gus Dur telah membuka kran informasi penting yang selama ini hanya dapat ditemukan di "buku putih", bahwa kekayaan alam kita telah sekian lamanya dibuat bancakan beramai-ramai oleh sekelompok kecil orang, sementara kita hanya dapat beberapa butir nangka, lebih banyak getahnya. Emas yang dikeruk di Papua dan kita dapat kubangan raksasa; hutan-hutan tropis yang hilang di Kalimantan dan kini jadi kebun sawit dan kita hanya kebagian jelantahnya; kekayaan maritim yang dapat membayar utang luar negeri RI dan kita hanya kebagian sampahnya, adalah sebagian kecil kenyataan yang ditunjukkan Gus Dur agar rakyat membuka mata.

Tapi dasar rakyat sudah terlanjur doyan kopi dari ampas dan kulitnya, begitu dikasih kopi dari biji asli, mereka muntah.

Selera mereka menolaknya. Kontrol kekuasaan selama tiga dekade yang begitu kuat terhadap media membuat kita hanya tahu kabar kemajuan yang sesuai dengan pesanan dan selera kekuasaan, bukan yang semestinya diketahui banyak orang.

Masa kepemerintahan Gus Dur adalah sebuah pertaruhan. Beliau bertugas merapikan barang-barang yang berantakan di dalam rumah tangga sementara pagarnya sudah banyak yang rusak karena sering dimasuki penjarah, bahkan pada saat yang sama pun masih banyak maling yang sedang mengintainya. Gus Dur berada di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang kendor; hubungan luar negeri sedang buruk; tikus-tikus yang sudah terbiasa menggerogoti administrasi dan oknum-oknumnya sudah merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Belum lagi bicara oligarki yang berkuasa bahkan mampu mengontrol kekuasaan resmi itu sendiri. Nah, pada situasi dan kondisi seperti inilah Gus Dur berdiri.

Jika itu kamu, kamu bisa apa?

Beliau lalu datang dengan sekian langkah jangka panjang dan strategis, tapi orang tidak percaya karena sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan selalu jangka pendek. Ia datang dengan konsep hubungan bilateral yang diplomatis, tapi mereka anggap itu tidak menarik karena sejauh ini rakyat terbiasa dengan hubungan sesaat demi bisnis. Gus Dur datang dengan konsep kemanusiaan di atas segalanya, tapi sejauh ini rakyat terbiasa dengan konsep kekuasaan di atas segalanya. Mungkin, inilah beberapa hal yang menyebabkan banyak orang merasa ditipu olehnya. Biasa ditipu, sekali ada yang jujur, malah merasa ia sedang menipu.

Dalam waktu yang sebentar itu, Gus Dur lebih banyak menyiapkan fondasi, bukan membangun di atas dasar yang la-

bil. Risikonya, ia kelihatan tidak produktif, malah tampak konsumtif. Tidak ada satu pun orang yang mau mengambil langkah seperti ini: melakukan langkah strategis tapi dipandang dengan sinis. Cara ini berisiko tinggi: ia tidak akan mendapatkan untung pribadi, bahkan mungkin caci maki. Dan, pada posisi inilah Gus Dur berdiri.

Saya membayangkan, yang dilakukan Gus Dur dalam waktu sebentar itu seperti yang dilakukan oleh arsitek-arsitek Rusia dalam membuat jalan yang membentang antara Palangkaraya sampai Tangkliling (sering disebut Jalan Rusia; dibangun di era Presiden Soekarno, tahun 60-an). Prosesnya terbilang lama untuk jarak yang sangat pendek: mulai dari meneliti kontur dan struktur tanah, dll. Setelah diteliti dan dijajaki, dibangunlah jalan yang tidak begitu panjang itu, pembangunan yang andai digunakan untuk jalan lain pasti sudah begitu panjang dan segera bisa dilewati.

Masyarakat kita tentu merasa aneh dengan yang dilakukan Rusia karena yang dilakukannya tidak seperti yang biasa mereka lihat pada hari-hari sebelumnya. Namun, setelah pulahan tahun berikutnya, ternyata jalan itu tetap membentang, tidak rusak. Kalau pun mau diperbaiki, tinggal diperbarui. Fondasi sudah kokoh, tidak perlu digaruk lagi, tidak perlu digali lagi. Kini, masyakarat melintasi jalan itu tanpa tahu sejarah bagaimana ia dibangun, dulu. Ia yang dulu mencaci-maki, kini sudah mati. Jalannya tetap bagus dan layak dilewati.

Dalam imajinasi saya, meskipun tidak sama persis, yang dilakukan Gus Dur itu mirip-mirip ilustrasi di atas. Jadi, ketika Gus Dur "berwisata" ke luar negeri, saat beliau berkuasa dulu, betapa diremehkannya langkah itu. Ketika Gus Dur datang bersilaturahmi ke tokoh-tokoh agama dan politisi penting

dunia, betapa dianggap sepelenya silaturahmi. Yang dilakukan beliau dalam waktu sebentar itu adalah menyiapkan fondasi, pantas saja tidak ada yang tampak dibangun. Langkah seperti inilah yang membuat negara oleng kanan, oleng kiri. Sebab, jika lelet dan tidak siap, bukan mustahil Indonesia jadi seperti Syam dan Hindustan, negeri besar yang bubar beneran.

Begitulah, (pe)lengser(an) Gus Dur telah lama terjadi. Semua orang sudah lupa peristiwa itu, peristiwa yang seolah-olah berjalan wajar dan sesuai hukum alam, bahwa yang memerintah dengan ngawur dan ugal-ugalan akan dihujat beramai-ramai lalu dihentikan di tengah jalan. Jadi, selama ini, meskipun banyak yang menganggap pemberhentian Gus Dur itu non-prosedural, tapi lama-lama mereka lupa. Yang menjadi ingatan masal rakyat Indonesia hanyalah, bahwa Gus Dur pernah menjabat presiden di negeri ini dalam waktu yang sangat sebentar. Itu saja!

Untunglah, muncul kejutan, yakni terbitnya buku *Mejerat Gus Dur* karya Virdika Rizky Utama. Buku ini semacam "buku putih yang dijual bebas" (mirip ungkapan "rahasia tapi umum"). Berkat buku ini, ingatan itu muncul lagi, bahkan mampu mengubah stigma "yang memerintah dengan ngawur dan ugal-ugalan akan dihujat beramai-ramai dan dihentikan di tengah jalan" ke statemen tandingan: "demi kepentingan kelompok dan langgengnya kekuasaan yang menguntungkan, apa pun yang menghalanginya harus dibasmi, tak peduli kalaupun harus mengorbankan bermilyar-milyar uang dan hilangnya harga kemanusiaan".

Bagaimana cerita selanjutnya?

Dari catatan ini, saya menangkap satu kesan, kesan yang sebetulnya sudah saya tulis di muka, kesan tentang pengab-

dian, perjuangan, dan komitmen terhadap kepentingan publik dan kemanusiaan yang luar biasa besar, yang melampaui kepentingan-kepentingan spasial dan temporal. Ini penting, tapi yang lebih penting dicatat adalah bagaimana semestinya kita meneladani seseorang—sebut saja itu Gus Dur, meneladan gagasan yang sesuai dengan tindakan, meneladan komitmen yang tidak dapat ditawar dengan uang, yang demi memperjuangkan cita-cita kemanusiaan, ia sudah tidak lagi dapat membedakan mana pujian dan mana cacian.

Mungkin, saya juga merasa tidak terlalu penting untuk menyatakan diri bahwa saya bukanlah pengagum Gus Dur yang salah satu alat buktinya adalah esai-esai pujian terhadap beliau, juga bukan peneliti dan pengamat pemikiran-pemikirannya, bukan pula aktivis yang melantangkan gerakan-gerakannya, alih-alih sebagai corong bagi pendapat-pendapatnya. Saya bukan itu semua. Saya hanya seorang rakyat biasa yang mengagumi komitmennya, yang hanya melalui satu esai ini saya menulis tentang beliau, tentang sesosok manusia yang keluasan gagasan dan kemurnian cita-citanya jelas tidak mungkin dapat dirangkum dalam satu tulisan sependek ini, apalagi ini hanya merupakan esai satu-satunya. *Wallahu a'lam!*

Terhadap Para Pembencinya, Gus Dur Bilang: "Gitu Aja Kok Repot!"

Rijal Mumazziq Z.

KETIKA Gus Dur menjadi presiden, reaksi datang bukan hanya dari para pecintanya, melainkan juga para pembencinya. Para pengagumnya optimis tokoh kita ini bisa membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, sebaliknya tidak demikian dengan para pembencinya.

Para pendukung Gus Dur, dalam konteks media, terpusat di tabloid *Warta* dan majalah *Aula*. Keduanya dikelola oleh PWNU Jawa Timur. Keduanya seolah menjadi corong kebijakan Presiden Gus Dur maupun pembela pribadinya. Jika *Warta* kini sudah almarhum, *Aula* terus berkembang oplahnya.

Ketika Gus Dur diserang habis-habisan dari berbagai sudut di tiga bulan pertama pemerintahan hingga kejatuhannya, *Aula* tetap memberikan pembelaan. Tajuk yang diturunkan dalam kurun waktu pertengahan hingga akhir pemerintahan Gus Dur, dalam penilaian saya, bersifat emosional dan frontal. Waktu itu, saya yang masih duduk di bangku Madra-

sah Aliyah, merasa menikmati sensasi pembelaan ini. Khas NU dan berwatak JawaTimuran. *Blokosuto*, blak-blakan!

Selain menikmati *Warta* dan *Aula*, saya yang waktu itu mondok di Ponorogo, sering membaca majalah *Sabili* dan *Panji Masyarakat.* Selain dipinjami salah seorang guru, saya juga sering membaca keduanya di toko buku La Tansa, yang dikelola pesantren modern di kota ini. Isinya mengerikan. Narasi yang disuguhkan oleh *Sabili,* saya kira lebih pada pembunuhan karakter Gus Dur. Penyematan gelar tokoh "pegiat pluralisme" dilakukan dengan dana minor dan pejoratif. Demikian pula dengan istilah "Sepilis" alias Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme, yang dari singkatannya saja sudah terdengar aneh dan dimirip-miripkan dengan penyakit kelamin. Pemberitaan soal kepemimpinan Gus Dur dilakukan dengan negatif, apalagi jika berkaitan dengan kebijakan presiden dalam mendamaikan umat Islam dan Kristen di Maluku.

Panji Masyarakat, yang merupakan anak ideologis Masyumi, memang tidak sekeras *Sabili.* Hanya, dalam liputan skandal beraroma fitnah bernama Aryanti-Gate, *Panji Masyarakat* sangat tendensius. Saya cermati, pengunaan narasumber anomin atau yang lazim disebut dengan istilah "…..narasumber yang tidak mau disebutkan namanya" beberapa kali terjadi. Tentu, saya tidak tahu apakah benar-benar ada, atau hanya fiksi belaka. *Wallahu A'lam.*

Ketika membubarkan Departemen Penerangan serta membuka keran kebebasan pers, Gus Dur bisa dibilang memberikan peluang bagi jurnalis menghajar dirinya dari berbagai sudut pandang. Kebebasan pers memang cenderung brutal setelah puluhan tahun dikerangkeng oleh Orde Baru. Para pewarta menikmati euforia ini. Tapi, sebagai seorang demokrat,

Gus Dur paham pers adalah salah satu pilar demokrasi, yang pada suatu ketika juga bisa menyalak keras kepada dirinya sebagai penguasa.

Di dua tahun kekuasaannya itu, saya sebagai pelajar menikmati "pertarungan bebas" antara kubu pembela dan pembenci. Masing-masing melakukan manuver, membela atau menjatuhkan Gus Dur melalui pemberitaan, dengan berbagai caranya yang khas dan sensasional. *Sabili,* misalnya, memilih narasumber tokoh NU yang berseberangan dengan Gus Dur, untuk melakukan serangan *nabok nyilih tangan.* Tokoh NU ini diwawancarai, diarahkan melalui pertanyaan yang tajam, dan diakhiri dengan pertanyaan simpulan yang "mengunci".

Sabili kini sudah almarhum setelah pernah mencapai tiras ratusan ribu eksemplar, demikian pula dengan *Panji Masyarakat.* Keduanya pernah menjadi dua "media Islam" paling populer di awal tahun 2000. Namun, berbagai problem internal yang melanda mematikan keduanya. Apa kabar *Warta*? Tabloid ini juga sudah *kukut*. Kini, di antara keempat media di atas, hanya Majalah *Aula* yang bertahan sebagai media petarung opini. Semoga senantiasa terbit!

***

Tentang buku, manakala sowan Gus Dur pada 4 Januari 2009, saya bertanya tentang seorang penulis yang selalu bersikap tendensius dan bahkan menulis buku beraroma fitnah kepadanya. Bagaimana tanggapan Gus Dur? "Biarin saja Mas, *wong* dia itu cari nafkah. *Dah*, *gitu aja kok* repot!"

Enteng sekali Gus Dur menyikapi ini! Salut!

Jika di awal tulisan ini saya mengetengahkan pertarungan brutal dalam hal pembentuk opini antara media pecinta

dan pembenci Gus Dur, maka dalam paragraf di bawah ini saya mencatat beberapa judul buku yang secara keras melakukan serangan kepada Presiden Gus Dur di era kepemimpinannya. Buku-buku ini terbit di tengah penggalangan opini melemahkan pemerintahannya. Sebagian memang berisi kritik objektif, namun sebagian besar berisi pembunuhan karakter Gus Dur, bahkan fitnah belaka.

Pertama, buku *Rakyat Indonesia Menggugat Gus Dur.* Awalnya, saya mengira buku ini berkelas. Sayang, ternyata hanya kumpulan kliping pemberitaan media massa. Buku ini terbit pada Oktober 2000, diterbitkan oleh Wihdah Press. Penerbit ini terkenal sebagai penerbit yang banyak memunculkan karya simpatisan Negara Islam (*Daulah Islamiyah*), seperti Irfan S. Awwas, Muhammad Thalib, juga karya Rustam Kastor, purnawirawan jenderal yang diduga turut andil dalam bentrok umat Islam versus kaum Kristen di Ambon pada 2000-an. Selain itu, penerbit ini juga turut serta dalam memperluas wacana teori konspirasi melalui berbagai terbitannya. Penyunting buku ini, Arsyil A'la al-Maududi, saya kira juga nama samaran.

Sebagai buku kumpulan kliping pemberitaan, harap dimaklumi jika isinya hanyalah pemberitaan negatif di zaman pemerintahan Gus Dur. Dalam kata pengantarnya, Arsyil A'la al-Maududi menceritakan sosok Frangkie Abdullah, mualaf yang awalnya jatuh cinta kepada Gus Dur dan sepak terjangnya, lantas kecewa dan berbalik arah menjadi tidak suka. Frangkie, yang di dalam Kata Pengantar disebut, "....katakanlah begitu namanya" (bukankah ini tokoh rekaan?), akhirnya mengumpulkan berbagai pemberitaan hasil koleksinya, lantas diterbitkan Wihdah Press ini.

Di antara sumber rujukan koleksi kliping berita ini adalah *Gatra*, *Tempo*, *Forum Keadilan*, *D&R*, *Panji Masyarakat*, *Sabili*, *Media Dakwah*, *Adil*, *Republika*, *Kompas*, *Suara Merdeka*, *Media Indonesia*, *Sinar Pagi*, *Tabloid Aksi*, *detik.com*, *berpolitik.com*, *jaknews.com*, dan lain sebagainya.

Sebagai pengumpul kliping, penyunting sudah melakukan *framing* sejak awal, dengan mengarahkan pembaca bahwa Gus Dur: musyrik, pezina, koruptor, plin-plan, kontroversial, presiden yang dikendalikan pembisik, pembela orang kafir, komunis, pembela PKI, menyakiti umat Islam, dan lain sebagainya.

Lebih spesifik, untuk meyakinkan apabila Gus Dur menjadi musuh bersama "Umat Islam", penyunting memilih wawancara para "tokoh Islam" yang memang berseberangan dengan Gus Dur, khususnya sejak awal tahun 2000, misalnya Hidayat Nur Wahid, Amien Rais, KH. Alawy Mohammad, KH. Syukron Ma'mun, KH. Yusuf Hasyim, hingga Yusril Ihza Mahendra. Tentu saja, bisa diduga motif politiknya berdasarkan bendera partai masing-masing nama ini. Adapun sahabat Gus Dur, sesama "*Jombangers*", Nurcholis Madjid dan Emha Ainun Nadjib, misalnya, memilih mengritik Gus Dur sesuai dengan kapasitas intelektualnya.

Buku ini terbit pada Oktober 2000, tepat satu tahun pemerintahan Presiden Gus Dur. Tentu saja, kritik yang ada terasa wajar bagi seorang demokrat sejati seperti Gus Dur. Hanya saja, dalam banyak hal, sekitar delapan puluh persen buku ini memang menggiring opini pembaca bahwa selain selingkuh, Gus Dur juga koruptor, sehingga tidak layak dijadikan sebagai tokoh Islam dan presiden RI. Panah-panah fitnah ini memang diarahkan dalam rangka memperkeruh pandangan sebagaian besar umat Islam terhadap presidennya.

Buku lain yang terbit di era kepresidenan Gus Dur adalah karya Hartono Ahmad Jaiz. Tidak tanggung-tanggung, tukang *nyinyir* sana-sini ini menerbitkan dua karya memojokkan Gus Dur dalam kurun dua tahun. Karya Pertama, *Bahaya Pemikiran Gus Dur* (al-Kautsar 1999), laris manis saat putra Kiai Wahid Hasyim dilantik sebagai presiden. Awalnya, buku ini terbit pada April 1999, lalu cetak ulang berkali-kali pada tahun selanjutnya. Karya lain ditulis bersama Abduh Zulfidar Akaha. Judulnya lebih bombastis, *Bila Kyai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU.* Karya terakhir ini bukan kritis, tapi *nyinyir* dan menghina. Diterbitkan pada April 2001, menjelang Gus Dur "dikudeta".

Sesuai judulnya, Hartono memang melakukan manuver berbelok, mengawali dari mengkritisi (tepatnya *nyinyir*) kepada Gus Dur, lantas berbelok arah menghantam NU. Beberapa hal yang di-*nyinyir*-i Hartono tidak tepat, bahkan menjurus fitnah, sebagaimana keahliannya selama ini. Hartono dan Abduh melalui buku ini memberikan semacam karpet merah bagi para pembenci untuk memahami NU dengan cara negatif.

Buku lain yang laris manis di kalangan aktivis harakah Islam dan partai Islam adalah karya Adian Husaini. Karya ini terbit pada Februari 2000, dan mengalami cetak ulang beberapa kali setelahnya. Tentu, buku tipis berjudul *Gus Dur, Kau Mau Kemana? Telaah Kritis atas Pemikiran dan Politik Keagamaan Presiden Abdurrahman Wahid* ini banyak diminati oleh lawan politik Gus Dur, khususnya dari kalangan Poros Tengah yang mulai kecewa terhadap berbagai manuver RI-1 yang tidak bisa disetir mereka sebagaimana harapan awal.

Di antara yang dibidik oleh Adian Husaini adalah aliansi sekuler Gus Dur dan CSIS, pluralisme agama ala Gus Dur,

pembelaan berlebihan terhadap minoritas Kristen, dan kunjungan Gus Dur ke Israel beberapa tahun sebelum menjadi Presiden RI. Wacana-wacana ini juga tampak diulang-ulang dalam kajian terbatas yang dilakukan oleh para aktivis partai dakwah dan "Partai Islam" dalam kurun tahun 1999 hingga satu dasawarsa berikutnya. Saya pernah berbincang dengan beberapa aktivis Partai Keadilan Sejahtera dan juga Pemuda Ka'bah, *underbouw* PPP. Pandangan mereka tentang era Gus Dur sama minornya dengan pandangan Hartono Ahmad Jaiz, Abduh Zulfidar Akaha, dan Adian Husaini.

Dengan demikian, bisa ditarik garis kesimpulan awal, bahwa pembentukan opini busuk dijalankan secara sistematis dan berpola melalui, antara lain, jejaring para aktivis partai Islam melalui buku dan kajian internal. Bolehlah diakui apabila Gus Dur selama menjabat sebagai presiden memang kerap melontarkan statamen kontroversial dan tindakan yang *unprecditable.* Namun, dalam pandangan yang lebih jernih, selain sudah mulai dikepung lawan di kanan kiri serta para "Brutus" di sekitarnya sehingga harus berkejaran dengan waktu sebelum "turun takhta", tindakan Gus Dur lebih banyak dilakukan atas dasar *mashlahat* (kebaikan) jangka panjang.

Kritik yang proporsional terhadap pribadi dan kebijakan Gus Dur sebagai presiden justru lahir dari anak-anak muda NU yang menerbitkan karya berjudul *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan.* Buku ini diterbitkan oleh Lakpesdam NU pada 2002, setahun setelah Gus Dur *lengser keprabon.* Khamami Zada dan kawan-kawan muda NU melihat Gus Dur tidak secara hitam putih, melainkan banyak warna. Tidak menyorotinya sebagai *patron*, melainkan sebagai penguasa. Karena itu mereka bisa melakukan pembacaan kritis terhadap

pemerintahan Gus Dur dan berbagai keputusannya sebagai kepala negara.

Kritik yang lebih objektif malah tampak dalam *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (LKiS: 2004) yang ditulis oleh kawan lamanya, Greg Barton. Penulis asal Australia ini tidak hendak memuja-muji Gus Dur hingga tampak sebagai penjilat. Barton memotret Gus Dur dengan kompleksitas pribadi dan latar belakangnya: ideologi, keluarga, pendidikan, dan pergaulannya.

Di bagian kesimpulan buku Biografi Gus Dur, Barton dengan objektif memaparkan berbagai kelebihan Gus Dur, kekurangannya sebagai pribadi, serta berbagai fakta yang menyebabkan dirinya terjatuh dari kekuasaannya. Ketika memuji, Barton tidak mengorbankan profesionalitas akademiknya. Ketika mengkritik, dia juga tidak terjatuh pada penghinaan dan kehilangan rasa hormatnya. Semua dia lakukan secara proporsional dan profesional.

Wallahu A'lam Bisshawab!

Gus Dur yang Memang *Woles*

R.N. Bayu Aji

ABDURRAHMAN Wahid, atau yang kita kenal dengan panggilan Gus Dur, merupakan sosok yang unik dan orsinil. Gus Dur merupakan salah satu tokoh bangsa Indonesia yang humoris dan *ceplas-ceplos*. Gus Dur bukan saja seorang kiai atau ulama, tetapi juga politisi dan akademisi. Ia disebut oleh Greg Barton sebagai penanda pergeseran penting dalam sejarah Indonesia setelah Soeharto lengser saat Reformasi 1998. Banyak hal yang diubah oleh Gus Dur saat ia menjadi presiden, di antaranya adalah membubarkan Departemen Penerangan RI, mencabut Inpres 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, mendirikan serikat buruh (UU 21/2000), sampai meliburkan sekolah di bulan Ramadhan.

Kebijakan-kebijakan Gus Dur juga dinilai membuat kondisi politik antara eksekutif dan legislatif tidak stabil dan akhirnya kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan Gus

Dur berperan menjatuhkannya. Namun, Gus Dur memang bukan sosok seperti pada umumnya yang akan mempertahankan kekuasaannya mati-matian. Banyak hal di luar dugaan yang dilakukan olehnya.

Ketika Gus Dur akan dijatuhkan di tahun 2001 oleh MPR, kelompok-kelompok Islam tertentu menawarkan dukungan politik untuk mempertahankan posisi Gus Dur sebagai Presiden asalkan dalam dekrit yang dikeluarkannya memuat pemberlakuan syari'at Islam, pembubaran MPR dan DPR. Namun, Gus Dur tidak akan pernah mau untuk mendekritkan syari'at Islam karena hal itu bertentangan dengan apa yang selama ini menjadi garis perjuangannya, yaitu mempertahankan Indonesia dengan dasar Pancasila.

Sikap final tentang negara Pancasila itu merupakan harga mati yang menjadi pandangan Gus Dur dan NU. Hal itu tidak terlepas dari pandangan inklusivisme Islam yang dapat masuk dalam Pancasila dan menolak eksklusivisme formal hukum Islam.

Negara hukum Pancasila yang diterima NU dan Gus Dur terikat dengan kaidah penuntun yang khas, di antaranya adalah hukum harus menjamin keutuhan bangsa dan negara, baik teritori maupun ideologi. Karena itu, hukum tidak boleh menimbulkan disintegrasi bangsa.

Hukum juga harus dibuat secara demokratis dan nomokratis. Tentu saja, hal itu berbeda dengan kondisi saat ini yang banyak sekali narasi agama digunakan untuk meraih dan mempertahankan jabatan politik. Bahkan, direproduksi terus menerus. Kalaupun mau, Gus Dur yang merupakan kiai bisa melakukan itu karena didukung basis massa yang siap melakukan gerakan, membelanya mati-matian.

Selain itu, Gus Dur juga membuat istana kepresidenan tidak lagi angker bagi masyarakat. Kehadiran para kiyai yang bersarung dan bersandal serta orang-orang biasa yang bersandal jepit di Istana Negara adalah pandangan lumrah selama era kepresidenan Gus Dur. Gus Dur menjumpai seluruh tamunya yang berkunjung ke istana dengan kesahajaan yang apa adanya. Salah satu peristiwa menarik adalah ketika Inayah, putri bungsu Gus Dur, merayakan ulang tahun ke-18 di istana kepresidenan. Banyak yang mengkritik, tetapi hal itu justru membuat istana semakin dekat dengan rakyatnya.

Sisi lain yang tak kalah khas dan orsinil dari Gus Dur adalah kesahajaan dan kesederhanaannya menyajikan menu makanan kepada tamunya. Publik mulai terbiasa melihat hidangan kepresidenan berupa kacang rebus, jagung rebus, dan tempe goreng. Publik mulai terbiasa melihat presidennya dalam sosok manusia biasa yang sederhana, bukan seorang dewa yang angker.

Salah satu sisi kemanusiaan Gus Dur bisa dilihat dalam kolom-kolomnya tentang bola. Gus Dur memang dikenal sebagai penggemar sepak bola, penulis kolom-kolom sepak bola serta komentator handal sepak bola. Di tengah kesibukannya sebagai presiden dan ketegangan politik yang dihadapinya, dia masih sempat berbalas opini dengan Sindhunata di *Kompas* tentang bola. Kolom-kolom keduanya menjadi santapan renyah bagi para pemerhati politik dan, tentu saja, penikmat sepak bola.

Saat itu, Romo Sindhu, panggilan akrab Sindhunata, menulis di *Kompas* berjudul "Kesebelasan Gus Dur" saat Gus Dur menyiapkan kabinetnya. Romo Sindhu mengibaratkan situasi perpolitikan di era Gus Dur dengan berbagai macam di-

namika yang akan dihadapi dengan analogi sepak bola. Melalui tulisan lain yang berjudul "Catenaccio Politik Gus Dur" (*Kompas*, 16 Desember 2000), Romo Sindhu menganalogikan komposisi kabinet bentukan Gus Dur dengan pertahanan grendel khas ala timnas italia yang dipernekalkan oleh Enzo Bearzot.

Strategi bertahan ini dianggap Romo Sindhu tidak tepat dan sulit dikembangkan dalam demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Gus Dur digebuk dari segala lini dan hanya sesekali melakukan serangan balik yang kurang berarti. Umpan-umpan terobosan Gus Dur dan juga *built up* serangan harus segera dilakukan oleh kesebelasan yang dikomandani oleh Gus Dur. Tanpa serangan yang berarti, maka pertandingan akan sulit dimenangkan oleh sebuah kesebelasan.

Tanpa diduga, di saat menghadapi momen *impeachment*, Gus Dur membalas tulisan Romo Sindhu di *Kompas* dengan judul "Catenaccio Hanyalah Alat Belaka". Dalam tulisan itu, Gus Dur menjelaskan berbagai kemungkinan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sistem pertahanan *catenaccio*, begitu penjelasannya, hanyalah salah satu taktik dan strategi dalam berpolitik saat itu. Tidak dimungkiri bahwa suatu ketika, ia juga akan menerapkan strategi *hit and run* ala tim Inggris, cara indah sepak bola samba Brasil dan bahkan juga menerapkan *total football* ala timnas Belanda.

Romo Sindhu terus membalas opini Gus Dur yang dimuat *Kompas* tanggal 20 Desember 2000 dengan judul "Total Football bersama Gus Dur". Di sini, Romo Sindhu bertanya, dapatkah Gus Dur menjadi Johan Cruyff yang memainkan sepak bola menyerang dengan tempo yang cepat dan terbuka dalam kondisi menghadapi *impeachment*?

Gila! Dalam situasi politik yang menegangkan seperti itu, Sang Presiden masih sempat menulis kolom renyah untuk menjelaskan pandangan-pandangan dan sikap-sikap politiknya kepada rakyatnya melalui analogi sepak bola. Betapa *woles*-nya Gus Dur kita ini. Istilah *woles* adalah ungkapan untuk era kekinian tentang ketenangan dan santainya seseorang menanggapi sesuatu, segenting apapun sesuatu itu. Tak terbayangkan bagaimana Gus Dur dalam situasi politik di ambang *impeachment* masih bisa menulis opini tentang sepak bola.

Pada akhirnya, Gus Dur dimakzulkan oleh MPR dengan berbagai macam alasan. Tuduhan kasus *Buloggate*, *Bruneigate*, sampai asusila yang dialamatkan kepadanya tidak pernah terbukti di hadapan hukum. Sistem ketatanegaraan Indonesia di era itu memang masih memungkinkan MPR menjatuhkan Presiden dengan alasan apapun secara politis. Dan akhirnya, Gus Dur pun lengser, bukan karena dia bersalah, tapi karena persekongkolan jahat para lawan politiknya, bahkan pengkhianatan oleh para anggota kesebelasan yang dikomandaninya.

Gus Dur panik? Tidak! Ia tetap pribadi yang *woles*. Situasi *dagelan* politik itu dihadapinya dengan *katok kolor*. Dia yang dibela mati-matian oleh pendukungnya itu justru menyuruh kepada pendukungnya untuk kembali pulang ke rumah. Gus Dur berkata kepada massa pendukungnya yang telah pamit ke keluarganya untuk mati itu dengan kalimat yang hingga kini terekam dengan baik, "Tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian, apalagi sampai menumpahkan darah orang Indonesia. Nanti sejarah akan membuktikan kebenarannya.

WOLFENSO

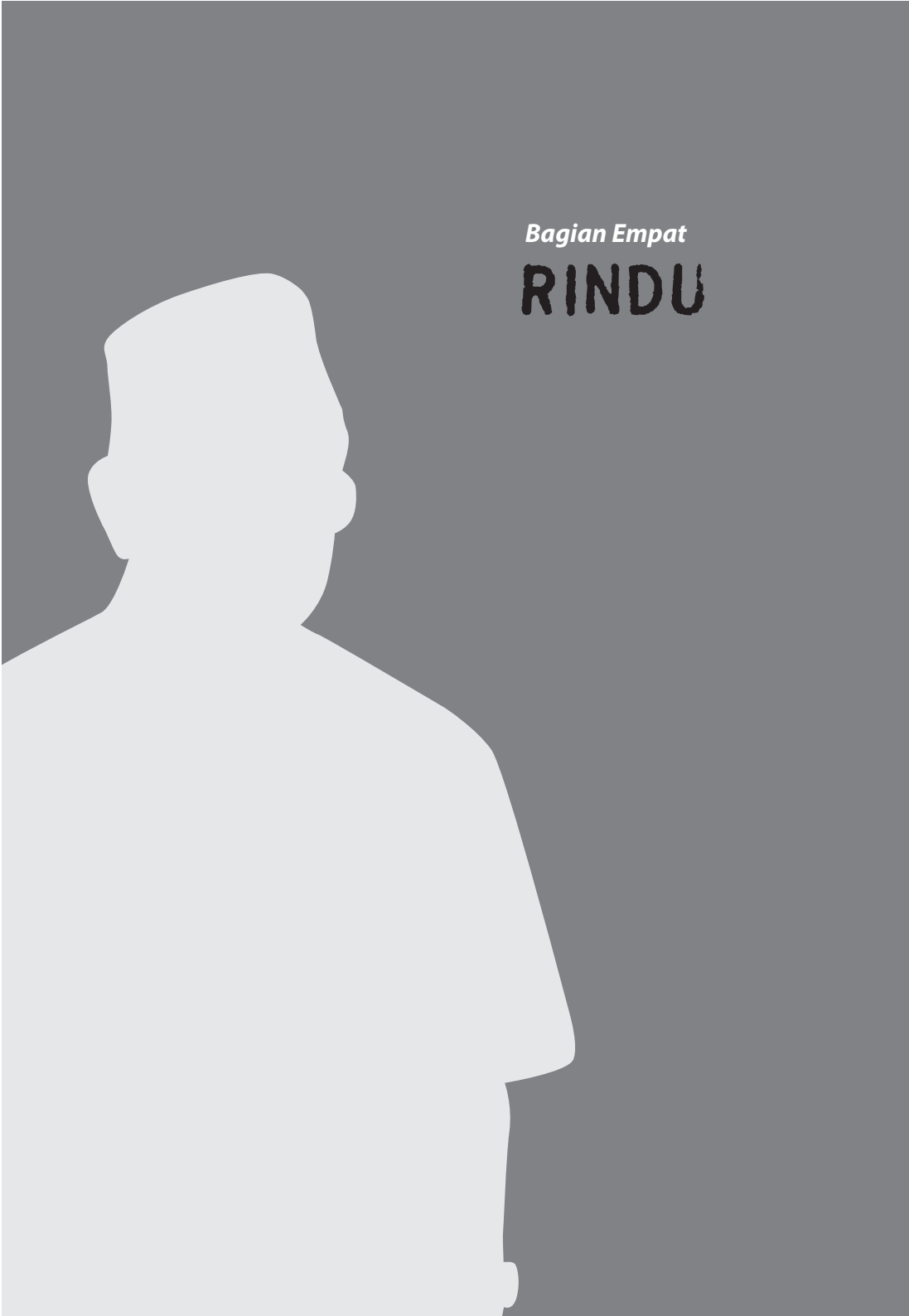

Bagian Empat

RINDU

Merindukan Gus Dur, Manusia Mulia Potret Ramah Tanpa Amarah

Anis Hidayatie

> *"Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya." (Gus Dur)*

NYARIS tak ada orang Indonesia yang tak kenal dengan Gus Dur, terutama saat beliau hidup. Sosoknya mempunyai magnet bagi media, baik cetak maupun elektronik. Semua media tertarik memberitakan apa saja yang keluar dari mulut seorang Gus Dur, serta pemikiran yang dituliskannya. Dia hadir sebagai kontroversi tak lazim yang menyejukkan kalangan pembela kemanusiaan. Tak hanya pujian, dia juga sosok yang banyak menuai hujatan, ironinya justru karena rangkulannya kepada seluruh umat manusia tanpa memandang muasalnya.

Sebagai salah seorang pengagum Gus Dur, saya merindukannya. Awal tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, selalu saja rasa itu muncul. Saya ingin dia hadir dengan cinta-

nya, dengan kemanusiaannya kepada sesama. Rangkulannya tanpa memandang agama terasa menyejukkan rasa, mendamaikan hubungan umat manusia, meminggirkan pertikaian antar-umat beragama.

Konsep "*lakum dinukum waliyadin*" (bagimu agamamu, bagiku agamaku) telah diterapkannya di kehidupan dunia ini dalam sebuah harmoni yang indah. Cintanya pada manusia tidak memberikan sedikitpun ruang permusuhan pada yang berbeda keyakinan. Dia diterima seluruh kalangan, bahkan umat yang berbeda iman menjadikannya sebagai panutan.

Tak ada paksaan dalam beragama. Ini satu konsep yang saya lihat pula mewarnai pemikiran dan cinta seorang Gus Dur pada manusia. Saya mengamini, saya mengikuti wejangannya.

Iman adalah tentang hati, yang pemiliknya adalah pencipta-Nya. Mengumbar kebencian pada sesama manusia dengan alasan berbeda iman adalah satu hal yang sungguh memiriskan saya. Karena, hanya Dia-lah yang maha membolak-balikkan hati. Lalu kenapa manusia merasa paling benar dengan hatinya?

Gus Dur memberikan contoh betapa indahnya bergandengan tangan dalam perbedaan. Ini mengagumkan! Saat kebencian bertebaran mengatasnamakan pembelaan terhadap keimanan, dia hadir sebagai tokoh *welas asih*, menebar cinta pada semua manusia, bahkan yang berbeda iman sekalipun.

Ini tentu tak lepas dari latar belakang pendidikannya. Dia adalah putra dari KH. Wahid Hasyim sekaligus cucu dari Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, yang lahir di Jombang, 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman "Addakhil" dan terkenal sebagai Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur.

Peran ayahnya ketika ditunjuk sebagai Menteri Agama, pada tahun 1949 sangat besar. Di Jakarta ia diajarkan oleh sang ayah agar membaca majalah, buku-buku apa saja, karya sastra dan koran untuk memperluas pengetahuan Gus Dur. Saya pikir inilah yang melatarbelakangi pemikiran dan sikap Gus Dur bagaimana dia bisa mencintai seluruh umat manusia tanpa melihat bajunya.

Nyaris tak pernah usai kerinduan ini padanya. Sepanjang tahun telah saya lewati dengan beberapa berita memiriskan terkait permusuhan karena perbedaan keyakinan. Ujaran kebencian, unjuk kekuatan, kontak fisik, bahkan rela menghancurkan diri dengan alasan pengharapan surga yang "absurd" sebagai balasan. Semua itu di luar nalar sehat saya. Mengapa demi membuktikan kekuatan lebih atas keyakinan seseorang dia harus mengorbankan umat manusia? Padahal Indonesia tidak dalam keadaan perang. Saya pikir perang yang sedang kita hadapi sekarang adalah perang menghadapi kebenaran versi diri sendiri.

Saya teringat kisah Ali bin Abi Thalib yang tidak jadi menusukkan pedang ke musuh karena sang musuh meludahinya, yang karena ludah itu membuatnya marah. Sahabat mulia itu menghentikan laju tangan menebas musuh, karena takut ada pengaruh setan yang membisiki. Dia tak mau jihadnya dinodai kemarahan yang *notabene* identik dengan perangai setan.

Ali bin Abi Thalib tak mau terlibat dengan kemarahan. Dia hanya ingin melakukan demi Tuhan, bukan pujian makhluk apalagi bisikan setan. Kisah ini menyadarkan saya bahwa jangan sampai kehidupan ini dihabiskan dengan mengumbar kebencian, baik dengan kata kata atau perbuatan.

Gus Dur dan Ali bin Abi Thalib adalah dua contoh teladan bagi saya tentang indahnya mencintai sesama manusia. Saat ketika Indonesia dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan antarsesama warganya, saya sungguh-sungguh ingin Gus Dur hadir kembali. Bersamanya, kita hidup hanya untuk mencintai, menolak untuk membenci, dan melenyapkan kemarahan pada siapa saja.

"Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah," itu salah satu pesannya. Dan untuk dunia yang lebih indah, pesan Gus Dur berikut rasanya tepat di resapi: "Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali."

Saya tak pernah mengerti bagaimana manusia semulia itu dimakzulkan saat dia ditakdirkan Tuhan memimpin negeri ini. Yang saya tahu, musuh dari orang baik adalah orang jahat. Sebagaimana yang kini terbukti dalam buku *Menjerat Gus Dur*, ia dilengserkan oleh konspirasi jahat dari orang-orang yang berteriak memperjuangkan Reformasi.

Sekalipun demikian, Gus Dur tetap pribadi mulia. Kekuasaan politik hanyalah sebuah lahan perjuangan. Saat dia menjadi rakyat kembali, dia berbaur dan membumi dengan kami.

Becik Ketitik, Olo Ketoro: Menafsiri (Presiden) Gus Dur

Listiyono Santoso

GUS Dur memang sosok fenomenal. Tidak hanya perilaku politik dan gerakan sosial, tapi juga pemikirannya acapkali melahirkan "kontroversi-kontroversi". Kata kontroversi sengaja saya beri tanda kutip ("). Hal ini karena apa yang disebut sebagai kontroversi seringkali bersifat subjektif. Ukurannya lebih pada *mainstream*. Bukan diletakkan pada substansi pemikiran Gus Dur. Tidak heran jika setiap pengetahuan yang bermukim dalam pikiran masyarakat *mainstream* selalu dianggap sebagai kebenaran, sekaligus menegasikan yang lainnya. Tragisnya, setiap yang *mainstream* dianggap sebagai kebenaran *common sense*, dan yang berbeda menerima *stigma* kontroversi.

Dalam konstruksi kefilsafatan, kebenaran itu ditemukan, bukan diwariskan. Kebenaran yang diwariskan belum tentu merupakan kebenaran. Bisa jadi, suatu kepalsuan pengetahuan yang diterima sebagai suatu kebenaran. Kesalahan yang

diterima dan dilembagakan suatu saat akan (dianggap) sebagai suatu kebenaran. *Mainstream* sudah terlanjur berkeyakinan menggenggam "kebenaran" pengetahuan tak mudah goyah menerima kebaruan kebenaran pengetahuan. Sejarahlah yang kemudian menghadirkan bukti-bukti bahwa kepalsuan dan kesalahan tak akan langgeng. Begitu sebaliknya, yang kontroversi pada suatu era bisa menjadi suatu kebenaran.

Sejarahlah yang akan menjawab semua realitas kontrovesial pada suatu era. Kearifan orang Jawa menyebut *becik ketitik, olo ketoro*. Sejarah yang akan memberikan jawaban bahwa setiap kebaikan dan kebenaran, kepalsuan dan kejahatan, akan terlihat pada jamannya. Bahwa yang disebut kebaikan akan selalu kelihatan, dan keburukan juga akan ketahuan. Sejarahlah yang akan memberikan bukti atas apa yang tersebunyi dan disembunyikan.

Nah, Gus Dur itu merepresentasikan sosok kontroversi yang demikian. SIkap dan pikiran yang dilontarkan cenderung "mengagetkan" banyak orang, bahkan termasuk orang dalam lingkarannya. Terlebih orang yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang *logosentrisme*, yang mengangap sikap dan pikirannya sebagai realitas kebenaran dengan menegasikan lainnya. Gus Dur adalah representasi pemikir yang suka mencipta wacana tanding dari kekuatan *mainstream* yang *established*. Bukan keinginan dianggap berbeda, melainkan karena masyarakat sesungguhnya membutuhkan wacana-wacana alternatif agar tidak terbiasa berpikir linear dan dogmatis.

Kebenaran pikiran Gus Dur—dalam kenyataannya—tidak bisa dibaca dalam konteks sesaat, melainkan membutuhkan kemampuan memberikan tafsiran yang melampui ruang dan waktu. Memang begitulah, kekuatan suatu pikiran. Mam-

pu menembus dimensi yang berbeda, bahkan melampui realitas yang sedang dipikirkannya.

Begitulah sikap dan pola pikir Gus Dur. Terlihat kontroversi pada jamannya, tapi menemukan kebenarannya pada era selanjutnya. Begitupun, ketika *ontran-ontran* politik yang mencoba menelikung Gus Dur pada paruh tahun 2001 lalu, saat ini pun juga mulai terkuak satu per satu. Buku *Menjerat Gus Dur* karya Virdika Rizky Utama (2019) menunjukkan betapa bukti (sejarah) pelengseran yang bersembunyi dalam gudang sebuah kantor partai politik secara tidak disengaja ditemukan dan mampu menghadirkan berbagai spekulasi terkait perselingkuhan jahat suatu kelompok: pekerja politik yang politis di negeri ini. Pekerja politik yang dulu bersemangat menjadikan Gus Dur sebagai presiden, namun bersemangat pula melengserkannya.

Gus Dur (pernah) melawan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden (23 Juli 2001) ketika hendak dilengserkan. Ada tiga poin penting dalam dekrit tersebut: *Pertama*, membekukan DPR/MPR; *Kedua*, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun; dan *Ketiga*, menyelamatkan gerakan Reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Dekrit yang kemudian justru mempercepat pelengseran Gus Dur sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia. Ribuan pendukung Gus Dur yang menyatakan diri sebagai Pasukan Berani Mati, sudah siap membanjiri Jakarta melakukan perlawanan. Gus Dur justru tidak mengijinkannya. Gus Dur tidak

berkeinginan terjadi tumpah darah, hanya karena perkara jabatan duniawi. Baginya, tidak ada jabatan di dunia ini yang pantas dipertahankan mati-matian. Bahkan pada bagian lain, Gus Dur juga menyebutkan bahwa di atas (semua) kepentingan politik, masih ada (nilai) kemanusiaan. Jabatan presiden baginya sekedar jabatan duniawi, yang tak harus menciptakan fenomena konfliktual antarwarga negara.

Keluarnya dekrit oleh Presiden Gus Dur bukanlah dalam rangka menyelamatkan kedudukannya sebagai presiden, melainkan jauh dari semua itu muaranya adalah menyelematkan agenda Reformasi yang ditelikung oleh kekuatan Orbais yang masih cukup kuat melembaga, plus dengan suatu jaringan persekongkolan (jahat) politiknya. Sekelompok orang yang tak pernah rela "digeser" ke pinggiran kekuasaan yang sangat lama dinikmati. Benarlah jika ada diktum politik bahwa kekuasaan tidak pernah berbagi secara sukarela terhadap orang lain, apalagi di luar kelompoknya.

Kekuasaan selalu melahirkan berbagai kenikmatan duniawi, sekaligus akses-akses potensial pada semua sumberdaya yang dimiliki oleh negeri ini. Karenanya, mereka yang terlalu lama menikmati kekuasaan sebagai berkah (bukan amanah) akan selalu berusaha menutup segala ruang bagi kelompok lain ikut serta menikmati kekuasaan. Kalau perlu, ya diganggu terus menerus agar yang sedang berkuasa (seolah) tidak sanggup mengelola kekuasaan.

Begitulah langgam politik di negeri ini. Tak berorientasi pada benar salah, melainkan menang kalah. Kompetisi politik selalu melulu pada dua pilihan: menang atau kalah, tak pernah peduli soal benar atau salah. Gus Dur lengser sebagai presiden —pada akhirnya—kian menguatkan fakta tersebut. Gus Dur

tak pernah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang banyak dimunculkan di ruang publik terkait kasus Buloggate maupun Bruneigate.

Gus Dur tidak salah. Gus Dur hanya kalah dalam pertarungan (politik) melawan perselingkuhan para petarung di panggung politik yang sejak lama berubah menjadi panggung *gladiator*. Suatu panggung yang di sekelilingnya merupakan petarung-petarung ganas, yang terbiasa untuk selalu mengalahkan agar dapat berpesta merayakan kemenangan. Suatu panggung (karena terlalu lama dihuni oleh pemburu kekuasaan) menjelma jadi "Padang Kurusetra" untuk berebut kuasa. Yang tak pernah rela orang lain menikmati, apalagi menjadi bagian dari suatu kuasa.

Sebagai manusia kompleks—budayawan, agamawan, pegiat sosial, bahkan pegiat politik—Gus Dur sudah banyak makan asam garam bagaimana kontestasi kekuasaan berlangsung. Saat Orde Baru sedang mencapai puncak dominasi kekuasaannya, Gus Dur menjelma menjadi tokoh yang selalu mengganggu stablitas kekuasaan. Pikiran kritis dan gerakan sosial yang dimainkan Gus Dur selalu membuat gerah kekuasaan saat itu.

Gus Dur itu dianggap *slilit* bagi rezim Orde Baru dan kelompok *mainstream* yang saat itu mendapatkan limpahan berkah kekuasaan. Ketika sebagian besar intelektual Muslim berbondong-bondong mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang banyak ditengarai sebagai bentukan rezim Orde Baru untuk menguasai narasi keislaman di Indonesia, Gus Dur malah mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) bersama aktivis lainnya, seperti Goenawan Mohammad, Franz Magnis Suseno, dan sebagainya. Nurcholis Mad-

jid saat itu mengritik, bahwa Gus Dur akan kehilangan basis intelektualnya kalau tidak bergabung dengan ICMI. Apa respon Gus Dur? "Sejak kapan ICMI menjadi basis intelektual saya? Basis intelektual saya sejak dulu tidak lain hanyalah masyarakat pesantren'.

Tak terhitung banyak pikiran cerdas Gus Dur yang membuat kekuasaan Orde Baru dan pendukungnya "panas dingin". Gus Dur pulalah yang membuat rezim Orde Baru tak pernah bisa tidur nyenyak. Apa yang dilakukan Gus Dur dari dulu tak pernah berorientasi pada hal-hal yang sifatnya material, apalagi godaan jabatan kekuasaan duniawi. Gus Dur hanyalah seorang agamawan yang selalu resah oleh berbagai politisasi agama, apalagi ketika agama dijadikan sebagai alat kepentingan kekuasaan belaka. Gus Dur hanyalah seorang budayawan yang gelisah ketika kebudayaan tak pernah dihargai sebagai bagian penting peradaban sebuah bangsa, yang baginya, krisis bangsa di negeri ini sesungguhnya bermuara dari krisis kebudayaan. Luka bangsa ini yang paling berat sesungguhnya adalah luka kebudayaan.

Gus Dur seperti panjaga negara di luar pagar, agar tidak (di)rusak oleh kejahatan kekuasaan, apalagi perselingkuhan kekuasaan politik dan ekonomi. Rezim Orde Baru dengan segenap pendukungnya adalah representasi dari perselingkuhan penguasa dengan pengusaha. Ketika kekuasaan politik dan ekonomi berselingkuh, lahirlah kekuasaan yang korup. Dan perselingkuhan itu telah melahirkan janin-janin jahat kekuasaan sampai sekarang. Janin-janin yang menjelma menjadi petarung-petarung politik, yang membuat keluhuran politik tereduksi hanya melulu soal kursi kekuasaan. Politik yang substansi bertujuan mulia, berubah menjadi praktik kotor. Yang

membuat suatu diktum, "Dalam politik segala hal diperbolehkan". Tak ada yang salah dalam praktik (culas) politik, yang ada adalah ketiadaan kesempatan berkuasa.

Langgam politik yang demikian melembaga dan terwariskan dari generasi ke generasi. Janin yang lahir dari perselingkuhan jahat politik, selalu melahirkan generasi baru. Suatu rezim yang mampu melahirkan regenerasi kader yang melulu menyoal untung ruginya berpolitik. Tidak heran jika mereka menjelma menjadi 'kader' yang tak pernah lelah merebut kuasa; kuasa apapun yang bisa dikuasai dan menguntungkan.

Sekuat dan sekarismatik Gus Dur saja tetap tak kuasa menghentikan lajunya. Modal sosial dan modal budaya yang dimiliki Gus Dur juga tidak sanggup memutus mata rantai regenerasi pewarisan kekuasaan rezim Orde Baru dan produk-produk yang dilahirkannya. Gus Dur "mengalah" untuk tak mati-matian mempertahankan kursi kepresidenan. Gus Dur menyerahkan mandat kekuasaan tanpa keraguan. Baginya, sejarahlah yang akan menjadi bukti betapa langkah dan pikirannya yang menyebut ancaman terbesar bagi keberhasilan cita-cita reformasi tidak lain terkonsolidasinya kekuatan antidemokrasi yang menjadi penumpang gelap gerakan Reformasi.

Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah jaringan Orbais yang masih cukup kuat berpengaruh dalam konstelasi perpolitikan nasional. Suatu jaringan yang bermukim dalam berbagai partai politik dan organisasi massa. Begitu kuatnya jaringan itu, seolah hanya Tuhan yang mampu mengurai dan melemahkan kekuatan dominasi mereka.

Ada saja kejadian tak terduga yang akhirnya membuka setiap peristiwa yang disembunyikan dari fakta sejarah. Dan

seperti itulah Tuhan menunjukkan bukti kekuasaan-Nya, bahwa kebaikan akan terlihat kemudian, begitu pun keburukan suatu saat akan terbukti dengan sendirinya. Serapat-rapatnya menyimpan daging busuk, suatu saat baunya akan tetap tercium juga. Begitulah akhirnya, kemampuan menyembunyikan persekongkolan jahat untuk melengserkan Gus Dur akhirnya terbongkar. Karenanya, percayalah pada kearifan lama masyarakat Jawa: *becik ketitik, olo ketoro.*

Misteri Gus Dur?

Meski Gus Dur telah tiada, meski pernah dilengserkan dari kursi kepresidenannya, ketokohannya tak pernah mati. Pasca-pelengseran, bahkan pasca-wafatnya, ketokohan Gus Dur justru kian menunjukkan karisma dan kekuatan kejernihan pikirannya. Wacana tentang Gus Dur dengan berbagai pemikiran yang dilahirkannya, tak pernah selesai dibicarakan orang. Gagasan cerdas yang dikemukakan, seringkali melampui zamannya, sehingga kebenaran pikirannya baru terbukti kemudian. Memang begitulah kekuatan suatu pemikiran. Kejernihan gagasan tidak bersifat temporal-sesaat, melainkan memiliki nilai yang melintasi batas ruang dan waktu.

Begitulah sosok Gus Dur. Ketokohannya justru semakin mendapat tempat setelah "kematian" fisiknya. Tokoh besar memang tidak hanya diketahui saat hidup, tapi juga terlihat usai kematiannya. Ketika sebagian besar publik merasakan kerinduan mendalam hadirnya sosok Gus Dur di tengah kondisi berbangsa dan bernegara mengalami krisis, baik krisis identitas maupun krisis moral. Kita rindu akan hadirnya sosok seperti Gus Dur yang mampu menghadirkan pemikiran yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

Ketika terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok minoritas, kita seperti merindukan sosok yang memiliki keberanian moral maupun intelektual mengkritik kondisi tersebut. Ketika terjadi politisasi agama secara ekstrim demi kepentingan kekuasaan politik, kita merindukan lagi sosok Gus Dur yang mengkhawatirkan situasi tersebut. Bahwa agama akan kehilangan spirit moralnya ketika dijadikan sebagai alat kepentingan politik belaka.

Saat ini, kita benar-benar merindukan sosok Gus Dur. Sosok yang berdiri di atas semua golongan, meskipun di dalam dirinya melekat erat identitas golongan tertentu. Kemampuan menanggalkan baju identitas yang demikian itulah yang sulit dilakukan tokoh-tokoh bangsa saat ini. Pasca-Gus Dur, kita seperti kehilangan referensi yang dipercaya mengurai konflik panjang antara agama dengan negara.

Tidak heran jika Gus Dur sering diebut sebagai misteri hidup yang bersifat *immortal*. Yakni, seseorang yang mati sekali, tapi hidupnya berkali-kali. Makna sederhananya, meski telah tutup usia pada 2009 lalu, sampai sekarang publik tidak pernah lelah membicarakannya. Tidak hanya pikiran, melainkan juga praktik hidupnya.

Cerita tentang Gus Dur memang tidak pernah khatam dibaca atau dituliskan. Selalu ada hal baru terkait dengan fenomena Gus Dur. Pikirannya tidak pernah selesai di(tafsir) terjemahkan. Praktik hidupnya tidak pernah usang dijadikan laku sosial keseharian.Gus Dur itu seperti teks yang selalu terbuka untuk ditafsirkan. Tak hanya tafsiran pemujaan, bahkan tafsiran penuh narasi kebencian juga banyak yang turut serta.

Mungkin memang seperti itulah seorang tokoh yang sering disebut banyak orang sebagai wali sekaligus seorang fil-

suf. Sebagai sosok wali, laku spiritualnya hanya mampu dibaca dengan hati. Sebagai filsuf, pikirannya tidak hanya cukup diserap secara tekstual apa adanya.

Gus Dur telah lama meninggalkan dunia ini. Pasca-kematiannya, bangsa Indonesia seperti kehilangan sosok penting dalam diskursus keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Saat ini, hampir sulit ditemukan sosok seperti Gus Dur, seorang agamawan sekaligus seorang negarawan. Sosok yang mengayomi semua golongan; melindungi kelompok yang tertindas; melakukan kritik atas kesewenang-wenangan. Pikiran dan tindakannya melampui egosime kelompoknya. Tidak salah jika Gus Dur dianggap sebagai sosok agamawan sekaligus negarawan paripurna dalam konteks keindonesiaan pada jamannya.

Gus Dur sering disamakan seperti sosok Semar, yang selalu memberikan nasihat kebaikan dan kebenaran. Setiap ada kelaliman, ia mengritiknya tanpa ada rasa takut. Di tengah kemapanan pikiran masyarakat yang cenderung hitam-putih, Gus Dur seringkali dianggap kontroversial. Hujatan, makian, dan fitnahan menjadi bagian yang menyertai pikiran dan tindakannya. Menariknya, Gus Dur tak pernah peduli dengan citra diri. Baginya, tak penting popularitas dan jabatan. Setiap yang bersifat duniawiah, tidak layak untuk dipertahankan mati-matian.

Beginilah independensi Gus Dur. Tidak mudah dikooptasi, sekaligus tidak mudah diintervensi. Setiap tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan merupakan musuh utama yang nyata.

Pada masa hidupnya, Gus Dur selalu menjadi tempat jujugan kelompok-kelompok yang lemah. Gus Dur memosisikan

diri sebagai guru bangsa tempat *curhat* masyarakat dari berbagai golongan. Gus Dur mencoba tidak marah ketika difitnah dan dihina, tapi tegas dalam membela nilai keadilan dan kemanusiaan. Baginya, nilai keadilan dan kemanusiaan itu bersifat universal, melampui batas etnisitas dan agama.

Pikiran dan tindakan Gus Dur tentang negara dan bangsa, selalu dilandasi oleh spirit keagamaan (Islam) yang mendalam. Yang meletakkan negara dan bangsa sebagai objektivikasi nilai-nilai keislaman di dalamnya. Pandangan ini tidak membuatnya ekslusif, melainkan menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman selalu beriringan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Melihat *track record*-nya, wajar jika banyak orang merindukan kehadiran sosok Gus Dur untuk menjadi oase bagi situasi kebangsaan saat ini. Kematiannya menandai era krisis agamawan yang bernalar kebangsaan. Nilai keagamaan dan kebangsaan seolah menjadi dua hal yang kontradiktif. Menguatkan yang satu, dianggap melemahkan lainnya. Mirip dengan asumsi, kesalehan beragama seringkali tidak beriringan dengan kesalehan sebagai warga negara, begitu juga sebaliknya. Realitas ini tampak pada keterbelahan menyikapi situasi kebangsaan kita belakangan ini, yang satu melahirkan aksi bela agama, satunya menciptakan bela NKRI.

Kerinduan akan sosok Gus Dur, seperti kerinduan akan komitmen ditegakkannya nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Terinspirasi Gandhi dengan slogannya, "*My nationalism is humanism,"* Gus Dur mencoba mengembangkan pemikirannya dalam pendekatan yang humanistik. Karenanya, ia lebih menyukai *Simphoni ke-9* Beethoven yang baginya lebih berisikan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan manusia daripada musik gambus. Bagi Gus Dur, "Melalui musik saya bisa

melihat manusia secara utuh. Kita tidak akan gampang memarahi. (*Editor*, 22/12/ 1990)" Orang yang mudah marah dan reaktif, karena mereka tidak memiliki selera berkesenian.

Bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan penting untuk dikedepankan. Nilai kemanusiaan telah menjadi titik tolak dalam menelusuri alur atau paradigma pemikirannya. Baginya, penghayatan atas nilai-nilai kemanusiaan merupakan inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai tersebut, dunia hanya dipenuhi oleh berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial. Tidak salah jika Inayah Wahid mengatakan, ide terbesar Gus Dur sesungguhnya adalah humanisme bukan pluralisme (*Jawa Pos*, 10/12/2016). Pluralisme hanyalah menjadi bagian kecil dari Gus Dur. Kata Inayah, Gus Dur tidak ingin dimakamkan sebagai seorang pluralis, melainkan seorang humanis.

Saat ini tampaknya kita benar-benar merindukan kehadiran sosok Gus Dur. Ia seperti pahlawan, yang mati sekali, tapi hidup berkali-kali. Secara fisik Gus Dur sudah meninggal, tapi pikiran dan tindakannya akan selalu hidup. Menebarkan inspirasi bagi setiap orang untuk berjuang melawan ketidakadilan dan kelaliman. Nilai kemanusiaan harus mampu menjembatani egoisme batas etnisitas dan agama. Perdamaian hanya mungkin muncul ketika setiap manusia dihargai dan diperlakukan sebagai manusia secara setara. Tanpa ini semua, niscaya dunia hanya berisi kekerasan demi kekerasan yang tak pernah ada ujungnya.

Bukan tentang Jabatan, Politik adalah tentang Kemanusiaan

Ferhadz A. Muhammad

SEPI ing pamrih rame ing gawe. Secara bebas, pepatah Jawa itu berarti melakukan pekerjaan dengan tanpa mengharapkan imbalan. Saya sengaja mengawali tulisan ini dengan pepatah itu karena terasa sangat mewakili pikiran saya saat mengingat sosok KH. Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil atau yang disapa Gus Dur.

Saya sendiri tidak pernah berjumpa dengan Gus Dur. Persentuhan saya dengan Gus Dur barangkali hanya lewat poster foto di ruang tamu rumah, itu pun sudah agak buram. Meski begitu, rindu yang mendalam selalu muncul ketika mendengar namanya, terlebih saat merekam dua momentum emosional di keluarga saya. Momentum pertama adalah saat Gus Dur dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya. Saat itu, saya yang masih bocah merasakan dengan sangat desau angin kesedihan dan kemarahan yang melanda lingkungan di mana saya tumbuh. Momen kedua adalah situasi kesedihan yang

tak terperikan kala tersiar berita Sang Guru Bangsa dipanggil menghadap Sang Pencipta.

Oleh karenanya, tulisan ini hadir untuk merefleksikan kembali sosok Gus Dur yang telah tertanam dalam batin saya sejak dini. Dia selalu hadir dalam rupa sederhana, meski bagi orang seperti saya, memahaminya membutuhkan banyak tenaga. Tulisan ini sendiri lebih tepat diperlakukan sebagai kerinduan daripada upaya pemahaman.

Hereditas Gus Dur

Syamsu Yusuf (2005) menjelaskan tentang hereditas ini sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orangtua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi (pertumbuhan ovum oleh sperma) sebagai pewarisan dari pihak orangtua melalui gen-gen." Nah, konsepsi demikian juga tampak dari sosok Gus Dur yang mewarisi pandangan dan falsafah hidup sang ayahanda, KH. Abdul Wahid Hasyim (Greg Barton, 2002).

Tapi, apakah garis keturunan saja cukup? Seorang penjaga gawang legendaris Italia, Gianluigi Buffon, menyatakan, "Talenta sejati diturunkan dari orang tua Anda dan merupakan fondasi yang hebat, tapi hal itu harus didukung dengan sebuah ketekunan dan kerja keras, jika tidak, talenta Anda hanya akan bertahan sebentar dan ditakdirkan menuju kehancuran (Dadi P. Eksan, 2018)."

Gus Dur jelas mewarisi darah orang-orang hebat, dari kakek dan ayahnya. Namun, Gus Dur tidak hanya berhenti pada soal keturunan. Dia berhasil memanfaatkan karunia keturunan itu menjadi kerja-kerja kesejarahan. Gus Dur jelas

mewarisi keteladanan ayahnya sebagai seorang cendekia-negarawan-santri yang berpikir progresif di zamannya. Kiai Wahid menunjukkan sikap progresifnya saat dia dengan berani mendobrak kemapanan pesantren tradisional saat itu dengan memasukkan beberapa ilmu pengetahuan modern. Meski demikian, dia tetap bersikeras agar pesantren, seprogresif apapun, tetap yang inklusif itu tidak tercerabut dari akar masyarakat.

Like father like son, demikian juga Gus Dur. Greg Fealy (1997) lewat artikel yang berjudul "Liberalisme: Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid", menitikberatkan penelitiannya pada diksi dinamisasi dan modernisasi pesantren yang digaungkan Gus Dur. Menurut Fealy, pernyataan Gus Dur dalam makalah yang dipresentasikannya di LP3ES berbunyi, "tidak melemparkan bayi ke dalam bak mandi," merupakan bukti betapa pemikiran progresif Gus Dur berakar kuat pada penghormatan tinggi terhadap kesarjanaan tradisional dan kombinasi yang cermat ke dalam pendekatan modern.

Penting untuk dijelaskan tentang terma "liberal" yang digunakan Fealy dalam menjelaskan Gus Dur. Ahmad Suaedy (2013), salah satu orang dekat Gus Dur, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Rosidi (2016), menyatakan bahwa cara berpikir Gus Dur adalah pengintegrasian tradisionalisme pesantren yang penuh dengan khazanah lokal dengan modernisme Barat yang progresif. Corak alam pikir Gus Dur adalah kosmopolit, bukan liberal dalam konotasinya yang liar.

Politik Kemanusiaan

Gus Dur dalam bukunya *Islam Kosmopolitan* telah menggambarkan suatu kerangka berpikir yang mencerminkan caranya bersikap dan bertindak. Pertama-tama, dia mencoba menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan para kritikus sosial, yaitu seperti apakah karakteristik manusia Indonesia?

Dia merespon pertanyaan itu dengan terlebih dahulu memaparkan berbagai pendapat dari para tokoh sosial. *Pertama*, pendapat yang menganggap bahwa manusia Indonesia adalah orang yang malas, terlalu pasif, dan kolot. *Kedua*, pendapat yang mengidealisasi nilai-nilai luhur, seperti bijaksana, cinta perdamaian, sopan, dll. *Ketiga*, pendapat yang mencoba menganalisis dengan pendekatan ilmiah. Golongan ini pecah menjadi dua, yaitu kalangan yang menganggap nilai-nilai tradisional seperti mentalitas priyayi adalah faktor penghambat pembangunan, dan golongan yang melihat nilai dan faktor sekitar secara koheren.

Dari semua pendapat diatas, dia mencoba merumuskan buah pemikiran lokal atau dalam bahasa ilmu sosial disebut *local knowledge*. Dia menyebutnya dengan istilah "kebangsaan modern". "'Kebangsaan modern" dalam bahasa orang Nahdliyyin (pengikut Nahdlatul Ulama) adalah *al-muhafadhatu 'ala al-qadimi ash-shalih, wal akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang baik atau masih relevan, dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik).

Dari apa yang disebutnya sebagai kebangsaan modern diatas, dia memberikan jawaban tentang karakteristik manusia Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu menghadapi berbagai tantangan sosial dan mencoba

mencari perubahan-perubahan sosial dengan tidak memutus tali ikatan masa lampau.

Inti dari kerangka berpikir demikian adalah meletakkan manusia sebagai "yang mengerjakan" dan "yang dikenai pekerjaan". Gus Dur mengajak kepada seluruh manusia Indonesia agar mendasarkan segala gerak langkahnya pada persoalan kemanusiaan. Itu saja. Sangat sederhana. Namun demikian, sebagaimana seorang pesepakbola handal dari Belanda, Johan Cruyff, berkata, bahwa kesulitan bermain sepak bola justru terletak pada kesederhanaannya. Demikian juga dengan pemikiran Gus Dur, yang paling sulit adalah mengimplementasikan konsep kemanusiaan yang pada hakikatnya sangat sederhana tersebut.

Bagaimana agar ada keterjaminan nilai kemanusiaan itu terlaksana? Jawaban Gus Dur sederhana juga, yakni akal sehat. Sebagaimana dalam tulisannya yang berjudul "Islam Kaset dan Kebisingannya", di bagian akhir dia menulis, "Tidak bergunalah rasanya memperpanjang illustrasi seperti itu: akal sehat cukup sebagai landasan peninjauan kembali...." (*Tempo*, 20 Februari 1982).

Sekali lagi, pikiran Gus Dur tersebut sama dengan yang ditegaskan oleh ayahandanya dalam sebuah tulisan berjudul "Tuntutan Bepikir". Isi tulisan tersebut sangat menyentuh, dan memaksa kita semua merefleksikan kembali gerakan intelektual dan sosial yang kita tempuh, terutama dalam kalimat berikut,

> *"Sebagian terpelajar kita, walaupun sudah berpengalaman, rupanya masih pula tetap belum matang pikirannya. Terbukti dengan sikap mereka yang sela-*

lu memakai perasaan (sentimen) mengenai soal-soal agama dan tidak sedikitpun mau meninjau, apakah betul soal-soal agama itu menurut logika atau tidak."

Pada akhirnya, apa yang harus dipahami dari sosok Gus Dur adalah pembelaannya yang terus-menerus pada kepentingan manusia banyak. Dalam sebuah tulisannya, dia menyatakan dengan sangat jelas, "Jelaslah banyak sekali hal-hal dari masa lampau dan sekarang yang harus dirubah. Tekanan kepada kepentingan "kelas atas", harus digantikan oleh perhatian kepada kepentingan "rakyat banyak" (Gus Dur, *Mencari Apa Indonesia?* 2003).

Dalam kerangka inilah kita harus memahami mengapa Gus Dur tidak mau berkompromi dengan para lawan politiknya yang sangat bernafsu menjatuhkannya. Jika yang harus dikorbankan adalah kepentingan rakyat Indonesia, maka tidak ada jabatan politik yang layak untuk dipertahankan. Jabatan politik adalah alat untuk memenuhi kepentingan rakyat, bukan untuk mengamankan kepentingan segelintir orang kelas atas.

Gus Dur Teladan Politik Nir-Ego

Fahrul Muzaqqi

KETIKA KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden, penulis masih kelas III SMU jurusan bahasa. Kini, penulis mengajar S1 Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya. Tulisan perihal drama pelengseran Gus Dur dari kursi RI-1 ini, tentu saja, bisa dianggap tulisan *receh* mengingat saat itu penulis masih remaja belia. Ada jarak ruang dan waktu yang membuat tulisan ini lebih bersifat subjektif.

Secara politik, kekuasaan Gus Dur sebagai Presiden memang berada di bawah MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pra-Amandemen UUD 1945. Walaupun terminologi presiden digunakan dalam lembaga eksekutif, namun semangatnya saat itu sebenarnya mengarah pada parlementer. Karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak (Pasal 6 UUD 1945 pra-Amandemen).

Walau tidak disebutkan bahwa MPR dapat memberhentikan presiden di tengah jalan, namun konsep kedaulatan yang

dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 pra-Amandemen) sangat memungkinkan membuka ruang politik bagi hal itu. Di sinilah kiranya celah politik di mana Gus Dur menjadi "korban ketiga", setelah Soekarno dan Soeharto, yang mengalami nasib sama dengan skenario politik berbeda, yakni diangkat secara normal namun turun/diturunkan secara tidak normal.

Dalam suatu kisah, konon Gus Dur berkelakar bahwa ia hanya bermodal dengkul untuk menjadi presiden, itu pun dengkulnya Amien Rais. Namun tidak boleh dilupakan, bahwa dengkul itu pulalah yang melengserkan Gus Dur dari Presiden. Sementara si empunya dengkul tidak kunjung menjadi Presiden walau sempat menarik hati dan bahkan dipilih oleh penulis ketika mencapreskan diri pada Pemilu 2004. Barangkali memang benar, untuk bisa menjadi presiden dibutuhkan kualitas dan nilai A-plus, bukan A-min.

Apa yang penulis cermati perihal lengsernya Gus Dur? Tidak lain adalah semangat mempertahankan keutuhan bangsa, walau dengan mengorbankan jabatan diri. Ini sekaligus tercermin dari sikap terakhir yang diambil oleh dua Presiden sebagaimana disebut di atas, ketika diserang dari segala penjuru oleh aktor maupun situasi. Sejarah tentu mencatat dengan berbagai versi tentang para tokoh itu, berikut dengan temuan-temuan data oleh waktu di masa kini maupun masa depan. Terbuka ruang di mana tiap orang mencerna sesuai dengan kapasitas dan pengalaman.

Seandainya Gus Dur menghendaki, bisa saja mengerahkan segenap daya upaya, fisik maupun non-fisik, untuk tetap ngotot menjadi Presiden. Apalagi saat itu, konon pasukan Banser sudah siap dengan darah penghabisan. Bahkan kalaupun kalap

dapat saja menggunakan Pasal 10 UUD 1945 pra-Amandemen, bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, untuk memerangi kekuatan-kekuatan kontra-Presiden. Istilah "tertinggi" dalam pasal itu bisa saja dimaknai tidak lagi berada di bawah MPR.

Lagi-lagi, opsi ini pun tidak dilakukan oleh dua Presiden tersebut di atas. Syukur alhamdulillah, tragedi Tiananmen 1989 tidak terjadi di tanah air di era kejatuhan Gus Dur. Di mana rezim demokratis tidak lantas menjadi musabab instabilitas politik hingga mengakibatkan situasi darurat dan memancing militer untuk naik kembali ke panggung kekuasaan. Ini baru berbeda dibandingkan dengan transisi politik dari kepemimpinan Orde Lama kepada Orde Baru di mana militer menemukan momentum untuk mengambil alih kekuasaan.

Gus Dur tentu memperhitungkan bahwa apa yang telah diupayakan sekuat tenaga, waktu dan pikiran untuk menancapkan pilar-pilar penting kenegara-bangsaan dapat roboh seketika ketika terjadi situasi darurat yang berpotensi memundurkan demokrasi apabila salah langkah. Setelah dilengserkan pun, ketika UU 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf *d*, yang kemudian diatur secara teknis melalui SK KPU 26/2004 tentang Tata Cara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, Pasal 4, bahwa seorang calon harus *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden,* PKB maupun simpatisan Gus Dur melakukan upaya konstitusional melalui *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun upaya itu akhirnya kandas di tangan MK, namun *toh* Pemilu tetap berjalan seperti biasa dengan tanpa adanya gesekan horisontal ataupun penggembosan Pemilu

melalui pembentukan opini untuk golput. Artinya, jalur-jalur hukum dikedepankan walaupun keputusan yang dihasilkan tidak berpihak kepadanya. Sejarah kemudian mencatat bahwa perjuangan untuk menuntut hak tentu harus dibarengi dengan kesadaran akan lebih pentingnya keutuhan rajutan kehidupan berbangsa-bernegara. Tidak semata-mata memperjuangkan hak walaupun harus ambyar semuanya.

Lebih lanjut, politik pasca-Reformasi menampilkan sisi menarik, bahwa para elite yang sangat terang benderang memperlihatkan ambisi untuk menjadi RI-1 biasanya justru harus memungut bola dari gawangnya sendiri. Sementara para elite yang mampu membaca psikologi massa dengan menyembunyikan sehalus mungkin ambisinya (*solu-solu*) justru yang kerap beruntung (*ketiban pulung*). Alhasil, diri, alias ego, memang bukanlah fatsun politik kita. Entah secara normatif, maupun pragmatis. *Wallahu A'lam*.

Gus Dur, *Sheriff* dan *High Noon in Jakarta*[1]

Ahmad Hakim Hayli

ENTAH kenapa, tiba-tiba saya teringat pada sebuah film.[1] Bukan film *Hollywood* yang kerap memainkan imajinasi kita dengan sensasi adegan ranjang dan sengaja dipotong. Atau, film-film *Bollywood* yang memanjakan para pecinta lagu dan gerak tarik ala Hindustan dan Sungai Gangga. Bukan, bukan itu! Saya teringat sebuah film dokumenter berjudul *High Noon in Jakarta*. Memang tidak beredar di gedung bioskop 21 atau XXI. Film ini beredar di kalangan para aktivis di seputaran tahun 2001, pasca-Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dijerat dengan pasal politik yang tak masuk akal dan berujung pelengseran.

Orang seusia saya tak mungkin bisa melupakan suasana itu. Saya sedang di Jakarta kala Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001. Mengantar para kiai dari Jawa Timur, berangkat dengan

1 Tulisan ini sudah diterbitkan di *Arrahim.id*, 2 Mei 2020.

belasan bus dari Taman Bungkul Surabaya. Mereka diundang ke Pondok Pesantren Assiddiqiyah Batuceper, Tangerang, bersama para ulama se-Nusantara. Saya baru tahu belakangan, kalau pertemuan itu sengaja digelar untuk memberi penjelasan tentang situasi politik yang tak mungkin lagi ada titik temu dan berisiko tinggi pada *impeachment*. Gus Dur sebagai presiden emoh mengompromikan hal prinsip yang itu sudah dikunci mati dalam konstitusi negara. Walau dikeroyok oleh para politisi yang dulu mendukungnya di Pemilihan Presiden 1999, Presiden Gus Dur tak gentar. Dia berani menghadapinya sendirian, bahkan ketika tak didukung oleh kekuatan militer, di mana ia adalah panglima tertingginya.

Nah, film tadi bercerita tentang keberanian Presiden yang cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Adalah Curtis Levy, sutradara asal Australia, yang membesutnya. Diproduksi dan ditayangkan Australian Broadcast Corporations (ABC), *High Noon in Jakarta*—dengan apik, epik dan apa adanya—merekam satu ruas sejarah Indonesia tentang keberanian seorang presiden bernama Gus Dur dalam mengambil keputusan penting berefek internasional terkait pelanggaran HAM di Timor l'Este, yang melibatkan militer Indonesia.

Menkopolkam era Presiden GusDur, Jenderal Wiranto, dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor l'Este dan harus bertanggung jawab mengingat posisi dia sebagai pemegang pucuk pimpinan militer ketika peristiwa itu terjadi. Gus Dur akhirnya memang menonaktifkan Jenderal Wiranto dari posisinya sebagai Menkopolkam, dalam situasi politik di mana Presiden (sebenarnya) butuh *back-up* militer secara politik, mengingat posisi pemerintahan transisi kala itu. Keputusan itu didasarkan semata untuk kepentingan Indonesia sebagai

negara berdaulat, dan harus menghormati deklarasi kemanusiaan yang menjadi konsensus semua negara di dunia. Selain itu, Gus Dur yang sedang gencar menarik investasi internasional bagi Indonesia yang belum sepenuhnya lepas dari krisis moneter, tidak ingin tersandera oleh keberadaan anggota kabinet yang dituduh melanggar HAM oleh dunia.

Saya hanya bisa bayangkan. Tak akan ada presiden yang seberani Gus Dur setelahnya, mengambil pilihan sulit itu dengan percaya diri dan riang gembira. Risikonya cukup berat, berhadapan dengan para politisi dan tentaranya sendiri yang sudah tiga puluh dua tahun menikmati singgasana. Sementara, Gus Dur jauh dari *background* ketentaraan. Kalau dengan Banser memang dekat. Haha….

Dan keputusan pun diambil. Wiranto dinonaktifkan dengan cara yang tidak biasa. Dia umumkan pemecatan orang kuat itu dari luar negeri, saat sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Gus Dur seperti ingin mengatakan kepada dunia internasional begini: *"Loe tantang gue. Emang gue takut!"* Orang pesantren menyebutnya, sebagai *muqtad al-makan,* mengerjakan sesuatu sesuai konteks tempatnya. Setidaknya, urusan internasional sudah selesai. Urusan dalam negeri biar diselesaikan belakangan secara internal. Dunia internasional tak usah turut campur.

Keberanian GusDur itu oleh Levy disandingkn dengan keberanian dan kesatriaan seorang *sheriff* dalam film *High Noon* yang hanya sendirian melawan sekawanan bandit yang menantang duel di siang bolong. Untuk membuat film dokumenter ini, Levy membutuhkan waktu empat bulan, termasuk mengikuti perjalanan Gus Dur selama lima belas hari ke Eropa dan Asia. Dalam kunjungan resmi kenegaraan ini, Levy meng-

gambarkan bagaimana situasi diplomasi menghadapi opini internasional terkait kasus Timor l'Este.

Kenapa film ini diberi judul *High Noon in Jakarta*? *Pertama*, Levy menilai ada kemiripan karakter keberanian (*brave*) antara Gus Dur dengan tokoh *Sheriff* dalam film aslinya, *High Noon*. *Kedua*, dalam masa-masa kritis menghadapi masalah ini, Gus Dur (ketika *nyantai* dan berolah raga jalan pagi di pagi buta) sering bersenandung lagu yang menjadi *soundtrack* film *High Noon* yang diciptakan Text Ritter. Syairnya sangat menggambarkan situasi pelik saat itu:

> *"I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave and I must face the man who hates me, now that I need you by my side".*

Kira-kira artinya begini*:*

> *Aku tak tahu, takdir apa yang kini sedang menungguku. Yang aku tahu hanyalah, aku harus berani, menghadapi orang yang sedang membenciku. Kini, aku membutuhkanmu untuk tetap di sisiku.*

Heroik, tapi kita juga tetap bisa berucap*: So Sweat...!*

Di bagian akhir film berdurasi lima puluh sembilan menit itu, ada adegan Gus Dur bercerita kepada para pengawalnya, bahwa sang *sheriff* akhirnya berangkat menuju stasiun kereta, tempat di mana dia harus berduel dengan para bandit yang akan menuntut balas. Padahal di hari itu pula, dia akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya.

"Do not forsake me, oh my darling. I must be brave..." Jangan tinggalkan aku, sayang. Karena saat ini aku harus berani. Lirik pesan cinta dari sang *sheriff* itu didendangkan mantan Ketua Umum PBNU itu, ditirukan dan juga ditiru olehnya di alam nyata. Gus Dur berani menghadapi tekanan internasional, sebagaimana dia juga berani menghadapi para politisi yang hanya berpikir kekuasaan dan kursi kabinet. Sebagaimana *sherrif* yang berduel melawan sekawanan bandit dalam *High Noon*, Gus Dur pun berani menghadapi segala jerat culas, demi kesatuan Indonesia tercinta.

Curtis Levy menjulukinya *High Noon In Jakarta.* Siang Bolong di Kota Jakarta. Saat matahari Jakarta tepat di atas kepala.

Kronologi Pemakzulan Gus Dur

Tanggal	Kejadian
28 Agustus 2000	Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Soetardjo Soerjogoeritno membahas usulan pembentukan Pansus Buloggate dan Bruneigate. Rapat Paripurna DPR ini menyetujui hak angket untuk melakukan penyelidikan atas kedua kasus tersebut.
5 September 2000	DPR membentuk Pansus Buloggate dan Bruneigate.
15 September 2000	Keluar SK DPR No. 05/DPR RI/I/2000 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
15 September 2000	Bachtiar Chamsyah ditetapkan sebagai ketua Pansus melalui Keputusan Pimpinan DPR No. 13/PIMP/I/2000-2001 tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPR RI untuk Mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Tanggal	Kejadian
30 November 2000	Pansus Buloggate dan Bruneigate baru dicatatkan dalam Lembaran Negara.
29 Januari 2001	Pansus Buloggate dan Bruneigate yang diketuai oleh Bachtiar Chamsyah melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna DPR.
1 Februari 2001	DPR memutuskan menyetujui dan menerima laporan hasil kerja Pansus Buloggate dan Bruneigate, dan akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Memorandum I.
29 Maret 2001	Presiden Gus Dur memberikan jawaban memorandum I dalam Sidang Paripurna DPR. Jawaban Presiden Gus Dur dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Baharuddin Lopa.
30 Maret 2001	DPR dalam Rapat Paripurna DPR mengeluarkan Memorandum II DPR kepada Presiden Gus Dur.
30 April 2001	Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Respon Presiden Gus Dur atas Memorandum DPR RI dan Pengambilan Keputusan atas Proses Memorandum DPR RI, memutuskan menyampaikan Memorandum yang kedua kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid; serta memberi waktu satu bulan kepada Presiden untuk mengindahkan Memorandum II.

Tanggal	Kejadian
30 April 2001	Keluar Keputusan DPR RI No. 47/DPR RI/IV/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum Yang Kedua DPR RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
1 Mei 2001	Ketua DPR menyampaikan memorandum II kepada Presiden Gus Dur melalui Surat No. KD.02/2021/DPR RI/2001 perihal Penyampaian hasil Rapat paripurna DPR RI Ke-53 tanggal 30 April 2001.
28 Mei 2001	Jaksa Agung RI mengirimkan surat balasan kepada Ketua DPR dengan nomor: R.268/A/F/05/2001 Perihal Hasil Penyelidikan Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam. Dalam suratnya itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa tidak ditemukan cukup alat bukti yang mengindikasikan Presiden Gus Dur dapat diproses lebih jauh secara hukum.
29 Mei 2001	Presiden Gus Dur megirim surat kepada Pimpinan DPR RI perihal Respon atas Memorandum II, di mana Presiden merasa tidak perlu menjawab Memorandum II.

Tanggal	Kejadian
30 Mei 2001	Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda acara Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Proses Memorandum II DPR RI kepada Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid memutuskan bahwa Presiden Gus Dur tidak mengindahkan Memorandum II DPR RI; dan meminta MPR RI mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
30 Mei 2001	Ketua DPR, Akbar Tanjung, menyampaikan Keputusan Rapat Paripurna DPR kepada Ketua MPR RI dengan Suratnya Nomor: KD/02/2601/DPR RI/2001.
1 Juni 2001	Pimpinan MPR melakukan rapat dan memutuskan bahwa Badan Pekerja MPR akan menyelenggarakan rapat mulai tanggal 1 Juni 2001 untuk mempersiapkan bahan SI MPR. Pertemuan Pimpinan MPR juga menyepakati **pelaksanaan SI MPR pada 1 Agustus 2001**.
2 Juni 2001	Keluar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/Polri/2000 yang berisi pengangkatan Komisaris Jenderal (Pol) Chaeruddin Ismail sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) dan menjadi Pelaksana Tugas Kapolri, dan Keppres Nomor 41/Polri/2001 yang berisi penonaktifan Kapolri Komisaris Jenderal (Pol) S. Bimantoro.

Tanggal	Kejadian
3 Juni 2001	Sekitar seratus dua perwira tinggi dan menengah polisi menyatakan protes menolak polisi dijadikan alat kekuasaan dan politik. Pernyataan sikap para perwira ini dibacakan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Sofjan Jacoeb.
3 Juni 2001	Jenderal Polisi S. Bimantoro mengadakan pertemuan dengan delapan Pimpinan Fraksi DPR di Hotel Dharmawangsa. Kesimpulan dari pertemuan itu adalah bahwa Pimpinan Fraksi DPR tetap menganggap Bimantoro sebagai Kapolri.
4 Juni 2001	Para mantan Kapolri yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Polri mengeluarkan pernyataan menolak penonaktifan Bimantoro sebagai Kapolri. Pernyataan sikap ini dibacakan Awaloeddin Djamin (Kapolri 1978-1982).
4 Juni 2001	Juru Bicara Kepresidenan, Adhie Massardi, menanggapi situasi saat itu dengan menyatakan bahwa ada kelompok yang berusaha menyeret Polri masuk dalam rekayasa politik dan diadu dengan Presiden. Bertemunya Jenderal Bimantoro dengan beberapa elite politik mengiindikasikan sangat kuat bahwa Polri hendak diseret ke dalam permainan politik.
5 Juni 2001	Fraksi-fraksi DPR mengadakan rapat dengan Pimpinan DPR. Ketua DPR, Akbar Tanjung, menyatakan bahwa sembilan Fraksi DPR tetap mengakui Jenderal (Pol) S. Bimantoro sebagai Kapolri.

Tanggal	Kejadian
6 Juni 2001	Jenderal (Pol) S. Bimantoro mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI.
30 Juni 2001	Presiden Gus Dur memberhentikan Jenderal (Pol) S. Bimantoro –yang sudah dinyatakan nonaktif dengan Keppres No. 41/Polri/2001 sejak 2 Juni 2001—dari jabatan Kapolri melalui Keppres Nomor 49/Polri/2001.
1 Juli 2001	Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-55 Bhayangkara di lapangan Bhayangkara, Markas Besar Polri, Presiden Gus Dur menyampaikan tawaran posisi Duta Besar Malaysia kepada Jenderal (Pol) S. Bimantoro.
3 Juli 2001	Menanggapi permintaan tujuh Pimpinan Fraksi di DPR kepada Pimpinan DPR agar diadakan percepatan SI MPR, Pimpinan DPR melaksanakan Rapat Pimpinan di Hotel Mulia. Rapat menyepakati membawa usulan ini kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
4 Juli 2001	Bamus DPR menyepakati dua hal: (1) mengirim surat kepada Presiden agar mengindahkan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri; (2) menyampaikan kepada Pimpinan DPR agar surat permintaan tujuh Fraksi tentang percepatan SI diteruskan kepada Pimpinan MPR untuk ditindaklanjuti.

Tanggal	Kejadian
5 Juli 2001	Pimpinan DPR menindaklanjuti hasil Bamus dengan melayangkan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden bernomor KD.02/3461/DPR RI/2001; dan melayangkan surat Ketua DPR RI kepada Ketua MPR Nomor KD.02/3462/DPR RI/2001.
6 Juli 2001	Pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi di MPR. Pertemuan ini merekomendasikan agar Pimpinan MPR mengundang anggota Badan Pekerja (BP) MPR untuk mengadakan rapat dengan agenda mendengarkan pendapat Fraksi MPR terhadap usulan percepatan penyelenggaraan SI MPR.
9 Juli 2001	Rapat BP MPR merekomendasikan kepada Pimpinan MPR untuk menyelenggarakan SI MPR pada 1 Agustus 2001, dengan catatan, SI MPR bisa dipercepat jika situasi dan kondisi dianggap semakin memburuk.
11 Juli 2001	Ketua MPR melayangkan Surat Pimpinan MPR No. MJ.950/65/2001 perihal Undangan SI MPR 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001, dengan kemungkinan mengundang anggota MPR untuk Rapat Paripurna MPR sewaktu-waktu.
20 Juli 2001	Presiden Gus Dur melantik Wakapolri Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Kapolri.

Tanggal	Kejadian
21 Juli 2001	Rapat Paripurna MPR menetapkan percepatan SI MPR.
23 Juli 2001	Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berisi: membekukan DPR-MPR; mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat; dan membekukan Partai Golongan Karya (Golkar).
23 Juli 2001	**Sidang Istimewa MPR memakzulkan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.**

Kontributor

Ahmad Hakim Jayli, lahir di Pasuruan, 24 Mei 1972. Alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gadingkasri, Kota Malang, ini sejak mahasiswa telah jatuh cinta pada dunia jurnalistik. Kecintaannya pada dunia pers, membawanya ke Jakarta menempuh pendidikan pascasarjana di bidang Manajemen Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia. Di awal Januari 2010, dia mendirikan PASTV yang kemudian berubah menjadi TV9 Nusantara di mana dia menjadi Direktur Utamanya. Selepas menyelesaikan kuliah S1-nya di Universitas Brawijaya Malang, dia dipercaya menjadi sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan selana dua periode (2001-2011). Sebelumnya, saat Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998, dia ditunjuk para kiai NU setempat menjadi Ketua Dewan Tanfidz PAC PKB Kecamatan Rejoso. Kini, suami yang penuh kesetiaan ini berkhidmah sebagai Wakil Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU dan Wakil Sekretris PWNU Jawa Timur.

Ahmad Zainul Hamdi, atau yang biasa dipanggil **Ahmad Inung** ini, lahir di Lamongan, 18 Mei 1972. Sehari-harinya, ayah dua orang putri (Firsta Regina Citasmara dan Sania Idayu Virginia) ini menjadi Ketua Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UINSA Surabaya. Dia juga mengajar di Pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA).

Di luar dunia kampus, dia aktif di Jaringan GUSDURian sebagai *senior advisor*. Di lingkungan NU Jawa Timur, suami Ayik Zakiyah Ekowati ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur. Salah satu hobinya adalah "ngamen" ke sana ke mari. Akhir-akhir ini, dia melebarkan sayap aktivitasnya dengan mencoba menjadi seorang "ustadz" untuk generasi milenial.

Aksin Wijaya lahir di Sumenep, 1 juli 1974. Dia adalah salah seorang pengajar di IAIN Ponorogo dan Pascasarjana IAIN Kediri. Saat mahasiswa, dia aktif di PMII dan IPNU Jember. Saat ini, dia diangkat sebagai Dewan Pakar ISNU Ponorogo. Bapak empat orang putri ini bisa dibilang sangat produktif. Sudah lahir dua puluh buku dari tangannya, di samping beberapa artikel jurnal lainnya.

Anis Hidayatie, lahir di Malang, 26 Desember 1972. Sehari-harinya, ibu dua orang putra ini menjadi guru di SMP Islam NU 1 Pujon, Malang. Dia juga aktif sebagai ketua Komunitas Menulis Buku Malang Raya dan Sekitarnya (KomalkuRaya) serta ketua Forum Komunikasi Lintas Komunitas Pasuruan (Forkompas). Di samping sebagai seorang guru, dia juga seorang penulis dan jurnalis *online*, Kompasiana, Kaskus, dan kabardaerah.com. Karya buku perdanannya berjudul *Salikah, Tentang Cinta dan Ruang Sunyi*.

Fahrul Muzaqqi adalah penulis buku *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Di Lakpesdam NU Jawa Timur, dia diamanahi sebagai Koordinator Bidang Kajian Isu Strategis. Sebagai dosen di Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga, Surabaya, dia mengampu mata kuliah: Negara, Agama dan Demokrasi; Elit Politik; Gerakan Sosial-Politik; Demokrasi dan Demokratisasi; dan Perbandingan Politik.

Fawaizul Umam, lahir di Banyuwangi, 27 Februari 1973. Dosen di IAIN Jember sejak 2016, setelah sebelumnya menjadi dosen di UIN Mataram sejak 2000. Mulai 2009 memberanikan diri menjadi Wakil Pengasuh PP Miftahul Ulum Wongsorejo Banyuwangi. Di lingkungan NU, pria penyuka "tubuh gemuk" ini kini diamanahi sebagai salah satu korbid di PC ISNU Jember.

Ferhadz A. Muhammad lahir di Rembang. Dia menyelesaikan jenjang pendidikan di beberapa daerah, seperti Rembang, Kudus, Yogyakarta, dan sekarang sedang menempuh jenjang magister di Universitas Airlangga Surabaya pada Program Studi Ilmu Politik. Selain menjalankan rutinitas sebagai mahasiswa semester akhir, pemuda yang memiliki hobi futsal ini juga menggeluti kegemaran menulis artikel tentang sosial-politik, keagamaan, sampai persepakbolaan.

Hufron, lahir di desa Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur, pada 6 Maret 1968. Setelah menyelesaikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1991), dia baru menyelesaikan Magister Hukum (MH) pada 2002 di Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya. Sepuluh tahun kemudian mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum (Bidang Hukum Tata Negara) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sehari-harinya adalah seorang dosen pada Program Doktor

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Surabaya. Buku terbaru yang ditulisnya adalah *Pemberhetian Presiden Indonesia, Antara Teori dan Praktik* yang diterbitkan oleh LaksBang, Yogyakarta, (2018). Saat ini dia dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur (2018-2023) dan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Jawa Timur. Komunikasi dan korespondensi dapat melalui email: hufron@untag-sby.ac.id atau Hp. 081-2352-9300.

Listiyono Santoso adalah salah pengajar ilmu filsafat dan etika di Fakultas Ilmu Budaya UNAIR Surabaya. Dia menulis buku *Teologi Politik Gus Dur* (2003). Sewaktu mahasiswa, aktif di PMII Komisariat UGM dan cabang Sleman. Saat ini, dia menjadi ketua Lakpesdam PWNU Jawa Timur (2018-2023).

M. Faizi lahir di Sumenep, 27 Juli 1975. Ia merupakan penikmat perjalanan dengan bis antarkota. Kesehariannya disibukkan oleh aktivitas mengajar di langgar, madrasah, sekolah, dan kampus, serta berkegiatan sosial dengan masyarakat sekitar rumahnya. M. Faizi tidak pernah berjabat tangan dengan Gus Dur, tidak pernah bertatap muka langsung dengan Gus Dur, tapi tinggal di Guluk-Guluk, suatu desa yang pernah dikunjungi dan diinapi oleh Gus Dur (baik sebagai presiden maupun sebagai kiai) dan juga pernah dikunjungi ayahnya (Kiai Wahid Hasyim), serta kakeknya (Hadratus Syaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari).

M. Mas'ud Said, lahir di Sidoarjo, 8 Maret 1964. Pria yang akrab dipanggil Cak Ud ini menyelesaikan doktor (Ph.D)

pad bidang Ilmu Pemerintahan di School of Political and International Studies, Flinders University, Adelaide, Australia, melalui beasiswa AusAid. Pada tahun 2009, M Mas'ud Said dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan pidato ilmiah "Menggagas *Innovative Bureaucracy* Pemerintahan Indonesia". Sejak 2019, dia dipercaya menjadi Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2019 - 2023). Setahun sebelumnya, dia terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur untuk masa bakti 2018-2023. Salah satu karya akademiknya adalah *New Directions for Decentralisation In Indonesia; Decentralisation Policy and Its Implementation in District and Provincial Administration*, diterbitkan oleh Lambert Academic Publishing, Germany, 2010.

M. Said Hudaini, lahir dan besar di kampung kecil tepi Danau Ranu Grati Pasuruan. Selain di surau, madrasah, dan pesantren al-Qur'an, pernah juga menjadi murid di Fakultas Filsafat serta Ilmu Komunikasi UGM. Saat ini dia dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi TV9 Nusantara dan Wakil Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur. Lelaki yang nyaris tidak menamatkan kuliahnya ini akhirnya ditakdirkan menjadi seorang dosen di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya dan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pasuruan. Pengagum Gus Dur garis keras ini sejak kecil memendam cita-cita menjadi Sekjen PBNU, sebuah cita-cita mulia yang memerlukan doa para *waliyullah* sejagad untuk mewujudkannya.

Marzuki Wahid lahir di Cirebon, 20 Agustus 1971. Laki-laki yang tidak ada hubungan darah dengan KH Abdurrahman Wahid ini pernah *nyantri* di PP Babakan Ciwaringin Cirebon, PP Krapyak Yogyakarta, PP Salafiyyah Pemalang, dan PP Lirboyo Kediri. S1 ditempuh pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995), S2 diselesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), sekarang masih menyelesaikan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendiri Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon ini *didapuk* menjadi Sekretaris Lakpesdam-PBNU periode 2015-2020. Salah satu karya tulis terbarunya adalah "Agama, Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Inklusif: Catatan Reflektif atas Hasil Riset pada Empat Daerah'" dalam Ahmad Zainul Hamdi & Marzuki Wahid (ed.), *Ruang untuk Yang Kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas* (Yogyakarta: Gading, 2017). Kang Zekky, begitu biasa ia dipanggil, dapat dihubungi melalui email: marzukiwahid@gmail.com; fb dan twitter: @marzukiwahid.

Moh. Syaeful Bahar lahir di Bondowoso pada 1978. Sebelum menempuh pendidikan di UINSA Surabaya dan UNAIR Surabaya, dia *nyantri* di PP. Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Dia juga pernah menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel dan Unair Surabaya. Bapak tiga anak ini merupakan dosen di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UINSA Surabaya dan mengabdikan diri sebagai pengurus PC. NU Bondowoso. Mantan aktivis 98 dan PMII ini berhasil menjadi Wisudawan Terbaik S3 FISIP UNAIR pada 2017.

R.N. Bayu Aji adalah arek Suroboyo asli. Ia lahir dan besar di Surabaya. Bapak tiga orang anak ini merupakan pengajar Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Surabaya. Selain mengajar dan menulis, waktu luangnya banyak digunakan untuk nongkrong dan nonton sepak bola. Saat ini, dia tergabung sebagai anggota Lakpesdam PWNU Jawa Timur.

Rijal Mumazziq Z., Lahir di Jember, 30 April 1984. Pernah menjadi Redaktur Majalah AULA (2005-2010), dan menulis beberapa buku: *Cermin Bening dari Pesantren* (Surabaya, Khalista, 2009); *Jalan Terjal Santri Menjadi Penulis* (Surabaya, Muara Progresif: 2009); *Kiai Kantong Bolong: Refleksi Kepemimpinan Bangsa* (Jakarta, Quanta: 2017); *KH. Hasyim Asy'ari: Bakti Kiai Untuk Negeri* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2017); *Surabaya: Kota Pahlawan Santri* (LTN NU Surabaya: 2017); *Menyongsong Takdir Meniti Asa: Biografi Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA* (Surabaya: Imtiyaz, 2018); dan *Khidmah Keummatan KH. Syafawi Ahmad Basyir* (Surabaya, Imtiyaz: 2020). Saat ini, dia menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (INAIFAS) Kencong Jember. Dia juga aktif menulis di berbagai media massa, khususnya media online. Bisa dihubungi melalui rijalmz@gmail.com atau di 085-645-311-110.

Tohadi terlahir di Kota Mangga, Indramayu, dari keluarga *Nahdliyyin* kultural. Sebagai wujud kekagumannya kepada sosok Gus Dur, lulusan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dan pascasarjana FISIP UI Jakarta ini pernah *nderek* menjadi kuasa hukum mantan Presiden RI ke-4 itu dalam menuntut hak-hak konstitusionalnya baik sebagai warga negara maupun sebagai

calon presiden yang diganjal oleh para politisi di parlemen. Kini, ia berpraktik sebagai advokat profesional pada kantor hukum "Tohadi dan Kawan (AdiKa)". Dia juga dikenal sebagai pengamat politik dan hukum tata Negara. Di samping sebagai advokat, dia juga berprofesi sebagai pengajar pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) dan Prodi Ilmu Hukum Universitas Presiden (President University).

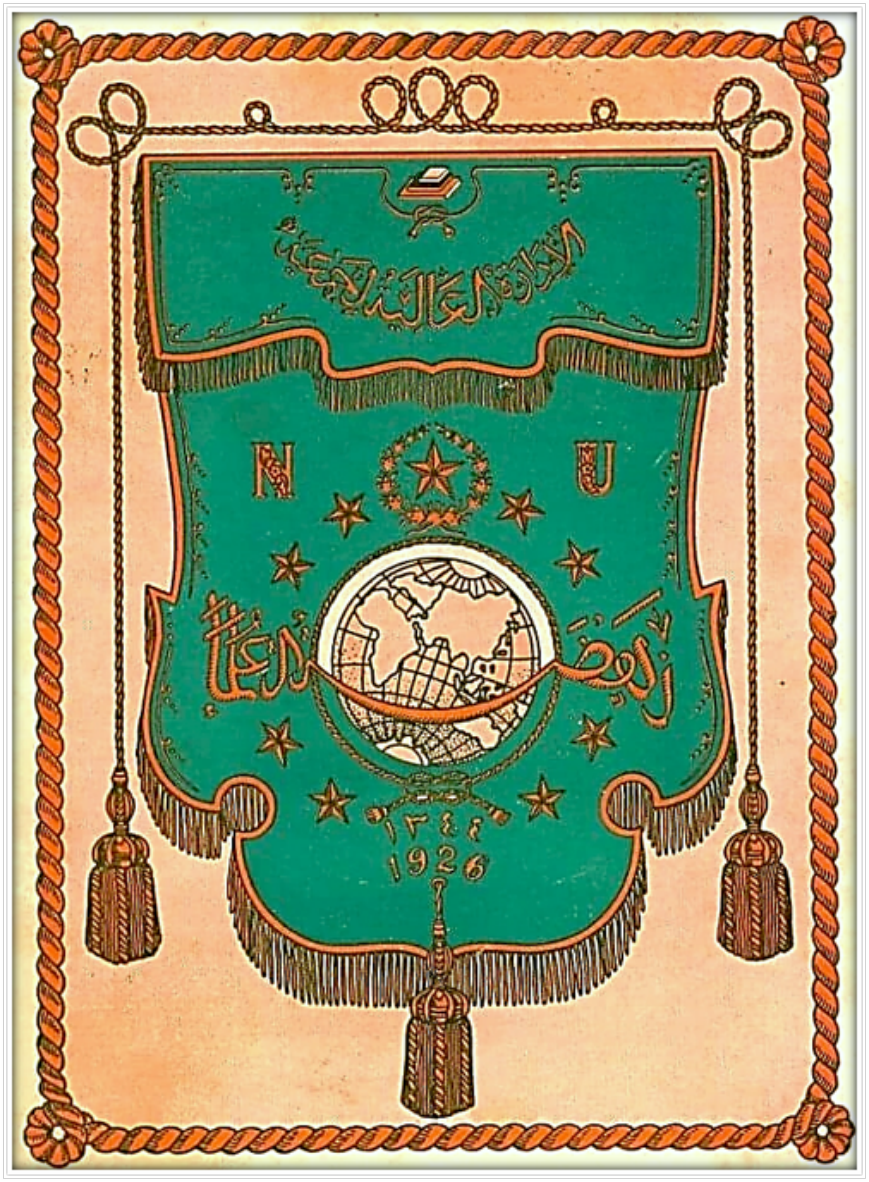
N U
١٣٤٤
1926

LKiS
adın

Sebagai fakta sejarah, Gus Dur pernah menjadi Presiden dan akhirnya berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Ada yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan dijatuhkan. Tapi apapun istilahnya, Gus Dur "harus" berhenti sebagai presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Banyak kisah di balik jatuhnya Gus Dur. Gus Dur sendiri mengatakan, "Silakan orang menafsirkan, saya juga mempunyai tafsir tentang diri saya sendiri". Buku ini adalah kumpulan tulisan yang merupakan tafsir orang berdasar pengalaman dan analisisnya sendiri-sendiri. Pasti memperkaya informasi. **Mohammad Mahfud MD** (Menkopolhukam Republik Indonesia; Menteri Pertahanan pada Era Presiden KH Abdurrahman Wahid)

Buku ini berisi catatan testimonial dari para "Gus Durian" muda tentang sejarah pelengseran Gus Dur. Melalui buku ini kita jadi tahu bahwa Gus Dur adalah sosok bangsawan yang tiada tanding-tiada banding; altruistik par excellence. Dia telah mewakafkan diri menjadi korban sejarah dari perilaku segelintir orang yang penuh tipu daya, rekayasa busuk, dan ambisi jangka pendek. Pesan implisit dari buku ini adalah: pelengseran Gus Dur tidak harus menimbulkan kebencian, apalagi dendam kesumat, tetapi kearifan sejarah untuk tidak mengulangi peristiwa yang sama di kemudian hari. **Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D** (Rektor UINSA Surabaya)

Gus Dur merupakan sosok yang multidimensi. Ia bukan hanya seorang kiai, tapi juga budayawan, intelektual, aktivis, dan negarawan. Gus Dur memiliki satu hal yang tak dimiliki oleh politisi pada umumnya, yaitu keteguhan prinsip. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari persentuhannya dengan realitas masyarakat selama puluhan tahun. Maka dari itu, menggusur Gus Dur merupakan kerja kolosal yang menuntut kedisiplinan dan ketekunan. Buku ini merupakan sebuah kumpulan ingatan kolektif tentang Gus Dur, terutama kiprahnya selama menjadi Presiden. Menariknya, meski terlibat dalam politik praktis, Gus Dur tidak melakukan "kepraktisan" dalam politik. Justru Gus Dur menjalankan politik nilai. Oleh sebab itu, Gus Dur diturunkan dari jabatannya sebagai presiden. Gus Dur memang kalah dalam politik, tetapi ia tidak kalah secara prinsip. **Virdika Rizky Utama** (Penulis buku *Menjerat Gus Dur*)

Gading Publishing
Jl. Pura No 203
Sorowajan Baru
Yogyakarta

ISBN 978-62-7177-08-1